



**KETERGANTUNGAN TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI  
PADA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



S

Angka : 1027085/2000	Terima Tgl: 23 OCT 2000	Klass 338.91 WIJ R
----------------------	-------------------------	-----------------------------

Oleh :

*Barman Rk.*

**ELISA WIJAYANTI**  
NIM. E1A195032

Pembimbing:  
Prof. Drs. H. BARIMAN  
Drs. SUNARDI P. MIS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2000**



MOTTO

*"Crises and deadlocks when they occur have at least this advantage, that they force us to think."<sup>1</sup>*

*"Musuh yang paling kuat adalah diri kita sendiri, itulah arti kemenangan yang sebenarnya."<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Jawaharlal Nehru, *The World Bank Indonesia In Crisis A Macro Economic Up Date*, The World Bank, Woshington DC, July 1998, chapter 1 hal. 1.

<sup>2</sup> Akira Masaki, *Good Luck 3*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1995, hal.187.



**PERSEMBAHAN**

- ♥ Kedua orang tuaku tercinta,  
**Bapak Mardiantho dan Ibu Siti Rahayu**  
atas semua bimbingan, kasih sayang serta doanya yang tulus.
- ♥ Adikku, **Ervina Widiyanti.**
- ♥ Almamater tercinta **Universitas Jember.**
- ♥ Agama, bangsa, dan negara.



PENGESAHAN

DITERIMA OLEH TEAM PENGUJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA STRATA SATU  
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

DIPERTAHANKAN DI MUKA TEAM PENGUJI  
PADA HARI: Senin  
TANGGAL : 2  
BULAN : Oktober  
TAHUN : 2000

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

TEAM PENGUJI

KETUA

(Drs. Asrial Azis)

SEKRETARIS

(Prof. Drs. H. Bariman)

ANGGOTA TEAM PENGUJI

1. Drs. Asrial Azis
2. Prof. Drs. H. Bariman
3. Drs. Soekron Sjah, SU
4. Drs. Sunardi P. MIS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

MENGETAHUI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEKAT



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130524832



## KATA PENGANTAR

Tiada yang lebih utama selain memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas semua rahkmat dan hidayah-Nya. Berkat karunia yang Dia berikan, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu ungkapan rasa terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman dan Bapak Drs. Sunardi P. MIS, selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Drs. Asrial Aziz, selaku dosen wali.
3. Bapak Drs. Soekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan LIPI, CSIS, UPT Perpustakaan Universitas Jember serta Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
6. Tanteku beserta keluarga di Bengawan Solo, Tante "Rico", maminya wiwin, juga mamanya Icha, terima kasih semuanya.
7. Anak-anak Pandawa Lima (Ety, Vivin, Linda, Windi), Nes and Nik, Seela B7-18, teman-teman yang pernah bareng di Bangka V (first experience).
8. Rekan-rekan HI' 95. Special thanks to Arin "Dion", Eni, Double Wahyu, Nana "Piero", Axi "Electric man", "Guitar teacher" yang batal, Bagus "Gong", Double Team (A&W). Semoga kita menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
9. Orang-orangnya PRIMA, MS. Ones "Arigato gozaimasu" untuk bukunya.

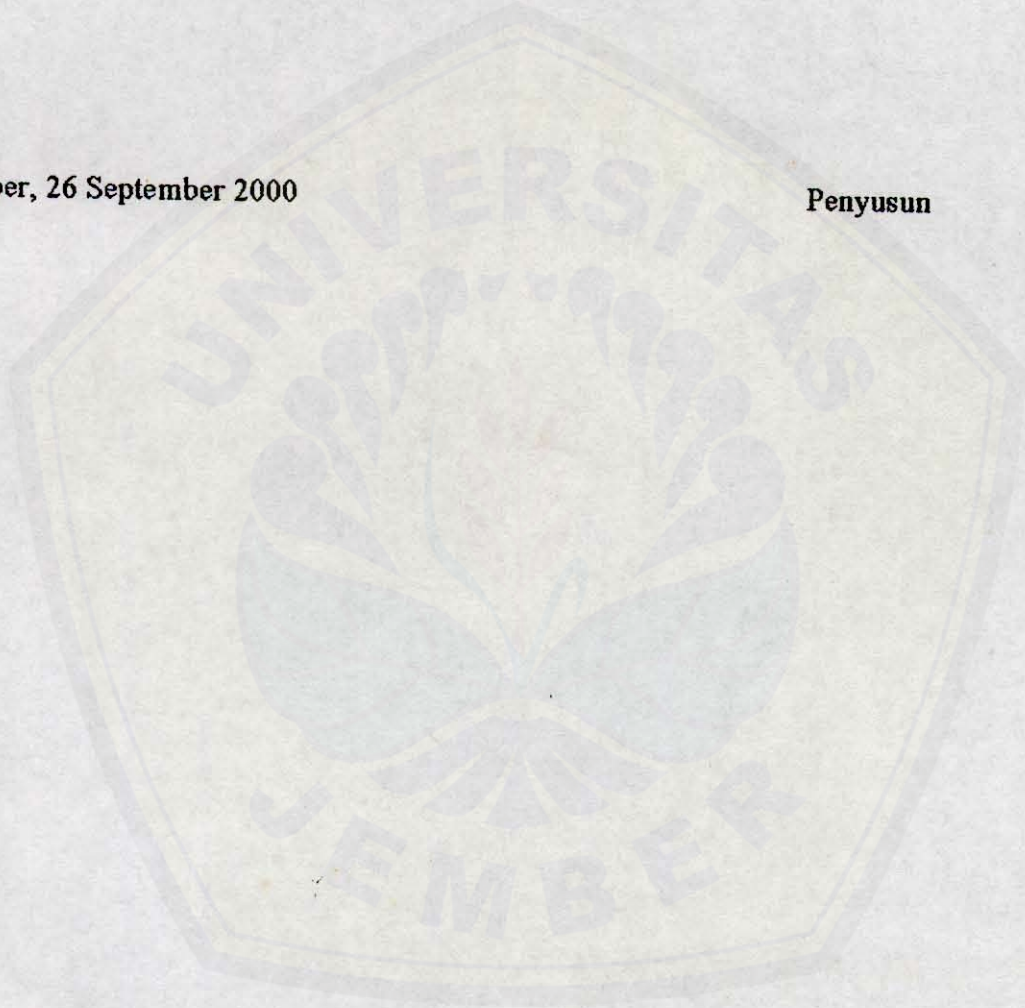


10. Kaset-kasetku, Serial "komik" Cantik (TOP & OCE, suwun...), My MuMu.  
Special lagi "Ikan-ikanku" the fresh maker di saat suntuk menyelesaikan skripsi.

Terakhir, tidak tertutup kemungkinan adanya kritik dan saran. Harapan penyusun, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 26 September 2000

Penyusun







## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
1.2.1 Batasan Waktu.....	8
1.2.2 Batasan Materi.....	9
1.3 Permasalahan.....	9
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	11
1.5 Hipotesis.....	17
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.2 Metode Analisis Data.....	18
1.7 Pendekatan.....	19
BAB II INDUSTRIALISASI DI INDONESIA.....	20
2.1 Sejarah Industrialisasi Di Indonesia.....	21
2.2 Argumentasi Dan Strategi Industrialisasi.....	25
2.2.1 Argumentasi Industrialisasi.....	25
2.2.2 Strategi Industrialisasi.....	27



2.3 Klasifikasi Dan Skala Industri.....	30
2.3.1 Klasifikasi Industri.....	30
2.3.2 Skala Industri.....	31
2.4 Perkembangan Selama PJP I.....	33
<b>BAB III KONDISI SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
3.1 Arus Modal Yang Tersedia.....	45
3.2 Kemampuan Sumber Daya Manusia.....	55
3.3 Alih Teknologi Di Indonesia.....	62
3.4 Manajemen Dalam Sektor Industri.....	78
3.5 Konsentrasi Pasar.....	87
3.6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana.....	92
<b>BAB IV DAMPAK KETERGANTUNGAN TERHADAP BANTUAN</b>	
<b>    LUAR NEGERI DAN KEBIJAKAN YANG DITEMPUH.....</b>	<b>96</b>
4.1 Dampak Yang Muncul.....	96
4.1.1 Daya Saing Produk.....	97
4.1.2 Perkembangan Ekspor Indonesia.....	104
4.1.3 Collapse Disaat Krisis.....	115
4.1.4 Lingkungan Industri.....	123
4.2 Kebijakan Menghadapi Perdagangan Bebas.....	131
4.2.1 Target Era PJP II Dan Globalisasi.....	133
4.2.2 Mencari Jalan Penyelesaian Hutang.....	145
4.2.3 Peningkatan Efisiensi Dan Daya Saing Produk Indonesia... ..	153
4.2.4 AFTA Sebagai Jalan Pembuka.....	169
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>180</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kode Klasifikasi Industri.....	xvii
2. Tabel Perkembangan Industri (jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserap) Berdasarkan Skala Usaha Tiap Sub Sektor .....	xviii
3. Tabel Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor (miliar rupiah).....	xxxii
4. Tabel Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor (juta US\$) .....	xxxiii
5. Tabel Nilai Impor dari Negara-Negara Mitra Dagang Utama (US\$) .....	xxxiv
6. Tabel Neraca Modal Indonesia 1969/1970-1997/1998 (juta US\$) .....	xxxv
7. Nilai Ekspor ke Negara Mitra Dagang Utama (US\$) .....	xxxvi
8. Tabel Daya Saing Internasional 47 Negara.....	xxxvii
9. Tabel Ringkasan Ekspor Indonesia (nilai).....	xxxix
10. Tabel Ekspor Hasil Industri (nilai).....	xl
11. Tabel Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi (juta US\$) .....	xli
12. Tabel PDB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah).....	xlii
13. Keputusan Presiden RI No. 95 Th. 1998 Tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia...	xliii



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan rata-rata tahunan beberapa sektor dalam PDB selama PJP I.....	37
Tabel 2.2 Kontribusi sektor dalam nilai ekspor non-migas tahun 1981-1994 ...	39
Tabel 2.3 Kontribusi komoditi utama sektor industri dalam penerimaan ekspor tahun 1981-1994.....	40
Tabel 3.1 Penanaman modal dalam negeri yang disetujui pemerintah tahun 1994-1998 .....	47
Tabel 3.2 Penanaman modal asing yang disetujui pemerintah tahun 1994-1998.....	47
Tabel 3.3 Angka kumulatif proyek-proyek penanaman modal asing (PMA) yang disetujui pemerintah menurut negara asal tahun 1967-1998 .....	48
Tabel 3.4 Nilai impor Indonesia tahun 1994-1998 .....	50
Tabel 3.5 Utang luar negeri Indonesia tahun 1994-1998 (Desember).....	54
Tabel 3.6 Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia tahun 1990-1998 .....	56
Tabel 3.7 Tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan dan jenis kelamin tahun 1998.....	57
Tabel 3.8 Tenaga kerja menurut jenis pekerjaan utama tahun 1998 .....	84
Tabel 4.1 Peringkat daya saing Indonesia.....	100
Tabel 4.2 Ekspor industri Indonesia.....	110
Tabel 4.3 Perkiraan jumlah pekerja yang terkena PHK di beberapa sektor penting .....	118
Grafik 4.4 Depresiasi nilai rupiah terhadap US\$.....	122
Tabel 4.5 Pertumbuhan ekonomi dunia .....	176



## BAB I PENDAHULUAN

### L1 Alasan Pemilihan Judul

Arus globalisasi telah berkembang begitu luas dan menjadi issue yang menyeret perhatian banyak pihak dimana pada setiap pembicaraan yang menjadi fokusnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga dapat bersaing dengan "orang lain". Globalisasi menurut Lodge (1995), sebagai suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin berhubungan (inter connected) satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan mereka baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.<sup>1</sup> Alvin Toffler mengingatkan bahwa kita sedang memasuki peradaban gelombang ketiga atau "The Third Wave", yaitu peradaban pasca industri yang ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi informasi sehingga disebut era teknologi informasi yang menjadi salah satu karakter utama arus globalisasi.<sup>2</sup>

Sedangkan globalisasi sendiri mencakup lima unsur yakni, *perdagangan* (AFTA, APEC); *investasi*, dimana modal akan mengalir ke tempat yang memberi banyak keuntungan; *industri*, suatu barang tidak hanya diproduksi di satu tempat; *teknologi*, terutama teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi dan lain-lain; *konsumsi*, dimana terjadi peralihan dari pemenuhan kebutuhan (needs) kepada pemenuhan permintaan atau wants (Salim, 1995).<sup>3</sup> Dari lima unsur tersebut mengakibatkan ekonomi melahirkan negara tanpa batas (borderless economy) sehingga kedaulatan ekonomi suatu negara berkurang oleh adanya suatu konvensi internasional, dengan demikian terjadi suatu mekanisme pasar yang merangsang persaingan antar produsen untuk memproduksi barang terbaik.

---

<sup>1</sup> JB. Kristiadi, Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Abad 21, dalam Manajemen Pembangunan, no. 21/V, 1997.

<sup>2</sup> ibid.

<sup>3</sup> Priyono Tjiptoheriyanto, Keadaan Tantangan Strategi Pengembangan SDM Menghadapi Era Globalisasi, dalam Menejemen Pembangunan, ibid.



Dalam dua dasawarsa terakhir globalisasi merupakan *satu* dari tiga kecenderungan yang mewarnai kehidupan negara-negara di dunia yang kian menonjol setelah berakhirnya Perang Dingin di mana sudah tidak ada ancaman eksternal yang semula begitu menakutkan dan menyebabkan kebijakan yang diambil oleh suatu negara lebih dititikberatkan pada bidang-bidang yang secara langsung menyentuh kehidupan mendasar manusia. Sehingga yang terjadi adalah pergeseran agenda utama pembicaraan internasional dari isu-isu *high politic* seperti politik dan keamanan digantikan dengan permasalahan ekonomi, HAM, lingkungan hidup, kemiskinan dan perdamaian dunia atau dengan kata lain didominasi oleh isu-isu *low politic*. Sedangkan kecenderungan *kedua*, yakni meningkatnya regionalisme yang terefleksikan dalam berkembangnya organisasi regional seperti ASEAN, EEC, APEC dan lain-lain. *Ketiga*, kecenderungan liberalisasi ekonomi yang memberikan peran lebih besar pada mekanisme pasar dalam perekonomian dan mengurangi intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Semua itu tercermin dalam usaha meminimalisasi barrier perdagangan antar negara.

Sebagai negara yang mempunyai posisi geo politik menguntungkan dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang melimpah, Indonesia tidak dapat lepas dari ketiga pengaruh di atas. Ketiganya saling terkait bahkan telah dan akan selalu mempengaruhi kehidupan nasional Indonesia. Oleh karenanya perlu ada peningkatan ketahanan. Kondisi negara Indonesia selama lebih dari 20 tahun terakhir khususnya di sektor perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan pesat yaitu dengan tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari 7% per tahun. Dalam hal pertumbuhan tersebut, World Bank (1993) mengelompokkan Indonesia dalam negara Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.<sup>4</sup>

Akhir tahun 1960-an industrialisasi di Indonesia telah tumbuh cepat melebihi angka 10% per tahun, semenjak pemerintah mengalihkan perhatian dari

---

<sup>4</sup>Muljanto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema Dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 229.



Dalam dua dasawarsa terakhir globalisasi merupakan *satu* dari tiga kecenderungan yang mewarnai kehidupan negara-negara di dunia yang kian menonjol setelah berakhirnya Perang Dingin di mana sudah tidak ada ancaman eksternal yang semula begitu menakutkan dan menyebabkan kebijakan yang diambil oleh suatu negara lebih dititikberatkan pada bidang-bidang yang secara langsung menyentuh kehidupan mendasar manusia. Sehingga yang terjadi adalah pergeseran agenda utama pembicaraan internasional dari isu-isu *high politic* seperti politik dan keamanan digantikan dengan permasalahan ekonomi, HAM, lingkungan hidup, kemiskinan dan perdamaian dunia atau dengan kata lain didominasi oleh isu-isu *low politic*. Sedangkan kecenderungan *kedua*, yakni meningkatnya regionalisme yang terefleksikan dalam berkembangnya organisasi regional seperti ASEAN, EEC, APEC dan lain-lain. *Ketiga*, kecenderungan liberalisasi ekonomi yang memberikan peran lebih besar pada mekanisme pasar dalam perekonomian dan mengurangi intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Semua itu tercermin dalam usaha meminimalisasi barrier perdagangan antar negara.

Sebagai negara yang mempunyai posisi geo politik menguntungkan dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang melimpah, Indonesia tidak dapat lepas dari ketiga pengaruh di atas. Ketiganya saling terkait bahkan telah dan akan selalu mempengaruhi kehidupan nasional Indonesia. Oleh karenanya perlu ada peningkatan ketahanan. Kondisi negara Indonesia selama lebih dari 20 tahun terakhir khususnya di sektor perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan pesat yaitu dengan tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari 7% per tahun. Dalam hal pertumbuhan tersebut, World Bank (1993) mengelompokkan Indonesia dalam negara Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.<sup>4</sup>

Akhir tahun 1960-an industrialisasi di Indonesia telah tumbuh cepat melebihi angka 10% per tahun, semenjak pemerintah mengalihkan perhatian dari

---

<sup>4</sup>Muljanto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 229.



persoalan politik ke ekonomi. Pembangunan ekonomi dan industrialisasi tersebut sejak Pelita I sampai sekarang dikelompokkan dalam 4 tahap pembangunan. Yaitu:

Tahap I, masa stabilisasi ekonomi antara tahun 1967-1972 yang ditandai dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Semenjak itu perekonomian Indonesia mulai menjadi terbuka dari perekonomian luar negeri. Impor meningkat diiringi tambahan dana pembangunan dari pinjaman luar negeri.

Tahap II, tahap bonanza minyak. Akibat krisis teluk tahun 1971 harga minyak dunia meningkat dengan pesat sehingga hasil dari eksportnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan ekonomi baik infrastruktur fisik untuk publik maupun pabrik bahan baku utama yang saat itu diperkirakan diperlukan untuk pembangunan selanjutnya seperti pabrik pestisida, semen, petrokimia dan sebagainya.

Tahap III, masa resesi bagi ekonomi Indonesia tahun 1982-1985 yang ditandai dengan turunnya harga minyak dunia yang berakibat langsung pada defisit neraca pembayaran dan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum.

Tahap IV, tahap diregulasi ekonomi, tahun 1986-sekarang. Serial diregulasi yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan efisiensi industri nasional sekaligus untuk mengubah orientasi pembangunan industri dan perdagangan dari *import substitution* menjadi *export oriented*. Diharapkan lewat kebijakan ini, defisit neraca perdagangan akan dapat dikurangi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus tinggi tanpa harus memperbesar pinjaman luar negeri yang sudah terlalu banyak.<sup>3</sup>

Menurunnya harga minyak dan penerimaan ekspor dari sektor minyak di awal masa diregulasi tahun 1986 telah menyadarkan pemerintah tentang pentingnya mendorong sektor industri bukan minyak. Diregulasi yang dilakukan tersebut sebenarnya mempunyai tujuan ganda selain untuk meningkatkan daya saing nasional juga dalam rangka mempersiapkan AFTA 2003 mendatang. Tetapi yang terjadi justru di tahun 1990-an diregulasi yang dilakukan tersebut mengalami kejenuhan misalnya saja di bidang investasi, diregulasi terhadap investasi asing dengan ditebitkannya PP NO. XX Tahun 1994 tanggal 2 Juni 1994 telah mengakibatkan

<sup>3</sup> Arief Ramelan Karseno, Industrialisasi Globalisasi dan Permasalahan Indonesia, Jurnal Kebangsaan, vol. 1 no. 2, tahun 1997.



perekonomian Indonesia menjadi perekonomian yang paling terbuka di dunia, bagi investasi asing.<sup>6</sup> Diregulasi semacam itu mempunyai manfaat bagi pertumbuhan investasi di Indonesia tetapi juga menjadi ancaman bagi keberadaan investasi menengali kecil domestik karena dalam prakteknya, investasi asing yang diharapkan mampu mendorong ekspor ternyata justru semakin banyak berorientasi pada pasar dalam negeri sehingga mendorong munculnya permasalahan baru.

Sementara itu, perkembangan ekonomi global yang semakin menuju pada keterbukaan sistem pasar, dikhawatirkan banyak orang sebagai ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi nasional. Dunia yang digambarkan dalam model hubungan *transnasional* bukan lagi hubungan *internasional* seperti yang didefinisikan Richard Falk, sebagai perpindahan barang, informasi dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh aktor pemerintah menyebabkan setiap negara mudah disusupi dan terbuka bagi pengaruh dari luar.<sup>7</sup> Adanya berbagai jenis interaksi yang *memby-pass* pemerintah negara-negara dan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah nasional itu, menyebabkan *aktor non negara* menjadi lebih penting daripada apa yang digambarkan oleh model *state-centric*. Aktor-aktor tersebut bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, kelompok-kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan multinasional bahkan bagian dari birokrasi pemerintah. Ciri *transnasional* yang lain adalah isu yang dimunculkan oleh aktor-aktor tersebut yakni *isu ekonomis*. Sehingga hubungan ekonomi internasional menjadi bersifat peka terhadap kondisi ekonomi dalam negeri begitu pula sebaliknya, ekonomi dalam negeri semakin peka terhadap perubahan yang terjadi dalam ekonomi internasional.

Berlakunya sistem nilai tukar mata uang yang fleksibel memungkinkan setiap negara bebas memilih pelaksanaan kebijaksanaan makro ekonomi dan menentukan prioritas ekonominya. Dalam hubungan internasional yang semakin saling tergantung dan saling mempengaruhi, ekonomi internasional dihadapkan pada dilema yang sulit

---

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Richard Falk (1975) dalam Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta 1994, hal. 231.



diselesaikan: walaupun ada keuntungan yang bisa didapat melalui kerjasama internasional, terdapat kemungkinan bahwa negara-negara ingin memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain. Hasilnya adalah kecenderungan munculnya konflik dalam mencapai perbaikan daya kompetisi ekonomi nasional yang kemudian berakibat output growth negara-negara tersebut mengalami penurunan, ini berarti setiap ekonomi mengalami kerugian.

Menurut **Franklin R. Root**, exchange rates behaviour dari sistem di atas yang mulai berlaku pada tahun 1973, dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar dimana situasi ini sangat tidak kondusif terhadap perdagangan bebas.<sup>8</sup> Seperti krisis moneter yang melanda Asia akhir-akhir ini juga akibat dari berfungsinya sistem nilai tukar tersebut. Terjadi kelangkaan supply dolar AS sebagai alat tukar menukar akibat ulah spekulasi yang diperburuk adanya masalah hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo dan berjumlah besar, mengakibatkan nilai dolar AS mengalami peningkatan yang amat tajam. Dalam kondisi seperti itu nilai tukar mata uang negara-negara yang dilanda krisis anjlok terhadap dolar AS, permintaan dolar untuk kebutuhan transaksi bertambah dan adanya ketidakpastian harga komoditi dapat meredam intensitas perdagangan internasional negara-negara tersebut.

Begitu terbatasnya sumber-sumber domestik pendapatan negara maka keuntungan yang diperoleh dari hasil ekspor merupakan sumber dana yang sangat diharapkan dan paling aman bagi pendanaan pembangunan. Di sini adanya kepastian pasar ekspor menjadi penting dalam menentukan jenis produk yang akan diproduksi baik volume maupun harga jual di pasar dalam dan luar negeri. Tetapi berapapun besarnya peningkatan produksi tahunan dunia ketiga, baik produk primer maupun manufaktur, biaya impor barang-barang industri dari negara-negara maju senantiasa masih lebih tinggi, sehingga tidak memungkinkan mereka mempergunakan ekspor sebagai basis akumulasi modal.<sup>9</sup> Apalagi bila terjadi kondisi seperti krisis moneter, walaupun sifatnya sementara tetapi cukup besar pengaruhnya.

---

<sup>8</sup> Sunardi Puwaatrnoko, Dampak Krisis Moneter Terhadap Liberalisasi Perdagangan Sebuah Tinjauan Teoritis, dari artikel yang disampaikan dalam Diskusi Panel HIMAAHI Friendship, HIMAAHI UNIVERSITAS JEMBER, 30 Mei 1998.

<sup>9</sup> Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal.251.



Dampak nyata akibat krisis kini sudah mulai dirasakan sejak pertengahan 1997 terutama oleh negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Setelah berpuluh-puluh tahun berada dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis kini "keajaiban ekonomi dari Asia Tenggara" tersebut seakan hilang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang menurun sejak tahun 1995 dari 8,22%, tahun 1996 tercatat 7,82%, tahun 1997 sebesar 4,91% dan terus merosot menjadi sebesar -13,68% di tahun 1998. Suatu kondisi yang belum pernah terjadi selumnya, dalam duapuluh tahun terakhir.<sup>10</sup>

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tidak dapat dipisahkan dengan semakin meningkatnya peranan industri manufaktur yang saat ini dapat dikatakan telah menjadi primadona perekonomian Indonesia. Sejak berakhirnya masa bonanza migas dan semakin kecilnya peranan sektor pertanian pada Pelita V. Sektor industri telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama industri non-migas. Pada tahun 1998 pertumbuhan sektor industri justru menurun dratis yaitu -12,88% dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,42%. Penurunan sektor ini sebagai akibat berkurangnya produksi sub sektor industri non migas. Akhirnya gelar yang disandang Indonesia sebagai negara yang pertumbuhannya ajaib versi laporan Bank Dunia, hanya bertahan sampai tahun 1997. Digambarkan bahwa kinerja fundamental ekonomi Indonesia bagus tetapi banyak terdapat resiko. Indonesia diperkirakan tahun 2005 pendapatan perkapitanya sebesar US\$ 2300 dan masuk dalam 20 negara berekonomi kuat di dunia.

Tetapi dibalik itu semua, keberhasilan tersebut dicapai dengan hutang dan menjadi bumerang ketika diterpa krisis seluruh bangunan ekonomi kita runtuh, kemiskinan meningkat, perusahaan bangkrut, bertambahnya pengangguran dan beban hutang semakin membelit Indonesia. Praktek salah urus hutang membuat penggunaan hutang salah sasaran dan diselewengkan, akhirnya menjadi beban rakyat. Padahal keuntungan hanya dirasakan oleh beberapa golongan masyarakat saja, ditambah lagi sikap lembaga internasional sebagai donatur justru menambah komitmen pinjaman dan menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>10</sup> Laporan Perekonomian Indonesia 1998, BPS, Jakarta, Maret 1999, hal. 4.



Maka bukan karena alasan puitis bila perdagangan luar negeri memainkan peran penting bagi sebuah perekonomian berkembang, salah satu diantaranya berhubungan langsung dengan *bantuan luar negeri*. Bantuan yang merupakan impor uang sementara adalah utang baru yang harus dibayar kembali secara bertahap atau sekaligus baik pokok maupun bunganya, setiap dolar yang dipinjam menunjukkan dolar tambahan di kolom utang.<sup>11</sup> Perdagangan luar negeri sangat penting bagi penyeimbangan neraca perdagangan perekonomian berkembang. Akumulasi utang modal dengan cara meminjam uang luar negeri menyulitkan perekonomian berkembang untuk mengatasi *defisit perdagangannya*, yakni suatu situasi dimana nilai impor melampaui nilai ekspor. Karena itu strategi pemerintah harus menyertakan pengolahan produk-produk ekspor dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang kompetitif sehingga penjualan produk itu di pasaran dunia setidaknya akan mengimbangi nilai barang yang diimpor.

Berdasar gambaran secara umum di atas, mengingat besarnya peran perdagangan luar negeri bagi sebuah perekonomian untuk bisa berkembang, maka penulis mengambil keputusan untuk memilih judul:

## "KETERGANTUNGAN TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI PADA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA "

### L2 Ruang Lingkup Pembahasan

Sebagai suatu hal penting yang perlu ditetapkan untuk memberi batasan pada pembahasan masalah agar dapat dilakukan analisa secara mendalam dan tidak menyimpang dari pokok persoalan sehingga hasil akhir yang diperoleh merupakan tulisan yang bermutu.

Seperti dalam **Sutrisno Hadi** (1998):

"Sekali suatu pokok persoalan ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyelidik sendiri penegasan ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan, penegasan berfungsi mencegah kerancuan pengertian dan

---

<sup>11</sup> Walter S. Jones, op. cit, hal. 237.



kekaburan wilayah persoalan".<sup>12</sup>

Lingkup bahasan ini dibagi menjadi dua:

### 1.2.1 Batasan waktu

Batasan waktu adalah kurun waktu yang diambil dari suatu kejadian yang menjadi pokok bahasan. Di sini penulis mengambil batas waktu antara tahun 1995-1998 dengan alasan pada tahun-tahun tersebut terjadi perubahan-perubahan dalam perekonomian Indonesia seperti lonjakan PMA (Penanaman Modal Asing) dari 52,19 triliun rupiah pada tahun 1994, di tahun 1995 menjadi 92,03 triliun rupiah merupakan yang paling spektakuler sejak dikeluarkannya UU PMA No. 1 Tahun 1967.<sup>13</sup> Seperti halnya PMA, investasi PMDN juga meningkat dan sektor yang diminati kedua investor tersebut adalah industri yang mempunyai kontribusi sebesar 61,1%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tercatat di tahun 1995 sebesar 8,1%. Tetapi sektor industri manufaktur mengalami penurunan dalam sumbangan terhadap perekonomian sebesar 11,1% (1995).<sup>14</sup>

Dilihat dari resiko usaha, tahun 1996 Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko tinggi dengan predikat "kurang aman" (nilai C) dan predikat tersebut tidak lama kemudian menurun di tahun 1997 menjadi "tidak aman" (nilai D). Pada tahun yang sama juga terjadi penurunan drastis nilai rupiah terhadap dolar AS, nilai rupiah pada tanggal 2 Juni sebesar Rp 2.465.00, melompat ke tingkat Rp 10.550.00 pada Maret 1998, bahkan Mei 1998 sempat mencapai Rp 12.000.00 per dolar AS.<sup>15</sup>

Dalam kurun waktu tersebut beberapa indikator ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup tinggi yang mewarnai proses transformasi ekonomi, dari sektor pertanian ke industri manufaktur yang mana membawa implikasi bagi bidang kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu pada pertengahan tahun 1997 badai krisis moneter yang menerpa negara-negara di Asia cukup menyebabkan collapse-nya industri di Indonesia.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, Metode Research, Ansi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 18.

<sup>13</sup> Iskanda Andi Nuhung, Tinjauan Perekonomian Indonesia, dalam majalah Mimbar Ilmiah Th. VI no. 27, Univ Islam Jakarta, Desember 1997, hal. 16.

<sup>14</sup> HMT. Ompusunggu, Sumber Krisis Moneter Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 145.

<sup>15</sup> A. Irawan JH, Indonesia menyongsong Era Liberalisasi Ekonomi global?, dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Potensia Th.VIII no. 22, Bandung, Juni 1998, hal. 18.



## I.2.2 Batasan Materi

Batasan materi adalah bagian-bagian yang menjadi pusat perhatian analisa yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas sehingga tetap berpegang pada inti persoalan.

Menurut J. David Singer:

“Dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi analisis yang sistematis... harus memilih pusat perhatian, pada bagiannya atau seluruh fenomena itu, pada komponennya atau pada sistemnya...”.<sup>16</sup>

Batasan materi, penulis memusatkan pada keadaan yang terjadi pada sektor industri pengolahan di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan yang semakin melemah. Walaupun total ekspor kita meningkat yaitu dari US\$ 22.68 miliar pada tahun 1990 menjadi US\$ 45.42 miliar pada tahun 1995, neraca perdagangan Indonesia sejak tahun tersebut menurun. Hal ini disebabkan tingginya impor bahan baku dan penolong, barang modal dan konsumsi yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. Kemudian masalah bantuan luar negeri khususnya hutang yang dipinjamkan luar negeri kepada Indonesia yang menyebabkan *debt crisis*, suatu kondisi dimana jumlah penerimaan ekspor lebih kecil daripada jumlah pembayaran cicilan dan bunga pinjaman. Dan di saat nilai rupiah melemah banyak industri yang kewalahan untuk menjaga agar tetap survive yang akhirnya tidak mampu lagi memenuhi kewajiban membayar hutang.

## L3 Permasalahan

Apabila permasalahan telah dirumuskan, akan mudah bagi langkah

Permasalahan adalah merupakan persoalan yang harus dipecahkan untuk mendapatkan jalan keluar. Secara umum masalah didefinisikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Seperti yang dikemukakan Winarno Surakhmad, bahwa: “masalah adalah setiap

<sup>15</sup> A. Irawan JH, Indonesia menyongsong Era Liberalisasi Ekonomi global?, dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Potensia Th.VIII no. 22, Bandung, Juni 1998, hal. 18.

<sup>16</sup> J.David Singer, dalam Mohtar Mas'ood, op.cit, hal. 36.



kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya".<sup>17</sup> Dikatakan sebagai masalah jika dia merupakan suatu rintangan. Jadi sesuatu disebut masalah atau dapat dimasalahkan dalam penyelidikan bila mengandung unsur-unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya, perlu tampak penting dan ada gunanya serta realistis.<sup>18</sup>

penelitian selanjutnya agar pembahasannya lebih terarah. S. Nasution dan M. Thomas (1995) menyatakan: "Masalah yang dibatasi dengan tajam dan jelas merupakan syarat mutlak agar kita memiliki metode yang tepat, mengumpulkan data yang relevan, memilih teori yang serasi dan mengambil kesimpulan dan saran".<sup>19</sup> Karena itu mutu penelitian banyak bergantung pada ketajaman rumusan masalah. Dengan kata lain bahwa masalah adalah inti atau jantung penelitian.

Dari pengertian diatas maka dalam melihat persoalan yang dihadapi Indonesia, yang dalam jangka pendek penanaman modal dan bantuan asing biasanya mendorong pertumbuhan tetapi dalam jangka panjang pengiriman kembali keuntungan ke negara asal PMN (Perusahaan Multi Nasional) si penanam modal asing dan efek dari utang pemerintah yang besar dapat secara drastis, menurunkan tingkat pertumbuhan karena harus banyak menggunakan devisa hanya untuk membayar bunga. Sedangkan perdagangan luar negeri sebagai suatu hal yang penting, masih tergantung kepada beberapa produk saja. Atau masih lemahnya hasil dari ekspor untuk dijadikan sebagai basis akumulasi modal pembangunan.

Berdasar pengalaman negara berkembang, khususnya di Amerika Latin, dikembangkan padangan bahwa satu-satunya jalan bagi negara berkembang untuk dapat mencapai laju pertumbuhan yang tinggi ialah harus melalui industrialiasi. Pengalaman negara berkembang lain ialah bahwa negara yang telah memiliki sektor ndustri manufaktur yang relatif kuat dan cepat pertumbuhannya lebih mampu menghadapi berbagai masalah ekonomi, khususnya menghadapi gelombang pertumbuhan tenaga kerja (Ian Little, 1970). Industri bukan tujuan akhir melainkan salah satu jalan yang harus dilalui oleh hampir semua negara guna mencapai

---

<sup>17</sup>Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, CV. Tarsito Bandung,, 1994, hal. 30.

<sup>18</sup> ibid, hal. 34.

<sup>19</sup>S. Nasution, MA dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Disertasi Makalah, Eurni Aksara, Jakarta, 1995, hal. 82.



pendapatan perkapita yang tinggi (Riedel, 1992). Hal-hal tersebut yang menjadi titik tolak pemikiram Indonesia untuk memasuki era industrialisasi.<sup>20</sup>

Sedangkan proses industrialisasi sebenarnya bukan sekedar pergeseran pusat kekuatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Proses ini juga mencakup pergeseran struktur industri dari waktu ke waktu, sehubungan dengan dimilikinya keunggulan komparatif akibat pergeseran dari kegiatan produksi yang padat karya dan berteknologi rendah ke arah kegiatan yang padat modal dan berteknologi tinggi (Riedel, 1992), artinya suatu negara melakukan ekspansi awal dari industri padat modal disertai dengan reorientasi kearah sektor ekonomi padat karya. Kemudian setelah tingkat upah riil meningkat, baru bergerak maju secara alamiah ke arah kegiatan manufaktur yang padat modal dan berteknologi tinggi.<sup>21</sup>

Beranjak dari kondisi tersebut, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

“Mengapa sektor industri di Indonesia masih banyak tergantung pada bantuan luar negeri sehingga mudah collapse disaat krisis ?”

#### L4 Kerangka Dasar Teori

Teori membantu kita menjelaskan suatu fenomena dalam proses eksplanasi teori membantu kita mengorganisasikan dan menata fakta yang kita teliti. Seperti yang didefinisikan oleh **Mc. Cain** dan **Segal** sebagai berikut:

“Serangkaian statement yang saling berkaitan yang terdiri dari, kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dari teori itu; kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; dan kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesis)“.<sup>22</sup>

Menurut **Mohtar Mas'ood** teori ketika menjelaskan suatu fenomena, memerlukan pembuktian secara sistematis sehingga teori yang baik adalah teori yang bisa

<sup>20</sup> HG Suseno, *Ekonomi Indonesia Fakta Dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 61.

<sup>21</sup> *ibid*, hal. 63.

<sup>22</sup> Garvin Mc. Cain dan Erwin Segal (1973) dalam *Mohtar Mas'ood*, *op.cit*, hal. 187.



didukung atau ditolak melalui analisa yang jelas dan penggunaan data yang sistemik serta memuat konsep-konsep yang jelas.<sup>23</sup>

Teori tidak perlu berbelit-belit, teori yang baik menurut Winarno Surahknad adalah dapat hanya memiliki sebuah ide sentral yang tertentu, sederhana dan mudah untuk dipahami.<sup>24</sup>

Teori yang dirasa penulis cukup relevan untuk membahas permasalahan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri adalah *Teori Dependencia (ketergantungan)*. Teori yang sudah berkembang di tempat asalnya di Amerika Latin awal tahun 1950-an. Sebagaimana dalam Mohtar Mas'oed (1994) teori ini menjelaskan kemunduran negara-negara bekas jajahan di Dunia Ketiga dengan melihatnya dalam konteks global, memandang persoalannya dari perspektif negara terjajah. Sedangkan inti dari teori ini adalah *penetrasi asing* dan *ketergantungan eksternal* menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi "pinggiran" (peripheri) yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang gawat dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat di masyarakat yang tergantung itu.<sup>25</sup>

Penetrasi yang mendalam oleh dan sangat tergantung pada negara industri maju menjadi wajah negara Dunia Ketiga. Sebagaimana dijelaskan oleh Raymond Duvall (1981) penetrasi tersebut, menyebabkan distorsi yang berurutan dan selanjutnya ada kecenderungan konflik sosio-politik mudah muncul dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penetrasi tersebut melalui berbagai cara, ekonomi, politik, kultural dan berbagai periode perkembangan suatu negara. Khusus di bidang ekonomi, penetrasi bisa melalui cara *finansial* maupun *teknologi*. Dalam tahap perkembangan ekonomi awal, cara yang paling sering dilakukan adalah dengan jalan penanaman modal langsung, dimana PMN memperluas cabang-cabangnya yang bergerak di berbagai sektor perekonomian seperti, pertambangan, pertanian, pabrik mesin dan perdagangan. Perluasan tersebut menggunakan teknologi yang dipakai di negara industri (negara asal), walaupun tidak digunakan segera, teknologi tersebut

---

<sup>23</sup> Mohtar Mas'oed, loc.cit

<sup>24</sup> Winarno Surahknad, op.cit, hal. 30.

<sup>25</sup> Mohtar Mas'oed, op.cit, hal. 204.

<sup>26</sup> Raymond Duvall (1981), ibid, hal. 206.



akan datang kemudian dalam bentuk suatu *product cycle*, yaitu dalam suatu siklus, proses-proses produksi yang sebelumnya digunakan di negara maju dipindah ke wilayah peripheri yang mempunyai buruh lebih murah, karena di dunia maju telah ditemukan teknologi baru. Pabrik-pabrik lokal yang dibangun PMN menggunakan proses produksi yang dikembangkan di negara pusat dan karena itu menggunakan hak paten, lisensi, hak cipta dan cap dagang asing. Akhirnya walaupun industri cabang tersebut dimiliki dan dijalankan oleh orang lokal, mereka harus tetap mengimpor teknologi dari luar. Juga, mereka para pemberi bantuan ekonomi sering mengharuskan negara penerima untuk membeli barang dan jasa dari negara donor tersebut. Dengan semua sarana itu, nilai-nilai negara pinggiran mengenai konsumsi dan produksi menjadi sangat ditentukan oleh penetrasi dari negara pusat.

Adanya proses penetrasi yang sudah berlangsung sejak lama tersebut menimbulkan suatu pola kegiatan ekonomi yang bercirikan membesarnya porsi perdagangan luar negeri dan berkembangnya daerah kantong (*enclave*) ekonomi di negara-negara pinggiran terutama yang memproduksi barang ekspor sehingga yang terjadi adalah *distorsi perdagangan*. Perdagangan tersebut biasanya hanya tergantung pada beberapa produk saja dan walaupun sudah ada pasar dunia, kegiatan perdagangan mereka masih terbatas karena dalam pasar tersebut terjadi pembagian-pembagian yang didasarkan pada pengalaman hubungan sebelumnya, kebiasaan, kebutuhan khusus atau karena perjanjian yang menyebabkan adanya perlakuan berbeda pada setiap rekanan dagang.

Perdagangan internasional yang meluaskan peran dunia membawa manfaat terutama bagi industri yang sudah mantap karena menambah keunggulan dalam persaingan. Dengan kata lain negara-negara maju yang akan mendapat manfaat yang paling besar dalam pertumbuhan perdagangan internasional. Sehingga yang terjadi adalah seperti yang dikatakan Myrdal(1968), adanya ketimpangan produktivitas di negara berkembang dan tingkat produktivitas di negara maju yang sudah mempunyai dasar industri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sumitro D, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1994, hal.115.



Pola-pola penetrasi, ketergantungan dan perdagangan sangat mempengaruhi berbagai kondisi ekonomi negara pinggiran yang menunjang dan ditunjang pertumbuhan ekonomi yang mengandung *distorsi struktur internal*. *Pertama*, perkembangan ekonomi yang timpang dimana sektor enclave ekspor berkembang jauh lebih pesat dibanding sektor lain. *Kedua*, ekonomi itu terpecah belah antar sektor tidak ada kaitan yang jelas. *Ketiga*, dalam ekonomi itu berkembang pola ganjaran yang berbeda di tiap sektor, terutama perbedaan yang mencolok dari upah untuk mereka yang bekerja di sektor pabrik atau pertambangan, dengan sektor pertanian.

Teori Dependencia menginterpretasikan fenomena pembangunan yang mengalami distorsi itu secara khas. *Pertama*, mereka membandingkan pola perkembangan ini dengan suatu model ekonomi yang tumbuh lambat tetapi merata, berimbang, terintegrasi dan homogen. *Kedua*, bahwa distorsi tersebut akibat dari pola ketergantungan dan penetrasi yang digambarkan di atas. *Ketiga*, teori ini mengikatkan penetrasi dan distorsi ekonomi dengan distorsi lain dalam sistem sosial dan politik negara pinggiran. Akibat dari penetrasi asing itu pertumbuhan ekonomi tidak bisa mendorong pertumbuhan demokrasi liberal, tetapi malah merangsang timbulnya kediktatoran. Menurutnya, birokrasi negara membentuk aliansi segitiga dengan PMN maupun penguasaan dalam negeri dan untuk melindungi aliansi tersebut diterapkan represi politik. Konsekuensi dari kehidupan ekonomi dan politik seperti itu di negara pinggiran kaitannya dengan ekonomi politik dunia adalah disahkannya kekerasan baik secara langsung maupun meluasnya "kekerasan struktural", yaitu ketimpangan dan kemiskinan.<sup>28</sup>

Kalau pemerintah secara langsung didominasi Penanaman Modal Asing maupun domestik, pemerintah tersebut akan memprioritaskan kebijakan yang mendukung kepentingan mereka yaitu stabilitas biaya dengan menekan upah buruh dan meningkatkan keuntungan yang hal itu cenderung menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat (distorsi sos-pol). Dari teori tersebut selanjutnya juga dijelaskan bahwa ketimpangan dalam distorsi pendapatan nasional mendorong timbulnya konflik, beberapa kelompok/kelas memandang kelompok atau kelas yang lain

<sup>28</sup> *ibid*, hal. 209



memperoleh bagian yang semakin besar sedang mereka memperoleh sedikit bahkan merosot. Dan konflik semacam itu menjadi semakin gawat dalam kondisi ekonomi yang mengalami kemerosotan.

Kemudian menurut para teoritis konvensional bahwa perekonomian akan mencapai tingkat "lepas landas" menuju pertumbuhan mandiri bila terdapat akumulasi modal yang cepat. Tetapi kebanyakan negara berkembang hanya dapat mencapai tingkat taungan dan nvestasi yang rendah karena kemiskinan itu sendiri dan adanya berbagai bentuk pemborosan dan inefisiensi. Bahkan ketika surplus tercipta, surplus itu cenderung dihabiskan dalam bentuk-bentuk konsumsi yang tidak perlu daripada dalam bentuk investasi untuk pertumbuhan. Antara lain pemborosan yang menghambat perkembangan adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, ledakan urbanisasi, pengeluaran militer yang berlebihan, konsumsi barang-barang mewah yang tidak perlu, korupsi pejabat dan inefisiensi management.<sup>29</sup>

Mengenai bantuan asing ada beberapa perspektif yang memandang pesimis antara lain, Peter T. Baure dan Basil S. Yemey berpendapat bahwa bantuan asing mendukung dan mempolitisi pemerintah di sebuah negara berkembang, dengan memberikan kekuasaan kepada para pemimpin yang korup yang lebih memikirkan kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya sendiri daripada kepentingan rakyat termiskin di negaranya. Menurut perspektif ini, bantuan menurunkan daya saing internasional negara berkembang dengan membiarkan pemerintah menyembunyikan aspek terburuk yang terdapat dalam kebijakan ekoomi mereka seperti menciptakan atau menjaga tingkat nilai tukar yang terlalu tinggi atau meninggalkan suplai uang domestik yang pada gilirannya sering mengakibatkan inflasi, kurangnya kepercayaan dan modal mengalir ke luar negeri. Menurut dua ekonom tersebut juga dikatakan bahwa kosep Dunia Ketiga dan kebijakan bantuan resmi tidak dapat dipisahkan. Tanpa bantuan asing tidak ada Dunia Ketiga. Dengan kata lain bantuan asing itu merupakan candu yang merusak daya saing ekonomi suatu negara serta

---

<sup>29</sup> Walter S. Jones, *op. cit.*, hal. 220.



menjadikannya tergantung pada utara yang memberi bantuan selama candu tersebut dikonsumsi.<sup>30</sup>

Suatu negara dapat tinggal landas jika tidak lagi tergantung kepada utang luar negeri dalam anggaran belanja negara, investasi dan pengembangan ekonomi masyarakatnya secara keseluruhan<sup>31</sup>. Dari pendapatnya diatas, Rostow memandang serius terhadap utang luar negeri sebagai kendala bagi negara berkembang untuk menuju tahap tinggal landas. Indikator perkembangan GNP, prosentase investasi terhadap GDP adanya leading sector tidak sepenuhnya dapat mengantar negara sedang berkembang untuk melewati tahap lepas landas jika tidak dapat membebaskan diri dari utang luar negeri dan dalam dekade terakhir ini banyak negara sedang berkembang yang diperkirakan akan masuk tahap lepas landas justru semakin tergantung dan terjerat utang luar negeri.

Dari teori tersebut dapat menjelaskan timbulnya kemiskinan, ketimpangan, konflik dan repressi politik di negara dunia ketiga dengan mengaitkan dengan variabel eksternal yaitu peneirasi asing. Sehingga bisa memberikan kerangka bagi penjelasan permasalahan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya. Melihat perkembangan hutang luar negeri kita yang sudah demikian pesat, meskipun pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi selama tiga dekade terakhir dianggap bermanfaat, semakin lama perkembangan ekonomi menjadi semakin tergantung. Hal ini yang kemudian banyak dipertanyakan karena kita justru menghadapi banyak kesulitan pada saat jatuh tempo pengembaliannya. Hasil-hasil negatif dari eksperimentasi hutang luar negeri, yang disebut sebagai bantuan luar negeri menunjukkan ada yang salah kaprah dalam mekanismenya. Kini masalah hutang luar negeri tidak lagi dilihat sebagai stimulator bagi proses pembangunan negara penerima tetapi lebih merupakan soal mekanisme bisnis biasa dimana pengutang selalu harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi hutangnya meskipun kondisi internalnya sudah tidak memungkinkan. Ditambah lagi mekanisme dan program hutang luar negeri juga bisa menjadi media kolusi dan peluang korupsi bagi pihak khususnya jika sistem politik dan ekonomi di negara penerima tidak transparan.

<sup>30</sup> Robert A. Isaak, *Ekonomi Politik Internasional*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal. 280.

<sup>31</sup> WW. Rostow dalam Didik J. Rahcbini, *Rcsiko Pembangunan Yang Dibimbing Utang*, PT. Grasindo, Jakarta, 1995, hal. 100.



Dengan melihat adanya hutang tersebut menunjukkan adanya penetrasi yang sedang berlangsung di Indonesia, otomatis adanya beberapa gambaran yang digambarkan teoritis di atas juga tidak bisa dihindari.

### **L5 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara yang harus diuji kebenarannya karena masih berupa dugaan yang mungkin benar mungkin salah.

**Sutrisno Hadi** mendefinisikan:

“Hipotesis dipandang sebagai suatu konklusi yang sifatnya sangat sementara atau dugaan yang mungkin benar mungkin salah, dia akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta membenarkan. Penolakan atau penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta yang dikumpulkan.”<sup>32</sup>

Hipotesis yang baik adalah secara logik tumbuh dari atau ada hubungannya dengan laporan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari dan hendaknya jelas, sederhana, terbatas serta dapat diuji.

Dari permasalahan dan berpegang pada landasan teori di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Ketergantungan tersebut terjadi karena pada sektor industri di Indonesia masih kekurangan modal baik berupa dana, teknologi dan sumber daya manusia. Pada hal untuk bisa bersaing dengan hasil industri di pasar internasional, harus mengikuti perkembangan industri yang sedang terjadi.”

### **L6 Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian harus diuraikan sejelas-jelasnya sehingga pembaca memahami sepenuhnya setiap langkah dan dapat mengulangi sendiri penelitian itu jika diperlukan.<sup>33</sup> **Sutrisno Hadi** mengatakan, research dapat dipandang sebagai “The repeated search to the unknown.”<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, op.cit, hal. 63.

<sup>33</sup> S. Nasution, dan M. Thomas, op.cit, hal. 103.



### I.6.1 Metode Pengumpulan Data

Suatu tahapan dimana penulis melakukan penelitian terhadap sumber dan data yang dianggap relevan untuk menyelesaikan permasalahan. Pengujian hipotesa dalam studi ini dilakukan dengan *metode non-reaktif* yakni observasi yang tidak memerlukan reaksi dari objek penelitian. Salah satunya adalah penelaahan secara sistematis atas dokumen, catatan sejarah, berita koran dan segala informasi yang tercatat.<sup>35</sup> Sehingga data yang diperoleh bersifat *data sekunder* yakni kumpulan laporan dari pihak lain yang sebelumnya berasal dari sumber yang asli. Pengambilan data dilakukan penulis dari:

1. Perpustakaan Central for Strategic and International Studies, Jakarta
2. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
3. Pusat Informasi Kompas, Jakarta
4. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
5. Perpustakaan FISIP, Universitas Jember

Penulis juga mengambil dari sumber-sumber data yang lain untuk memperoleh tambahan wawasan yang dapat membantu penyelesaian masalah.

### I.6.2 Metode Analisis Data

ialah uraian tentang cara mengkaji data dan mengolah data awal sehingga menjadi data atau informasi dan tentang cara analisisnya.<sup>36</sup> Dalam penulisan ini digunakan *metode deduktif* yang menurut **Mohtar Mas'ood** adalah:

“Menarik prinsip-prinsip umum dengan menghasilkan prinsip yang lebih rendah sehingga sesudahnya kita bisa menguji masing-masing preposisi dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus itu bisa dijelaskan dan diramalkan dengan teori yang telah ditetapkan.”<sup>37</sup> Sesuai dengan metode tersebut yang digunakan untuk mempermudah, penulis berusaha menggunakan teori “*Dependencia*” sebagai alat analisis permasalahan di atas.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, op.cit, hal. 7.

<sup>35</sup> Mohtar Mas'ood, op.cit, hal. 180.

<sup>36</sup> Badan Penerbit UNEJ, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember, hal. 18.

<sup>37</sup> Mohtar Mas'ood, op. Cit, hal. 80.



## L7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan untuk mempermudah dalam mengolah data sehingga didapat yang benar-benar relevan seperti yang disampaikan Miriam Budiardjo: "Pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah yang menentukan data mana saja yang akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan."<sup>38</sup> Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial apa yang disebut "kepastian" hampir tidak pernah dicapai melainkan hanya didekati. Gejala sosial, betapapun kita menyebutnya sejenis sangat jarang menunjukkan titik-titik persamaan dalam keseluruhannya.<sup>39</sup>

Pendekatan *Ekonomi-Politik* yang digunakan dalam tulisan dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang bersifat ekonomi dan politik dalam permasalahan di atas. Banyak para ahli berpendapat bahwa dengan pendekatan tersebut dapat digunakan dalam memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan. Pendekatan ekonomi-politik merupakan sintesa yang memadukan ilmu politik dan ilmu ekonomi ke dalam suatu kerangka analisa yang lebih menyeluruh. Ini merupakan usaha untuk memadukan antara rasionalisme ekonomi.<sup>40</sup> Dan penelaahan suatu peristiwa ekonomi akan lebih berhasil jika dikaitkan dengan masalah politik karena kedua hal itu saling terkait. Suatu kebijakan ekonomi pengambilannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh elit politik yang berkuasa saat itu.

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik, Jurnal Ilmu Politik, AIP, Jakarta, 1986, hal. 4.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, op.cit, hal. 2.

<sup>40</sup> Yuwono Sudarsono 1981 dalam majalah PRIMA edisi XVIII th. 1996.



## BAB II INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

Industri dapat diartikan dua hal, *pertama*, merupakan himpunan beberapa perusahaan sejenis, industri tekstil berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk tekstil. *Kedua*, bahwa industri merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Pengolahan tersebut bisa bersifat manual, elektrikal bahkan manual.<sup>1</sup> Uraian selanjutnya lebih mengacu pada arti yang kedua.

Sektor industri dianggap sebagai pendorong sektor lain dalam sebuah perekonomian untuk berkembang. Dengan alasan produk-produk industrial mempunyai nilai tukar tinggi dan menciptakan nilai tambah lebih besar dibanding produk dari sektor lain. Sektor ini mempunyai variasi produk beragam yang mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Proses produksi maupun penanganan produknya bisa dikendalikan manusia, tidak banyak bergantung pada kondisi alam seperti cuaca, musim dan lain-lain. Maka para pelaku bisnis seperti produsen, penyalur, pedagang dan investor lebih suka berkecimpung dalam sektor ini.

Bercermin pada beberapa kelebihan yang ada dan hasil yang telah dicapai negara-negara maju adalah yang dilakukan oleh kebanyakan negara berkembang dalam menentukan pola pembangunannya. Kadar keindustrian perekonomian dianggap sebagai sumber kekayaan, kekuatan dan keadaan seimbang negara-negara maju. Adanya anggapan tersebut, membuat mereka berusaha mengembangkan sektor industri dan industrialisasi yang diyakini sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi negara berkembang. Kebijakan yang diambil tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi yang dimiliki seperti ketersediaan bahan baku, teknologi, kemampuan tenaga kerja dan modal. Masih kurang adanya kesadaran bahwa usaha memajukan dan memperluas sektor industri

---

<sup>1</sup> Durnairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997, hal. 227.



haruslah sejajar dengan pembangunan dan pengembangan sektor lain, terutama sektor pertanian. Karena kedua sektor ini saling terkait, sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan sektor industri sebagai penyedia masukan maupun pasar bagi produknya dan peningkatan daya beli merupakan rangsangan bagi pembangunan sektor industri.

## 2.1 Sejarah Industrialisasi Di Indonesia

Jauh sebelum Belanda menguasai kepulauan Nusantara, di abad pertengahan usaha kerajinan tangan tumbuh berkembang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan perlengkapan upacara adat maupun keagamaan. Disamping itu pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan, menyebabkan kegiatan pemintalan dan pertenunan berkembang lebih awal dari pada usaha lain. Pada waktu itu masih menggunakan bahan baku dari serat tanaman, kulit kayu dan lain-lain. Baru sekitar abad 7 diperkenalkan oleh para pedagang Cina kapas yang didatangkan dari Vietnam. Sedangkan kain dari serat sutera baru dikenal pada abad 16 bersamaan dengan mulai berkembangnya kerajinan dari logam, kayu, tembikar dan lain sebagainya.

Perkembangan industri pengolahan di Indonesia dilihat dari sudut kebijakan pemerintah, dapat dibagi menjadi empat penggolongan waktu:

1. dimulai sejak Tanam Paksa sampai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia (1830-1942)
2. sejak pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia sampai akhir Perang Dunia II (1942-1945)
3. sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai akhir pemerintahan Orde Lama (1945-1965)
4. sejak periode transisi (peralihan) dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru sampai tahun terakhir PJP I (1966-1994).<sup>2</sup>

Pada masa periode yang pertama (1830-1942) lahir industri modern yang disebut industri barat. Periode ini dianggap sebagai tonggak awal dimulainya

<sup>2</sup> HG. Suseno Wiododo, *Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal.461.



kegiatan industri besar-besaran di Indonesia. Pasang surut yang terjadi saat itu banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Belanda seperti,

1. Indonesia menjadi bahan baku untuk industri negeri Belanda
2. Pembangunan industri modern dibatasi hanya untuk mereka yang mengolah hasil perkebunan seperti gula, kina, remiling karet, minyak kelapa sawit dan kebutuhan pokok masyarakat yang tidak menyaingi barang impor dari Belanda
3. Indonesia dijadikan sebagai pasar untuk barang hasil industri negara-negara
4. Membendung penanaman modal asing dengan peraturan BRO.

Sejak periode Tanam Paksa sampai awal Perang Dunia I (1914) hampir semua usaha industri yang dibangun di Indonesia merupakan mata rantai kegiatan industri pengolahan hasil pertanian. Lahir juga usaha perbengkelan dan permesinan untuk merawat pabrik. Namun kehadiran industri pada masa itu kurang dapat dirasakan masyarakat karena hanya melibatkan mereka yang ada di sekitar areal perkebunan.

Ada empat peristiwa yang menyebabkan pemerintahan Belanda berusaha meningkatkan industrialisasi di Indonesia, yaitu:

1. Akhir abad 19, pemerintah Hindia Belanda mendapat kecaman-kecaman karena melaksanakan Tanam Paksa yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan pada masyarakat pribumi. Pada tahun 1891, terjadi penurunan ekspor pertanian sekitar 50% menyebabkan aktivitas pertanian dan perkebunan distop. Untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat akhirnya pada tahun 1902 pemerintah Belanda membentuk Panitia Peneliti Kemrosotan Kesejahteraan Masyarakat yang menyarankan agar pribumi diberi kesempatan mengusahakan industri kecil seperti tenun, pertukangan dan lain sebagainya.
2. Perang Dunia I (1914-1918) yang melanda seluruh Eropa mengakibatkan hubungan dagang antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda (Indonesia) terputus. Agar perekonomian tidak mandek, pemerintah menganjurkan kepada para pengusaha Belanda untuk membangun industri pengganti barang impor seperti cat, tinta, sabun dan lain-lain. Setelah perang berakhir industri tersebut tidak dilanjutkan lagi karena tidak mampu bersaing dengan barang impor yang mulai masuk. Industri yang berkembang pada tahun 1920-an masih belum



terkoordinasi dengan baik. Perusahaan modern, dimiliki orang asing itupun baru dua buah yaitu pabrik rokok "British American Tobacco" dan perakitan kendaraan bermotor "General Motor Car Assembly".

3. Depresi ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1930-an mengakibatkan runtuhnya sektor perekonomian seperti penurunan penerimaan ekspor dari 1.448 juta Gulden (1929) menjadi 505 juta Gulden (1935). Negara-negara seperti Cina, Amerika, Inggris juga berusaha meningkatkan ekspor dan penanaman modalnya di Hindia Belanda. Sensus industri kolonial yang pertama (1939) mencatat investasi total pada tahun 1937 sebesar US\$ 2.264 juta, lebih dari setengahnya dimiliki oleh swasta. Dari jumlah tersebut Belanda mempunyai andil terbesar 36%, kemudian Inggris 14%, Cina 11% dan Amerika 7%.<sup>3</sup> Untuk melindungi kepentingan industri Belanda, pemerintah memberlakukan peraturan lisensi dan kuota terhadap barang impor, tetapi akibatnya barang dari negeri Belanda tidak dapat masuk lagi seperti sedia kala. Usaha mempertahankan pasar yang telah dikuasai, pemerintah menganjurkan kepada pengusaha Belanda untuk membangun industrinya di Hindia Belanda. Sehingga lahirlah industri-industri baru salah satunya pabrik ban "N.V. Good Year". Akhir dasawarsa 1930-an industri manufaktur masih banyak yang dihasilkan di Jawa, hal ini terlihat dari kenaikan penjualan produk ke daerah di luar Jawa sebesar 34 juta Gulden (1935) menjadi 96 juta Gulden pada tahun 1941.<sup>4</sup>
4. Menjelang Perang Dunia II, setelah Jerman menduduki Belanda 1940, semua impor dari negara tersebut berhenti. Maka pemerintah Hindia Belanda berjaga-jaga menyusun penyelamatan industri sekaligus membangun industri untuk mengganti barang-barang impor sehingga bila perang berlangsung, Hindia Belanda dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari luar. Dibangun industri seperti pabrik soda di Madura, semen di Gresik, aspal dan lain-lain. Tetapi rencana itu belum sepenuhnya terwujud karena pada tahun 1942 Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya dan menduduki Indonesia.

<sup>3</sup> Dumairy, op. cit, hal. 231.

<sup>4</sup> Thee Kian Wie Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian, LP3ES, Jakarta, 1996, hal. 15.



Pada periode pertama tersebut ada hal penting yang dihasilkan yaitu diterbitkannya UU Keselamatan Kerja (1836) yang kemudian diperbaharui lagi tahun 1852 disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat itu.

Periode *kedua* (1942-1945), masa pendudukan Jepang walaupun sangat singkat tetap berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Disiplin keras, kecepatan kerja dan ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan Jepang mengubah kebiasaan "biar lambat asal selamat". Kebijakan industri yang dianut Jepang diarahkan untuk kebutuhan perang sehingga tiap daerah harus bisa mencukupi kebutuhan sendiri dengan cara membangun industri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Kegiatan baru ini telah melahirkan sejumlah industri kecil dan rumah tangga diseluruh pelosok tanah air walaupun mutu masih rendah tetapi melahirkan wiraswasta-wiraswasta baru.

Periode *tiga* (1945-1965), dua puluh tahun Indonesia merdeka, merupakan periode yang sangat penting karena pada masa itu dimulai industri yang dibangun oleh bangsa sendiri. Kurun waktu 1950-1965 merupakan tahun menjebol dan membangun. Pada waktu itu Indonesia mulai membangun industri dengan coba-coba, banyak mengalami gangguan karena pergantian kabinet dimana dalam waktu sepuluh tahun, kabinet berganti sepuluh kali selain itu juga timbul beberapa pemberontakan sehingga negara disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan. Pada masa Orde Lama pembangunan proyek industri dilakukan oleh beberapa departemen, misalnya industri perkapalan juga dikelola di bawah Departemen Maritim, industri pesawat terbang di bawah Departemen Penerbangan dan lain-lain. Setelah Kabinet Seratus Menteri dibubarkan, oleh Kabinet Pembangunan I dilakukan pengaturan di beberapa departemen tersebut, industri dikelola oleh satu departemen yaitu Departemen Perindustrian. Industrialisasi yang dimulai sejak tahun 1950 memprioritaskan pada industri kecil dengan cara membangun : industri perusahaan, industri pelopor, mekanisme industri kecil dan balai penelitian. Tetapi kesulitan masih saja ada selain kurangnya pengalaman, juga terbatasnya tenaga ahli serta peralatan modern yang ada.

Pada tahun 1951 dibentuk panitia Industrialisasi yang ditugaskan untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang industrialisasi di Indonesia.



Dalam laporannya, badan tersebut berpendapat, keadaan ekonomi Indonesia waktu itu (substitusi impor) memaksa pemerintah yang memimpin perkembangan ekonomi dengan memperhatikan pula inisiatif swasta. "Pemerintah berperan sebagai agen of devisa". Tujuan industrialisasi waktu itu adalah: untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang, menampung tenaga kerja akibat pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan dasar industri adalah industri kecil dan industri sedang.<sup>5</sup>

Kemudian di tahun 1950-an juga dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang merupakan pelopor Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Hasil dari badan tersebut adalah Rencana Pembangunan Semesta 8 tahun yang dimulai pada tahun 1961 dan berakhir tahun 1969. Namun hasil-hasil tersebut selanjutnya masih belum memadai karena perkembangan politik yang belum stabil.

Periode keempat tahun 1960-an sektor industri belum cukup berkembang, hanya berperan sekitar 10 % dari PDB.<sup>6</sup> Di samping terhambat oleh keterbatasan di atas, faktor stabilitas politik juga menjadi pertimbangan investor yang ingin menanamkan modalnya. Industri yang ada pada saat itu masih didominasi oleh industri barat seperti pabrik baja di Cilegon dan super fosfat di Cilacap. Keadaan ini menjadi warisan bagi Orde Baru yang kemudian mengubah kebijakan ekonomi yang sudah ada tersebut dengan mengundang investor asing. Munculnya undang-undang tentang penanaman modal bagi investor asing (1967) dan domestik (1968) cukup memberi angin segar, sehingga bermunculan industri baru terutama jenis substitusi impor dan mulai tahun 1978 peran sektor industri kembali menembus angka 10% dan kian meningkat sepanjang PJP I.

## 2.2 Argumentasi Dan Strategi Industrialisasi

### 2.2.1 Argumentasi Industrialisasi

Ada empat argumentasi yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi yang akan mempengaruhi pola pembangunannya yakni, argumen kenggulan komparatif,

<sup>5</sup> Benyamin A. Suriadjaya, Sektor Swasta Dan Industrialisasi dalam Industrialisasi Dalam Ikatan Pembangunan Nasional, Yayasan Proklamasi, CSIS, Jakarta, 1982, hal.236.

<sup>6</sup> Dumairy, op. cit, hal. 231.



keterkaitan industrial, penciptaan lapangan kerja dan loncatan teknologi.<sup>7</sup> Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.

Argumen *keunggulan komparatif* akan mengembangkan subsektor yang memiliki keunggulan komparatif baginya, sehingga sumber daya ekonomi akan teralokasi pada penggunaan-penggunaan yang paling menguntungkan. Kelemahannya, karena lebih mempertimbangkan efisiensi alokasi sumber daya, selera konsumen kurang diperhatikan. Jadi walaupun efisien untuk diproduksi, dalam pemasaran akan menemui kesulitan. Argumen ini menjadi bersifat statis karena tidak mampu menyesuaikan dengan dinamika konsumsi.

Basis teori yang kedua, *keterkaitan industrial* mengutamakan pengembangan bidang-bidang yang industri yang paling luas mengait perkembangan sektor ekonomi lain. Dari keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang, sektor industri diharapkan bisa menjadi motor penggerak sektor lain. Efisiensi kurang menjadi bahan pertimbangan, ada kalanya industri yang dikembangkan tersebut memerlukan modal besar, menyerap devisa atau tidak memiliki keunggulan komparatif.

Mereka yang menganut argumen *penciptaan lapangan kerja*, dapat mengurangi persoalan sosial seperti pengangguran, karena industri yang dikembangkan adalah yang menyerap tenaga kerja paling banyak, industri padat karya dan industri kecil. Namun disisi lain ada kemungkinan industri tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan sektor lain, sehingga peran sebagai sektor pemimpin tidak bisa dilaksanakan.

Industrialisasi yang dilandasi argumen *loncatan teknologi*, berkeyakinan bahwa industri yang menggunakan teknologi tinggi akan memberikan nilai tambah yang sangat besar, diiringi dengan kemajuan teknologi bagi industri-industri dan sektor yang lain. Sisi negatifnya, teori ini kurang mempertahankan ketersediaan modal sehingga potensial menguras devisa dan kesiapan kultural masyarakat dalam menerima teknologi tersebut cenderung diabaikan.

Selama PJP I, ada tiga konsep industrialisasi yang telah dan sedang dijalankan di Indonesia yakni *industrialisasi yang didasarkan atas keunggulan*

---

<sup>7</sup> *ibid*, hal. 228.



*komparatif, keterkaitan antar sektor dan teknologi tinggi.*<sup>8</sup> Kekuatan sumber daya alam yang dimiliki dan sumber daya manusia yang relatif murah mendorong Indonesia mengembangkan industri yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Persoalan yang timbul, karena terlalu membanggakan keunggulan sumber daya yang dimiliki, antisipasi terhadap temuan baru (bahan sintetis dan energi baru) menjadi kurang. Di pasar internasional nilai tukar komoditas ini menurun terhadap barang manufaktur ditambah lagi semakin maraknya tuntutan kenaikan UMR, membuat kebijakan bergeser kepada argumen keterkaitan antar sektor.

Kritikpun masih muncul, bahwa keterkaitan pada pada industri manufaktur di Indonesia masih dinilai kurang. Bahan baku terpaksa diimpor dari luar negeri, berarti biaya produksi meningkat dan harga jual relatif mahal. Selain itu umumnya konglomerat kita menguasai usaha dari sektor hulu sampai hilir akibatnya, banyak pengusaha kecil gulung tikar. Memasuki Repelita V, kebijakan bergeser lagi kearah industri yang menggunakan teknologi tinggi tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, tetapi lebih kekuatan sumber daya manusia yang melakukan inovasi, bersikap entrepreneurship dan kreatif. Untuk menghadapi masa depan, konsep industri seperti inilah yang perlu dikembangkan karena akan mampu bertahan terhadap persaingan dan memiliki akses ke pasar internasional.

### 2.2.2 Strategi Industrialisasi

Terdapat dua macam pola strategi industrialisasi, *substitusi impor* yang biasa dikenal dengan strategi “orientasi ke dalam” yaitu strategi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang sejenis. Mengembangkan industri yang menghasilkan barang konsumtif sebagai langkah awalnya. Kebanyakan mereka mendapat perlindungan pemerintah dari persaingan tidak setara dan produk-produk impor, agar bisa berkembang. Pola yang kedua yaitu, strategi *promosi ekspor* atau strategi “orientasi ke luar” merupakan strategi yang mengutamakan industri yang menghasilkan produk untuk ekspor.<sup>9</sup>

Menurut Mudrajad Kuncoro (1997:228) kedua pola di atas dibedakan sebagai berikut:

<sup>8</sup> Soemitro, 1989 dalam HG. Suseno Triyanto Widodo, op. Cit, hal. 67.

<sup>9</sup> Dumairy, op. cit, hal. 229.



Outward looking

1. Perdagangan bebas dan kebijaksanaan ekspansi ekspor
2. Kebijakan ekonomi dalam negeri tipe "terbuka"
3. Kebijakan pintu terbuka terhadap bantuan luar negeri ke sektor pemerintah
4. Kebijakan pintu terbuka terhadap Penanaman Modal Asing
5. Kebijakan pintu terbuka terhadap migrasi.

Inward looking

- a. Kebijaksanaan proteksionis dan substitusi impor
- b. Kebijakan ekonomi dalam negeri tipe "tertutup"
- c. Ketergantungan pada tabungan dalam negeri dan swasembada sumber daya
- d. Hambatan terhadap Penanaman Modal Asing
- e. Hambatan terhadap imigrasi.

Indonesia di bawah Orde Baru membuka diri terhadap investasi asing yang ditandai dengan penetapan UU no 1 Tahun 1967. Upaya untuk menarik modal asing manca negara dilakukan berkaitan dengan upaya mengembalikan kondisi perekonomian yang lesu selama Orde Lama. Pada saat itu pemerintah dihadapkan pada pilihan yang dilematis disatu sisi kebijakan pintu terbuka tersebut akan menggairahkan perekonomian dengan aliran modal, teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Disisi lain terdapat ancaman kemungkinan dominasi perekonomian oleh Penanam Modal Asing.

Menjelang awal dekade 1970-an, filsafat substitusi impor masih dipakai untuk membenarkan proteksi industri yang masih muda. Henry Bruton berargumentasi, bahwa dalam banyak hal substitusi impor terjadi secara spontan melalui dan bukan saja merupakan strategi yang paling lazim dalam praktik namun mungkin memang merupakan satu-satunya strategi... diantara beberapa pilihan, maka strategi substitusi impor kemungkinan besar akan terpilih karena yang diperlukan hanyalah melarang impor, tugas yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah. Bruton mengakui ada masalah-masalah dalam strategi ini tapi bukan merupakan kelemahan akan tetapi dalam penerapannya.<sup>10</sup> Menurut para pendukung

<sup>10</sup> RADIUS Prawiro, Frans M. Parera (ed), *Pergulatan Indonesia membangun ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi*, PT. Elex Komputindo, Kelp. Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 212.



substitusi impor, banyak keuntungan bagi perekonomian negara sedang berkembang yakni, melestarikan devisa, menciptakan lapangan kerja, berperan besar dalam pertumbuhan industri sebuah perekonomian dan mempercepat kemajuan teknologi perekonomian tersebut.

Sejak dekade 1970-an sampai dengan 1980-an substitusi impor diterapkan dengan bertujuan untuk menghemat devisa dengan cara mengembangkan industri yang menghasilkan barang impor. Didasarkan pada strategi tersebut pemerintah membatasi masuknya investasi asing dengan berbagai ketentuan, antara lain pembatasan lisensi, penetapan pangsa modal PMA terhadap modal domestik dan pelarangan PMA bergerak ke sektor pertahanan keamanan, sektor telekomunikasi dan sektor publik seperti listrik dan air minum.<sup>11</sup>

Awalnya strategi ini lumayan berhasil, sektor industri melaju cepat. Sayangnya keterkaitan antar sektor sangat kurang. Kandungan impor bahan baku masih tinggi dan di lain pihak suplai bahan baku lokal masih rendah. Maka yang muncul dalam kenyataan, strategi tersebut justru menguras devisa untuk pembelian barang modal yang sebagian besar masih harus diimpor. Dapat dikatakan bahwa ketergantungan impor bahan baku dan modal dari luar negeri tersebut membawa implikasi: *pertama*, kenaikan nilai tambah akan banyak dinikmati oleh suplier luar negeri; *kedua*, kecenderungan menimbulkan ekonomi biaya tinggi; *ketiga*, kemampuan bersaing yang lemah dalam melakukan penetrasi ke pasar internasional; karena potensi yang berlebihan membuat industri tidak efisien; *keempat*, meningkatnya ketimpangan sektoral; *kelima*, memburuknya defisit transaksi berjalan.<sup>12</sup> Dalam beberapa kasus, kebijakan ini berharga namun sebagian besar justru melindungi inefisiensi.

Agar kehidupan industri tetap berjalan pemerintah beralih kepada strategi yang berorientasi ekspor. Bertambah anjloknya harga minyak pada awal 1986, membuat perubahan strategi tersebut menjadi suatu keharusan. Beranjak dari bulan Mei 1986, diperkenalkan perombakan strategi yang dimaksudkan untuk memperkecil "kecondongan anti ekspor" yang timbul dari rezim perdagangan dan

---

<sup>11</sup> Pangestu, 1995 dalam Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah Dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 289.

<sup>12</sup> HG. Suseno Triyanto Widodo, *op. cit.*, hal. 35.



kebijakan di bidang industri sebelumnya yang bersifat proteksionis. Pemerintah memberi kesempatan lebih jauh kepada sektor swasta untuk memperbaiki iklim permodalan melalui penyederhanaan-penyederhanaan peraturan yang berbelit-belit.

Dalam menyukseskan industrialisasi peran pemerintah bukan hal yang kecil dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan stabil, sedangkan pihak swasta juga berperan penting dalam membina dan memajukan kewiraswastaan. Bagaimanapun juga industrialisasi adalah proyek nasional yang sangat besar sehingga melibatkan pemerintah maupun swasta. Dari sudut pandang dekade 1990-an, masalah perdebatan strategi sudah tidak lagi populer, kebijakan berorientasi ekspor merupakan raja dari model-model pembangunan dan substitusdi impor sudah semakin kehilangan pamornya.

## **2.3 Klasifikasi dan Skala Industri**

### **2.3.1 Klasifikasi Industri**

Penggolongan industri di Indonesia didasarkan pada beberapa hal yaitu kelompok komoditas, skala usaha dan berdasarkan hubungan arus produknya.<sup>13</sup> Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan “Baku Internasional Klasifikasi Industri” (International Standart of Industrial Clasification, ISIC). Pendekatan ini didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas yang secara garis besar dibedakan menjadi 9 golongan. Penggolongan berdasarkan ISIC ini terinci lebih lanjut sampai dengan kode atau sandi 6 digit. Untuk lebih jelasnya penggolongan terebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Untuk kepentingan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, sektor industri pengolahan dibagi menjadi:

1. Sub sektor industri pengolahan non-migas
2. Sub sektor industri pengilangan minyak bumi
3. Sub sektor industri pengolahan gas alam cair.

Penggolongan berdasarkan hubungan arus produksi diperlukan untuk pengembangan sektor industri itu sendiri dan diperlukan administrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dibedakan menjadi:

---

<sup>13</sup> Ibid.



1. Industri hulu, yang terdiri dari:
  - a. Industri kimia dasar
  - b. Industri mesin, logam dasar dan elektronika
2. Industri hilir, yang terdiri dari:
  - a. Aneka industri
  - b. Industri kecil.

### 2.3.2 Skala Industri

Industri menurut besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga dengan kriteria yang berlainan. BPS membedakan menjadi empat yang dilihat dari jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu:

1. Industri besar : berpekerja 100 orang atau lebih
2. Industri sedang : berpekerja antara 20 sampai 99 orang
3. Industri kecil : berpekerja antara 5 sampai 19 orang
4. Industri/ kerajinan rumah tangga : berpekerja < 5 orang.

Penggolongan yang dilakukan Bank Indonesia, berdasar kriteria besar kecilnya kekayaan (assets) yang dimiliki:

1. Perusahaan besar: perusahaan yang memiliki asset (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan)  $\geq$  600 juta rupiah
2. Perusahaan kecil: perusahaan yang memiliki asset (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan) < 600 juta rupiah.

Dalam industri manufaktur, industri berskala kecil dan menengah di Indonesia dinilai sebagai sektor penting untuk mengikis masalah yang dialami Indonesia seperti pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya. Industri kecil tersebar sampai ke pedesaan sekalipun, peranannya tidak hanya untuk memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha tetapi juga untuk mendorong pembangunan di daerah. Selain itu sukses yang diraih dengan ekspor produknya menegaskan potensinya sebagai sumber penting penerimaan ekspor non-migas sehingga perkembangannya perlu diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut Departemen Perindustrian membedakan industri kecil menjadi beberapa kategori untuk memperkirakan mengenai peranan relatif



dan keefektifan berbagai program bantuan teknis yang akan diberikan. Kategori tersebut meliputi:

1. Industri kecil modern

- a. Menggunakan teknologi proses madya
- b. Mempunyai skala produksi yang terbatas
- c. Tergantung pada dukungan Litbang dan usaha-usaha kerekayasaan (industri besar)
- d. Dilibatkan dalam sistem produksi industri besar dan menengah dan dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor
- e. Menggunakan mesin khusus dan alat perlengkapan modal lainnya.

2. Industri kecil tradisional

- a. Teknologi proses yang digunakan secara sederhana
- b. Teknologi pada bantuan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang disediakan Departemen Perindustrian sebagai bagian dari program bantuan teknisnya kepada industri kecil
- c. Mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal lainnya relatif sederhana
- d. Lokasi di daerah pedesaan
- e. Akses untuk menjangkau pasar di luar lingkungan langsungnya yang berdekatan terbatas

3. Industri kerajinan kecil

- a. Meliputi berbagai industri kecil yang sangat beragam mulai dari yang menggunakan teknologi proses yang sederhana samapi teknologi proses madya bahkan teknologi proses maju
- b. Potensinya untuk menyediakan lapangan kerja dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah
- c. Terutama di daerah pedesaan
- d. Didorong atas landasan budaya (pelestarian warisan budaya Indonesia).<sup>14</sup>

Perkembangan sektor industri sejak Orba atau PJP I sangat mengesankan. Ini terlihat dari jumlah unit usaha menurut skala (BPS) serta jumlah tenaga kerja yang diserap. Jumlah unit usaha dalam industri pengolahan pada tahun 1991 hampir

<sup>14</sup> Thee Kian Wie, op. cit, hal. 111.



dua kali lipat dari kondisi tahun 1975. Selama periode tersebut terjadi penambahan sebesar 1 205 493 unit usaha. Terdiri dari industri skala besar/ sedang sebesar 8 487 menjadi 16 494, industri kecil dari 48 221 menjadi 122 681 dan industri rumah tangga yang bertambah dari 1 234 511 menjadi 2 350 984 unit. Peningkatan oada jumlah tenaga kerja yang diserap total sebesar 2, 9 juta orang atau dari 4, 9 juta orang pada tahun 1975 menjadi 7, 8 juta orang di tahun 1991.<sup>15</sup> Perkembangan tahun 1991 sampai dengan tahun 1997 selengkapnya dapat dilihat di lampiran 2.

#### 2.4 Perkembangan Selama PJP I

Indonesia selama PJP I telah mencoba hampir semua kebijakan industrialisasi yang menurut Todaro (1985-405) dikategorikan menjadi empat yaitu, *primary outward looking policies* untuk mendorong ekspor bahan mentah, *second outward looking policies* untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur, *primary inward looking policies* untuk mengutamakan swasembada sektor pertanian dan *second inward looking policies* untuk mengerjakan industri substitusi impor.<sup>16</sup> Terbukti dari Indonesia pernah berjaya dengan ekspor minyak mentah, sukses swasembada beras, menjalankan industrialisasi yang diawali dengan strategi substitusi impor di tahun 1970-an dan mulai beralih ke industri manufaktur berorientasi ekspor sejak 1980-an.

Dengan menggunakan indikator sumbangan keluaran industri manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut World Developmen Report terbitan New York tahun 1997, prosentase industri Indonesia pada tahun 1965 hanya 8%. Hal itu lebih kecil bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura dan India sebesar 15% dari PDB, bahkan Filipina sudah mencapai 20% dari PDB-nya. Dua dasawarsa kemudian (1985) hasil manufaktur Indonesia meningkat menjadi 14% sedang Singapura 24% dan Filipina menjadi 25% dari PDB.<sup>17</sup> Dari kondisi yang seperti itu, disesuaikan dengan standar perkembangan industri relatif yang disusun oleh badan PBB untuk Indonesia (UNIDO), Indonesia termasuk dalam tahap “mulai menginjak industrialisasi” (dengan hasil manufaktur

<sup>15</sup> Dumairi, op. Cit, hal. 233.

1. <sup>16</sup> HG. Suseno Triyanto Widodo, op. cit, hal.70.

<sup>17</sup> Thee Kian Wie, op. cit, hal. 6.



10-20% dari PDB). Negara-negara seperti Singapura dan Filipina masuk dalam kategori negara "semi industri" (dengan hasil manufaktur 20-30% dari PDB) dan dalam kurun waktu yang sama tersebut negara di Asia yang masuk dalam "negara industri" (dengan hasil manufaktur >30% dari PDB) adalah Cina dengan prosentase manufaktur terhadap PDB sebesar 37% dari dua puluh tahun sebelumnya yang telah mencapai 30%.<sup>18</sup>

Sektor industri manufaktur Indonesia dalam kurun waktu 1960-1967 tumbuh dengan laju 1% setahun. Suatu perkembangan yang tidak begitu berarti, karena perdagangan yang sangat proteksionis, campur tangan negara yang meluas. Pemerintah pada masa itu disibukkan dengan urusan politik dan proyek industri yang dijalankan terbentur pada masalah kurangnya dana termasuk devisa. Baru setelah pemerintahan Orde Baru pembangunan mulai dipicu kembali dan hasilnya, laju pertumbuhan melesat 9.6% setahun selama kurun waktu 1973-1981.<sup>19</sup> Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi swasta yang dibelanjakan untuk hasil-hasil industri manufaktur, permintaan akan hasil industri manufaktur akibat kenaikan dalam pangsa penanaman modal dan dimungkinkan oleh impor besar-besaran bahan baku dan barang antara yang dibutuhkan oleh berbagai industri manufaktur.

Repelita I menetapkan sasaran ambisius untuk meningkatkan nilai produksi dengan paling sedikit 90% dalam tempo lima tahun. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana menekan rehabilitasi dari investasi industri serta investasi-investasi untuk membangun kapasitas industri yang ada. Maka diperlukan perencanaan untuk mengembangkan industri-industri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Industri yang mendukung pembangunan pertanian atau pengolahan produk-produk pertanian
2. Industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan cara menghasilkan komoditi-komoditi substitusi impor
3. Industri yang mengolah bahan baku domestik dalam jumlah besar

---

<sup>18</sup> ibid, hal.5.

<sup>19</sup> ibid, hal. 19.



4. Industri-industri padat karya
5. Industri-industri yang meningkatkan pembangunan regional

Empat ide yang terakhir telah memandu kebijakan industri dalam ORBA.<sup>20</sup>

Sebenarnya orientasi substitusi impor itu sendiri tidak salah. Seperti halnya negara-negara maju di tahap awal industrialisasi ekonominya serta negara sedang berkembang yang sudah lebih maju, strategi ini merupakan cara yang mudah dilihat bagi sebuah negara yang memulai industrialisasi dari jenjang yang rendah. Alasannya, dengan strategi tersebut dapat bersandar pada pasar dalam negeri yang dikenal dengan baik dan lebih mudah ditembus daripada pasar ekspor yang tidak dikenal. Juga dapat memberi ransangan kepada negara yang bersangkutan untuk menguasai ketrampilan teknis dan manajerial yang perlu dan memperoleh pengalaman dalam produksi dan pemasaran disamping menghemat devisa yang langka.

A. R. Soehoed, menteri perindustrian, menyatakan dalam makalahnya tahun 1981 bahwa, "kemajuan dalam industrialisasi substitusi impor selama Repelita I dan II hanya memperlebar bukan memperdalam. Industri manufaktur banyak tumbuh tetapi terlepas satu sama lain dan bahkan dalam beberapa kasus saling bersaing, secara umum tidak saling memperkuat. Karena di samping memperbesar pasar untuk industri yang sudah ada (termasuk melalui ekspor), pendalaman struktur industri merupakan hal yang tidak kalah pentingnya."<sup>21</sup> Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan yang diambil memfokuskan pada industri dasar yang mengolah sumber daya alam dan tekanannya pada kaitan antar industri hulu dan hilir (pendekatan struktural). Menurut beberapa ekonom, sumber dana yang cukup besar pada masa boom minyak menyebabkan kebijakan yang diambil, faktor efisiensi dan perlunya mencapai daya saing internasional kurang diperhatikan.

Penurunan harga minyak yang disebabkan oleh pengaruh buruk resesi ekonomi internasional dan melemahnya pasar dunia, membawa dampak pada kurun waktu 1981-1983, laju pertumbuhan industri menurun menjadi 2,1%. Resesi tersebut mengurangi arus perdagangan dan investasi. Ditambah banyak negara yang

---

<sup>20</sup> RADIUS Prawiro, *op. cit.*, hal. 214.

<sup>21</sup> Thee Kian Wie, *op. cit.*, hal. 21.



menganut kebijakan yang semakin proteksionis sehingga arus industri transnasional di seluruh dunia berkurang dan Indonesia menjadi salah satu korbannya. Industrialisasi di Indonesia pada awal PJP I memang masih terlalu mengandalkan bahan mentah dan industri manufaktur substitusi impor, untuk menghemat devisa dengan pasar terbatas dalam negeri. Akan tetapi ketika nilai tukar bahan mentah merosot, termasuk harga minyak bumi yang anjlok di bawah US\$ 10 pada tahun 1986 di pasar internasional, dan keadaan ini ditambah kejenuhan di pasar domestik, maka industrialisasi kemudian diarahkan kepada produk manufaktur melalui ekspor non-migas dengan dikeluarkannya paket kebijakan pada 6 Mei 1986 yang memperkecil "kecenderungan anti ekspor" rezim perdagangan Indonesia yang sangat proteksionis.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui langkah seperti penurunan prosentase tarif nominal yang diikuti dengan pemberian kesempatan pada eksportir untuk memperoleh manfaat dengan harga internasional. Hasilnya terlihat pada pembangunan struktur ekspor, tetapi menurut beberapa pengamat ekonomi, Indonesia belum efisien dan masih mengandung unsur high cost economy yang bersumber dari adanya praktek monopoli, proteksi yang berlebihan, birokrasi dan bentuk special treatment lainnya.

Selama Pelita IV berbagai langkah diregulasi dan debirokratisasi diteruskan untuk lebih meliberalkan peerekonomian dengan maksud mengundang swasta untuk berperan lebih besar, merangsang investor asing dan menekan ekonomi biaya tinggi sehingga kesinambungan pembangunan terjamin. Mulai Pelita ini strategi dari ketergantungan pada hasil ekspor migas mulai dialihkan pada non-migas, dengan langkah-langkah: menciptakan iklim usaha yang membantu pengusaha dan pedagang, ditunjang dengan pembangunan sarana infrastruktur utama di daerah-daerah yang sebagian besar memanfaatkan bantuan luar negeri.

Memasuki Pelita V (1989-1994) pergeseran strategi industri jelas tercermin dengan berubahnya peringkat prioritas yakni, "dorongan ekspor produk industri manufaktur" diberi prioritas di atas "pendalaman struktur industri" karena pengembangan ekspor industri manufaktur kini dianggap sebagai mesin utama mempercepat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Perkembangan saat ini telah



memberikan efek ganda yang cukup besar, tidak saja dalam memacu perkembangan sektor industri sendiri tetapi juga dalam meningkatkan penerimaan devisa dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian percepatan pembangunan sektor industri masih menghadapi berbagai masalah internal, antara lain kurang tersedianya tenaga terampil dan ahli dalam jumlah dan kualitas yang memadai, masalah terbatasnya penguasaan teknologi serta terdapatnya prasarana dan sarana tertentu yang kurang memadai.

Peningkatan sarana selama PJP I antara lain, jalan sepanjang 244.170 Km, 146 bandar udara dan 33.565 m dermaga pelabuhan laut, juga peningkatan produk tenaga listrik dari 1,8 juta Mwh menjadi 46,7 juta Mwh, jumlah kapasitas telepon dari 172 ribu satuan sambungan (ss) menjadi lebih dari 3 juta satuan sambungan diakhir tahun PJP I.<sup>22</sup> Perkembangan sektor industri yang terjadi bukan saja pada volume tetapi juga pada jenis produk dan mutu produk dimana pada tahun 1968 terdapat 28 jenis industri, pada tahun 1993 sudah menjadi 399 jenis.<sup>23</sup>

Sepanjang era PJP I, sektor industri pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22% per tahun lebih besar dari pada sektor pertanian yang hanya tumbuh dengan rata-rata 3,54% bahkan menjadi yang paling besar. Pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri dibanding sektor lain dalam PDB selama PJP I selengkapnya terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri dibanding sektor pertanian dalam PDB selama PJP I (dalam %)

Sektor	Repelita				
	I	II	III	IV	V
Pertanian	4,5	3,0	4,2	3,6	2,4
Pertambangan	14,0	4,3	-0,4	-0,3	5,0
Industri pengolahan	13,7	13,1	13,9	10,4	10,0
Bangunan	22,9	12,1	6,7	6,1	11,7
Transportasi dan komunikasi	13,0	14,5	6,4	5,0	9,0
Perdagangan	9,2	8,3	7,7	6,2	7,2

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN RI<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Zulkarnain Djamin, *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-Negara Berkembang Bagaimana n Indonesia Mengatasinya*, LP FE UI, Jakarta, 1996, hal. 128.

<sup>23</sup> Zulkarnain Djamin, *op. cit.*, hal. 155.

<sup>24</sup> Dumairi, *op. cit.*, hal. 62.



Kinerja ekspor Indonesia selama era PJP I dipengaruhi dua faktor utama. *Faktor pertama* bersifat komoditikal sekaligus internal, yaitu bahwa penerimaan sangat ditentukan oleh komoditas minyak dan gas bumi. Selama kurang lebih 13 tahun tepatnya dari tahun 1974 sampai tahun 1986, berarti lebih dari separuh masa PJP I penerimaan ekspor sangat didominasi oleh dan tergantung pada ekspor non-migas. Lonjakan luar biasa penerimaan ekspor pada tahun 1974 adalah berkat ledakan penerimaan ekspor migas.

Faktor utama *kedua* yang mempengaruhi kinerja ekspor bersifat eksternal yaitu lingkungan ekonomi internasional. Ekspor Indonesia tentu saja tidak luput dari dinamika atau gejolak perekonomian dunia pada umumnya. Dinamika tersebut antara lain berupa cerah lesunya perekonomian negara-negara maju, kadar keterbukaan pasar negara tujuan ekspor, berkenaan dengan perlindungan atas industri dalam negeri dan tenaga kerja mereka, menguatnya kemampuan ekspor negara pesaing dan munculnya negara pesaing baru, serta pengaitan isu politik oleh negara-negara tujuan ekspor.<sup>25</sup>

Masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Faktor-faktor lain tidak sepenuhnya berada di sektor perdagangan atau aspek kebijakan ekspor, melainkan bertautan pula dengan kinerja atau aspek kebijakan di sektor lain. Kurang kompetitifnya berbagai komoditi ekspor di pasaran internasional berkaitan dengan kinerja serta kebijakan sektor industri di dalam negeri, juga kebijakan tata niaga.

Ketergantungan ekspor komoditi tertentu menyebabkan penerimaan ekspor menjadi rentan. Oleh karenanya pengembangan ekspor non-migas perlu terus dilakukan. Sebelum tahun 1980, sektor manufaktur masih sangat berorientasi ke pasar dalam negeri, produk manufaktur yang dijual di pasar internasional hanya berkisar antara 1-3% dari keseluruhan ekspor Indonesia. Baru pada awal 1980-an diluncurkan berbagai kebijakan yang secara serius dan konsisten berusaha untuk mendorong ekspor. Seperti kebijakan kredit ekspor pada tahun 1982, devaluasi 1983 dan 1986 dan penyempurnaan sistem pengembalian bea masuk untuk produk-produk yang diekspor pada bulan Mei 1986. Kebijakan lain seperti penyederhanaan

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 180.



prosedur bea cukai insentif bagi penanaman modal asing (PMA) yang berorientasi ekspor, dan deregulasi perbankan Oktober 1988.

Upaya tersebut sudah menampakkan hasil, ekspor komoditas non-migas mengalami peningkatan, awal PJP I (1969) sebesar US\$ 310 juta, pada tahun terakhir (1994) menjadi US\$ 25,7 miliar. Peranan ekspor non-migas dalam ekspor nasional sebesar 74,4 %. Sejak tahun 1982 penerimaan ekspor non-migas lebih menjanjikan. Lalu mulai tahun 1987 penerimaan ekspor non-migas sudah melampaui penerimaan ekspor migas. Dilihat secara sektoral, penyumbang terbesar penerimaan ekspor non-migas adalah hasil industri.

Jika pada tahun 1981 kontribusi sektor industri sebesar 59,24% (10,60% dari ekspor total), maka pada tahun 1994 sudah menjadi 84,66% (64,17% dari ekspor total). Dengan demikian peranan ekspor industri sudah melebihi peranan migas. Bahkan sejak 1988 penerimaan ekspor sebesar 40% dari total ekspor.

Tabel 2. 2 Kontribusi sektoral dalam nilai ekspor non-migas 1981-1994

Tahun	Nilai ekspor non-migas (US\$)	Kontribusi sektoral (%)			
		Pertanian	Industri	Tambang (tidak termasuk minyak bumi)	Lain-lain
1981	4 501, 3	34, 88	59, 24	4, 51	1, 37
1982	3 929, 2	31, 08	62, 76	4, 56	1, 60
1983	5 005, 3	27, 43	64, 36	3, 40	4, 81
1984	5 869, 7	26, 11	67, 85	3, 13	2, 91
1985	5 868, 8	23, 64	72, 35	3, 34	0, 67
1986	6 528, 4	26, 87	69, 06	3, 78	0, 29
1987	8 579, 6	19, 42	77, 70	2, 74	0, 14
1988	11 537, 1	16, 55	80, 28	3, 02	0, 15
1989	13 480, 0	14, 41	81, 81	3, 73	0, 05
1990	14 604, 1	14, 26	81, 34	4, 35	0, 05
1991	18 247, 1	12, 50	82, 57	4, 87	0, 06
1992	23 296, 2	9, 50	84, 19	6, 24	0, 07
1993	27 077, 1	9, 77	84, 73	5, 41	0, 09
1994	30 359, 7	9, 23	84, 66	5, 93	0, 13
Rata-rata		19, 69	75, 21	4, 22	0, 88

Sumber: Indikator ekonomi Maret 1996, BPS.<sup>26</sup>

Walaupun sektor non-migas kian kontributif dalam menghasilkan devisa, struktur ekspornya sendiri sebenarnya masih belum cukup mantap. Komposisi

<sup>26</sup> Dumairy, op. Cit, hal. 185.



ekspor sektor non-migas masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu, terutama ekspor hasil industri. Ekspor hasil industri Indonesia meliputi kayu olahan, barang dari logam, pakaian jadi, tekstil, karet olahan, makanan olahan, makanan ternak, minyak atsiri, minyak kelapa sawit, asam berlemak, alat-alat listrik, barang anyaman, bahan timah, semen, pupuk, kulit dan barang dari kulit, kertas dan barang dari kertas, serta berbagai macam komoditi lagi.

Dari sekian komoditi yang ada, ekspor sektor industri didominasi oleh kayu lapis, pakaian jadi, tekstil dan karet olahan. Keempat macam komoditi ini merajai ekspor hasil-hasil industri selama 15 tahun sejak 1981. Keempatnya rawan terhadap gejolak internasional. Masyarakat negara-negara pemakai di Eropa Barat pernah memboikot kayu lapis dari Indonesia berkenaan dengan isu lingkungan. Mereka menuduh produksi kayu lapis dari Indonesia dilakukan dengan pembabatan hutan seenaknya sehingga mengakibatkan terbentuknya cincin lapisan ozon yang menyebabkan hawa dipermukaan bumi makin panas.

Karet olahan menghadapi masalah harga yang sering fluktuatif dan saingan karet sintetis. Ekspor tekstil dan produk tekstil kita ke AS sempat terganjal "kasus Jenkins" (nama seorang anggota yang mengusulkan pengganjalan tersebut). Kontribusi komoditi utama sektor industri dalam penerimaan ekspor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Kontribusi komoditi utama sektor industri dalam penerimaan ekspor tahun 1981-1994

Tahun	Sektor industri		
	Kayu lapis	Tekstil	Pakaian jadi
1981	6, 05	1, 14	3, 57
1982	10, 94	1, 45	4, 67
1983	15, 82	3, 48	4, 83
1984	16, 77	4, 72	7, 43
1985	19, 42	5, 17	8, 00
1986	22, 23	6, 18	11, 51
1987	26, 39	6, 26	8, 97
1988	22, 39	6, 29	8, 59
1989	21, 32	7, 55	10, 60
1990	22, 95	10, 61	14, 06
1991	19, 05	11, 85	15, 20
1992	16, 47	14, 64	16, 26
1993	18, 55	11, 65	15, 30



1994	14, 46	10, 01	12, 55
------	--------	--------	--------

Sumber: Indikator ekonomi Maret 1996, BPS.<sup>27</sup>

Bagian terbesar dari ekspor manufaktur tersebut merupakan ekspor padat sumber daya seperti kayu lapis dan padat karya yang berupa pakaian jadi, elektronika, dan produk tenun sebagai penyumbang terbesar. Pada tahun 1987 kontribusi kayu lapis mencapai puncaknya, hal itu tidak bisa lepas dari kebijakan larangan ekspor kayu gelondongan. Namun setelah 1987 pangsaanya menurun. Sementara pangsa produk pakaian jadi dan tenun menurun setelah 1992.

Turunnya peran produk ekspor dominan sejak 1987 telah membuka jalan bagi produk manufaktur lainnya. Pangsa ekspor padat karya yang lain meningkat dari 8% di awal 1980-an menjadi 25% pada akhir 1990-an. Pangsa ekspor barang elektronika yang menurun sejak 1980 mencapai titik terendah pada 1987, akibat ditulupnya dua perusahaan asing besar yaitu Fairchild and national semi konduktor, kembali meningkat sejak 1991 sampai 1992.<sup>28</sup>

Suatu kebijakan industri umumnya diarahkan kepada tiga sasaran sekaligus yaitu, memperkuat struktur industri, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan devisa. Pada masa booming minyak, Indonesia menerapkan kebijakan industri untuk memperkuat pendalaman struktur. Menurut Umar Juoro (1995), untuk saat ini ketiga sasaran tersebut harus dihadapi sekaligus. Selanjutnya diuraikan bahwa strategi industrialisasi yang mampu menjawab tantangan diterjemahkan dalam tiga kebijakan dan tiga sasaran yakni:

1. Kebijakan pendalaman struktur industri yang difokuskan pada industri menengah, elektronika, peralatan listrik dan permesinan untuk mencapai keunggulan kompetitif
2. Kebijakan deregulasi untuk memberikan kesempatan baerkembangnya industri berdasar keunggulan komparatif yang segera dapat menghasilkan penerimaan devisa

<sup>27</sup> Ibid, hal. 186.

<sup>28</sup> Mari Pangestu, Raymon A dan Julius M (ed), Transformasi Industri dalam Era Perdagangan Bebas, CSIS, Jakarta, 1996, hal. 33.



3. Kebijakan pengembangan industri menengah dan kecil untuk mencapai perluasan kerja.<sup>29</sup>

Sehingga kebijakan dan strategi industri yang tepat untuk 25 tahun mendatang hendaknya lebih mengkonsentrasikan produk industri manufaktur berorientasi ekspor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan berteknologi tinggi dengan catatan iklim usaha yang kompetitif lebih dilindungi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk lebih menguasai teknologi menjadi suatu keharusan. Ditambah lagi dengan strategi pembangunan ekonomi nasional yang kurang memiliki pijakan kuat, terutama perlibatan partisipasi kelompok masyarakat lain yang diiringi oleh banyaknya pinjaman luar negeri, banyaknya kebijakan protektif dan hak-hak istimewa pada skala usaha besar serta investasi asing yang kebanyakan berorientasi pada sektor perekonomian modern, mengakibatkan perekonomian kita kurang antisipatif dalam menghadapi badai krisis. Dinamika tata ekonomi yang memacu kompetisi yang semakin ketat merupakan tantangan eksternal yang harus dihadapi dalam pembangunan industri nasional di masa yang akan datang.

---

<sup>29</sup> HG. Suseno Triyato Widodo, op. cit, hal. 71.



### BAB III

## KONDISI SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA

Hahekat pembangunan industrialisasi di sebuah negara sebenarnya adalah untuk apa dan untuk siapa industrialisasi tersebut dilaksanakan. Untuk itu ada empat hal yang menjadi perhatian, yakni industrialisasi untuk mengatasi kemiskinan, mengangkat kemampuan masyarakat yang masih rendah tingkat kemakmurannya, mengatasi dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru, dan memperluas serta memperkuat landasan ekonomi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Kegiatan industrialisasi dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan lepas dari pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang sering dilibatkan dalam proses industrialisasi meliputi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK), investasi atau modal. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengolah unsur-unsur sumber daya tersebut untuk menghasilkan produk yang bermutu, harganya bersaing dan memang dibutuhkan konsumen.

Sebagai salah satu senjata menembus era globalisasi, kualitas bukan sekedar kualitas produk, tetapi meliputi kualitas manajemen dalam menghasilkan suatu produk. Dan konsumen merupakan faktor kritis, karena sebaik apapun teknik pengembangan dan manajemen yang dijalankan, jika tidak memperhatikan konsumen maka tidak akan ada artinya.

Kondisi industrialisasi di Indonesia masih terdapat adanya beberapa hambatan. Terbatasnya kemampuan ekonomi dan keuangan negara serta masalah-masalah yang lain seperti langkanya modal di dalam negeri, rendahnya produktivitas, skill dan teknologi yang masih tertinggal, tingginya harga tanah,

---

<sup>1</sup> Sarbini Sumawinata 1988 dalam H. G. Suseno Triyanto Widodo, *Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 68.



belum sempurnannya sarana-sarana umum, lemahnya penguasaan pasar dan sebagainya. Sehingga masih banyak sektor atau bidang yang memerlukan dukungan dana pinjaman luar negeri.

Pada dasarnya kebutuhan suatu negara akan bantuan atau utang luar negeri sangat tergantung pada tahap pembangunan yang sudah dicapai negara yang bersangkutan. Untuk kondisi seperti Indonesia, sektor-sektor yang membutuhkan bantuan tersebut antara lain:

1. Perbaikan infra struktur  
Pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan pula kebutuhan akan infra struktur. Kebutuhan ini tidak semuanya bisa dipenuhi swasta, sementara kekuatan dana pemerintah masih terbatas. Karena itu diperlukan sumber pendanaan lain termasuk untuk pembangunan infra struktur yang akan mendukung industrialisasi, konservasi lingkungan dan pengembangan sumber daya alam
2. Bantuan untuk sektor swasta  
Dalam rangka mengantisipasi peran swasta sebagai pemain kuat dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang, diperlukan banyak dukungan lembaga-lembaga atau negara donor untuk memperkuat posisi sektor tersebut. Bantuan juga bisa berupa dukungan terhadap program swastanisasi pemerintah atau dalam proyek-proyek infra struktur yang melibatkan partisipasi swasta
3. Pembangunan sumber daya manusia  
Sebagai salah satu sasaran penting menghadapi tahun 2010 yang meliputi kesehatan, pendidikan dan lain-lain
4. Pasok energi, lingkungan dan pangan
5. Pertumbuhan ekonomi tinggi menghadapi negara-negara pada isu-isu lingkungan, masalah kebutuhan dan suplai pangan serta persoalan yang menyangkut kecukupan energi



#### 6. Kerja sama kawasan

Pada tahun 2010, kerjasama kawasan di berbagai bidang diperkirakan bakal semakin ekstensif, terutama di bidang energi, lingkungan, suplai pangan dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, sering dibutuhkan dana bagi pelaksanaan proyek kerja sama.<sup>2</sup>

Tingginya ketergantungan pada bantuan itu sendiri, mencerminkan banyaknya kelemahan struktural dalam perekonomian, seperti rendahnya volume ekspor, ketergantungan yang besar penerimaan ekspor terhadap sejumlah kecil komoditi primer, dan rendahnya tabungan domestik sebagai akibat rendahnya pendapatan per kapita. Kondisi yang seperti itu menempatkan bantuan luar negeri berperan sebagai penutup kesenjangan antara tabungan-investasi dan devisa.

#### 3.1 Arus Modal yang Tersedia

Pemberian pinjaman atau hutang ke negara-negara selatan, antara lain dimaksudkan untuk menjadi "modal kerja" mereka membangun industri dan meningkatkan produk untuk ekspor, agar dapat mengumpulkan devisa luar negeri untuk digunakan membayar kembali hutang-hutang mereka. Tetapi meskipun ekspor meningkat namun harga produk di pasaran merosot dan dipermainkan negara-negara yang menguasai pasar, antara lain dengan berbagai proteksi dan rintangan tarif sehingga kemampuan membayar hutangpun melorot dan hutang semakin bertumpuk.

Sementara itu, banyak kalangan yang mempertanyakan efisiensi dari proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan "bantuan" (hutang) luar negeri. Seperti negara donor mengharuskan penggunaan komponen-komponen yang berasal dari negaranya. Hal ini menyebabkan distorsi yang memungkinkan terjadinya inefisiensi proyek-proyek tersebut. Persetujuan dari calon pemberi hutang ini tidak terlepas dari agenda, kepentingan strategi, dan finansial negara

---

<sup>2</sup> Sektor-Sektor yang Lapar Bantuan, KOMPAS, Juli 1997.



pemberi pinjaman. Akibatnya, penentuan prioritas proyek dan alokasi dana ikut ditentukan berdasar agenda pemberi hutang.<sup>3</sup>

Dalam hal pembiayaan pembangunan, Indonesia belum bisa mengurangi ketergantungannya terhadap sumber dana dari luar negeri, baik investasi langsung, tidak langsung maupun yang berupa hutang. Peningkatan terhadap pemasukan modal asing dalam struktur pembiayaan pembangunan Indonesia sebetulnya hanyalah *second best solution* sedangkan *first best solution*-nya berupa penggalan sumber-sumber dana domestik terutama melalui pajak.<sup>4</sup> Yang perlu diperhatikan dalam menarik modal asing tersebut adalah bagaimana caranya agar pendanaan dan juga perekonomian lokal dapat diuntungkan secara maksimal oleh modal asing, pemerintah harus merumuskan langkah-langkah pemberdayaan penduduk dan perekonomian lokal seoptimal mungkin.

Investasi dapat dipandang sebagai sarana memperoleh devisa, dimana teknologi sebagai basis industri masih senantiasa tergantung pada pihak luar, investasi dalam negeri dan penanaman modal asing, menurut Sanyoto dari BKPM, bahwa ada tantangan eksternal dan internal yang harus dihadapi Indonesia. Secara *eksternal*, Indonesia harus bersaing memperebutkan dana investasi global. Di samping itu kecenderungan terjadinya kerja sama ekonomi regional yang menampilkan kecenderungan eksklusifisme. Secara *internal*, perlu diciptakan iklim investasi yang menarik investor, ketersediaan infra struktur ekonomi yang memadai sebagai pendukung kegiatan industri, serta pangsa pasar yang mempunyai daya serap tinggi.<sup>5</sup>

Baik investasi dalam negeri maupun asing dalam penyebarannya tidak merata. Terjadinya akumulasi yang berlebihan baik dalam hal jumlah proyek maupun jumlah dana yang ditanamkan pada proyek-proyek yang berlokasi di Pulau Jawa.

<sup>3</sup> Topatimasang Roem (ed), *Hutang Itu Hutang*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1999, hal.175.

<sup>4</sup> *Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia, Analisis CSIS no. 1* th. 1996, hal. 88.

<sup>5</sup> A. Irawan J. H. *Indonesia Menyongsong Liberalisasi Ekonomi Global?* *Journal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "POTENSIA"*, th. VIII no. 22, Juni 1998, Unika Parahiyangan, Bandung, hal. 15.



Tabel 3.1 Penanaman Modal Dalam Negeri yang disetujui pemerintah tahun 1994-1998

Tahun	Sektor Industri (Miliar Rupiah)	Total (Miliar Rupiah)	Prosentase
1994	31.921,7	53.289,1	60
1995	43.341,8	69.853,0	62
1996	59.217,7	100.715,2	59
1997	79.334,3	119.872,9	66
1998	44.908,0	60.749,3	74

Sumber: Bank Indonesia Laporan tahunan 1998/1999.<sup>6</sup>

Tabel 3.2 Penanaman Modal Asing yang disetujui pemerintah tahun 1994-1998

Tahun	Sektor Industri (Juta US\$)	Total (Juta US\$)	Prosentase
1994	18.738,8	23.724,3	79
1995	26.891,9	39.914,7	67
1996	16.072,2	29.931,4	54
1997	23.017,3	33.832,5	68
1998	8.388,2	13.563,1	62

Sumber: Bank Indonesia Laporan tahunan 1998/1999.<sup>7</sup>

Dalam laporan tahunan Bank Indonesia, terlihat bahwa sebagian besar dari investasi yang dilaksanakan baik oleh investor domestik maupun asing dialokasikan pada sektor industri. Yang besarnya lebih dari 50% dari investasi total yang ditanamkan. Dari data yang tercatat selama kurun waktu 1994-1998, penanaman modal dalam negeri mengalami kenaikan, begitu pula alokasi yang terjadi pada sektor industri. Kecuali, yang terjadi pada tahun 1998 total nilai investasi dalam negeri menurun lebih dari setengahnya bila dibandingkan dengan total nilai investasi yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada tahun yang sama penurunan juga menimpa investasi asing yakni sebesar 40% dari total investasi yang terjadi pada tahun 1997. Sedangkan hampir keseluruhan prosentase modal asing yang diinvestasikan ke sektor industri pada tahun-tahun periode tersebut menunjukkan angka yang menurun.

Kondisi penanaman modal baik domestik maupun asing periode 1994-1998 yang disetujui pemerintah secara lengkap tiap sektornya dapat dilihat di lampiran 3 dan 4. Dari angka kumulatif Januari 1967 s/d Juni 1998, investasi

<sup>6</sup> Bank Indonesia Laporan tahunan 1998/1999, BI, Jakarta, 1999, hal. 182.

<sup>7</sup> *ibid.*, hal. 184.



asing paling besar berasal dari Jepang kemudian diikuti Inggris dan Singapura di posisi ketiga. Angka kumulatif meliputi proyek baru, perluasan, perubahan, penggabungan, alih status, dan pencabutan.

Tabel 3. 3 Angka Kumulatif Proyek-Proyek Penanaman Modal yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Negara Asal Tahun 1967-1998

Jenis kategori	Kumulatif 1 Januari 1967 s/d 30 Juni 1998	
	Proyek	Investasi
1. Amerika		
USA	314	9 920, 0
Kanada	95	147, 5
Amerika lainnya	40	999, 7
2. Eropa		
Belgia	33	349, 3
Denmark	20	115, 3
Perancis	71	1 463, 6
Italia	25	87, 3
Nederland	190	5 524, 8
Norwegia	13	276, 2
Jerman Barat	132	6 315, 1
Inggris	261	21 389, 7
Swiss	58	937, 0
Eropa lainnya	58	2 475, 4
3. Asia		
Jepang	1 047	34 350, 3
Korea	516	8 931, 8
Hongkong	375	14 179, 2
Taiwan	629	12 632, 6
Singapura	769	18 171, 9
India	44	179, 1
Asia lainnya	358	10 253, 3
4. Australia	309	8 137, 4
Selandia Baru	14	102, 7
5. Afrika		
Nigeria	3	3, 0
Afrika lainnya	22	1 158, 8
6. Negara lainnya	639	55 103, 3
Jumlah	6 035	213 204, 3

Sumber: Indikator ekonomi, Maret 1999.<sup>8</sup>

Posisi country risk Indonesia yang merupakan cerminan kondisi yang dapat merangsang investasi di negara ini belum juga menunjukkan perbaikan. Artinya

<sup>8</sup> BPS Indikator Ekonomi, Maret 1999.



masih tetap pada posisi high risk. Dalam kondisi seperti ini, sedikit sekali atau bahkan tidak ada rangsangan bagi investor untuk mereka kembali pada bidang investasi porto folio maupun investasi langsung secara fisik di sektor riil sebagai aliran modal masuk diperkirakan masih belum dapat diharapkan terlalu banyak.

Beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat realisasi investasi swasta, *pertama*, faktor yang bersifat subjektif-internal, artinya berkaitan dengan situasi perekonomian di dalam negeri Indonesia sendiri, termasuk keadaan dari calon investor. Seperti misalnya gejala ekonomi biaya tinggi di tanah air, sehingga mengurungkan niat investor untuk merealisasi rencana investasinya. Sebelum diluncurkannya berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, prosedur perijinan penanaman modal di Indonesia sangat tidak efisien. Disamping menelan waktu yang lama, juga memakan biaya besar. Acapkali calon investor harus mengeluarkan ongkos ekstra yang tidak sedikit dari akibat semua itu. Penyebab lain adalah rendahnya kapasitas calon investor. Kemampuan modal sendirinya kurang memadai bagi investasi yang direncanakan, sehingga struktur modal investasinya terlalu didominasi oleh dana pinjaman. Dalam situasi demikian, apabila hasil-balik yang diharapkan tidak lebih besar daripada biaya modal, ia akan cenderung mambatalkan niat investasinya.

Faktor *kedua* bersifat objektif-eksternal, dapat berupa lebih menariknya investasi di luar negeri daripada di dalam negeri. Baik karena hasil-balik yang lebih besar di luar negeri, ataupun karena fasilitas atau kemudahan berinvestasi di sana, atau karena kemudahan dan kemurahan sumber daya di negara lain (bahan baku dan tenaga kerja). Dihadapkan pada situasi tersebut, seorang calon investor akan cenderung mengalihkan rencana investasinya di Indonesia ke negara lain bahkan investasi domestik sekalipun.<sup>9</sup>

Pesatnya pertumbuhan ekspor ternyata juga disertai impor barang dan jasa. Hal ini terjadi sebagai konsekwensi logis dari peningkatan investasi oleh swasta khususnya penanaman modal asing yang menggunakan bahan baku dan penolong serta bahan modal dari impor, serta penurunan tarif impor dan bea masuk dalam

<sup>9</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta 1997, hal. 147.



rangka GATT dan WTO atau globalisasi ekonomi. Selain berdampak kepada peningkatan impor bahan baku dan bahan penolong juga pada impor barang konsumsi. Kalau kita perhatikan impor bahan baku dan bahan penolong merupakan prioritas utama impor dan tingginya impor bahan tersebut serta barang modal menunjukkan besarnya ekspansi industri dan tingginya ketergantungan terhadap impor. Atau dengan kata lain tingginya impor komoditas tersebut disebabkan oleh peningkatan investasi industri komoditas tersebut, sementara ketersediaan di dalam negeri masih belum mencukupi.<sup>10</sup>

Menurut golongan barang ekonomi sampai tahun 1998, bahan baku atau penolong mempunyai bagian terbesar dari impor secara keseluruhan, diikuti barang modal kemudian barang konsumsi. Bila dibanding tahun sebelumnya, tahun 1998 impor mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena sebagai akibat menurunnya beberapa sektor industri sehingga kebutuhan akan bahan baku maupun barang modal menurun. Selain itu menurunnya nilai riil rupiah menyebabkan menurun pula daya beli masyarakat terutama terhadap barang-barang konsumsi baik domestik maupun impor.

Impor yang dilakukan Indonesia dalam kurun 1994-1998 seperti dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Nilai Impor industri Indonesia Tahun 1994-1998 (dalam juta US\$)

Tahun	Barang Konsumsi	Bahan Baku atau Penolong	Barang Modal	Total
1994	1.430,2	23.133,6	7.419,7	31.983,5
1995	1.350,4	29.586,6	8.691,7	40.628,7
1996	2.805,9	30.469,7	9.652,9	42.928,5
1997	2.166,3	30.229,5	9.284,0	41.679,8
1998	1.917,7	19.611,8	5.807,4	27.336,9

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi, Maret 1999.

Komoditi utama barang konsumsi adalah makanan dan minuman olahan, alat elektro dan perlengkapan rumah tangga. Komoditi bahan baku atau penolong adalah kimia, besi baja, suku cadang mesin dan minyak mentah. Sedangkan komoditi utama barang modal adalah mesin-mesin dan alat angkutan. Yang

<sup>10</sup> Iskandar Andi Nuhung, Tinjauan Perekonomian Indonesia, majalah Mimbar Ilmiah, th. VI no. 27, Desember 1997, Universitas Islam Jakarta, hal. 13.



meliputi mesin industri tertentu, kendaraan bermotor, mesin industri dan perlengkapannya, mesin listrik, mesin pembangkit listrik, alat angkutan, alat telekomunikasi, mesin untuk pengerjaan logam serta mesin kantor dan pengolahan data.<sup>11</sup>

Sebagian besar impor Indonesia berasal dari Jepang dan Amerika. Posisi ketiga yang selama ini diduduki Jerman, mulai 1997 digeser oleh Singapura. Gambaran selengkapnya nilai impor dari negara-negara mitra dagang utama (40 negara) beserta prosentase pangsaanya terdapat di lampiran 5.

Dominasi impor bahan baku dan struktur impor Indonesia mensyaratkan betapa tergantungnya industri dalam negeri pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Ketergantungan semacam itu potensial menimbulkan kerawanan dadakan bagi industri di dalam negeri. Gejolak bahan baku yang bersangkutan di negara asalnya dapat dengan mudah dan segera membangkitkan krisis pada industri yang berkepentingan di Indonesia. Operasi produksi terancam tersendat, atau kalaupun dipaksakan tetap terus beroperasi, biaya pokoknya niscaya membengkak, sehingga harga jual hasil produksi mau tidak mau harus dinaikkan. Dengan harga jual hasil produksi yang lebih tinggi tentu saja daya saing melemah, baik di dalam negeri maupun di pasaran internasional.

Kekalutan industri di dalam negeri akibat gejolak bahan baku pernah kita alami, misalnya pada industri tekstil di pertengahan tahun 1995 karena masih tergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Juga pada industri otomotif, kondisinya paling rentan dari seluruh komoditas yang dijagokan, tapi paling banyak dan lama memperoleh proteksi pasar. Akibatnya kebijakan pada industri ini dalam pelaksanaannya sering tidak konsisten khususnya dalam pengembangannya. Hal ini mulai terlihat dari masalah lokalisasi komponen sampai penciptaan merk yang jarang sekali ditanggapi secara serius oleh industriawan otomotif.

Hal tersebut disebabkan karena pembangunan industri komponen dan program peningkatan kandungan lokal masih lamban. Seperti pada kendaraan

---

<sup>11</sup> Publikasi statistik Impor 1997, BPS, Jakarta, 1998, hal. 33.



sedan, maksimal kandungan lokalnya hanya mencapai 10% dan itupun dimiliki oleh merk mobil Jepang yang sudah mapan. Bahkan untuk kendaraan merk baru mungkin kandungan lokalnya lebih sedikit lagi. Akibatnya terjadi ketimpangan kontribusi antara ekspor dan impor di sektor ini. Menurut data impor dari sektor ini, Juli 1995 mencapai US\$ 9. 378 miliar, sedangkan ekspornya hanya US\$ 900. 290 juta.<sup>12</sup>

Ketergantungan demikian bukan saja menyimpan benih-benih kerawan aspek produksi, tapi juga tidak menguntungkan ditinjau dari konteks neraca perdagangan. Di sisi impor, itu merupakan pemborosan devisa, sedangkan di sisi ekspor, dia membatasi kekuasaan yang menghasilkan devisa, karena daya saing internasionalnya tidak optimal. Masalah ketergantungan bahan baku tersebut memang cukup dilematis bagi Indonesia. Membuat atau menghasilkan sendiri bahan baku bolch jadi tidak efisien, schinga mengimpor lebih murah dan menguntungkan. Akan tetapi mengimpor terus menerus bisa jadi menyulitkan neraca perdagangan.<sup>13</sup>

Impor barang modal yang juga relatif tinggi, disebabkan oleh pesatnya kegiatan investasi dan pembangunan dewasa ini. Sementara itu impor barang konsumsi seperti makanan relatif kecil memberikan gambaran ketergantungan terhadap impor rendah. Namun perlu diingat era global dapat saja berdampak semakin meingkatkan impor jenis-jenis barang konsumsi ini. Dalam hal ini globalisasi akan mendorong konsumen dalam negeri Indonesia dan meningkatkan impor barang konsumsi karena meningkatnya konsumsi agregat maupun semakin banyaknya penduduk asing yang berdomisili di Indonesia.

Dalam struktur neraca pembayaran internasional Indonesia, pencatatan lalu lintas modal dikelompokkan secara terpisah antara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan yang dilaksanakan swasta. Sepanjang era PJP I, neraca modal sektor pembangunan tidak pernah negatif. Ini berarti arus modal yang masuk senantiasa lebih deras dari pada arus modal yang keluar. Modal yang masuk

---

<sup>12</sup> Kendala Ekspor Unggulan di Indonesia, MERDEKA, Juni 1996.

<sup>13</sup> Dumairy, op. cit, hal. 198.



melalui pemerintah pada dasarnya adalah pinjaman luar negeri pemerintah. Adapun modal yang keluar melalui pemerintah pada umumnya merupakan angsuran pokok pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut.

Berbeda dengan sektor pemerintah, arus modal sektor swasta tidak selalu positif, berarti kadang arus modal yang keluar melalui sektor swasta lebih besar dibandingkan arus masuknya. Modal yang masuk melalui sektor swasta selain pinjaman oleh kalangan swasta kita, juga yang berupa investasi asing (langsung ataupun melalui pasar modal) di Indonesia. Sedangkan modal yang keluar, selain berupa angsuran pokok utang pengusaha dalam negeri kepada pihak luar negeri, ada pula yang berupa investasi oleh pengusaha kita di luar negeri.

Data mengenai neraca modal Indonesia, 1969/1970-1998/1999, terdapat dalam lampiran 6. Secara keseluruhan, selama era PJP I modal Indonesia selalu surplus. Pada awal Pelita I, surplus bernilai US\$ 367 juta maka pada akhir Pelita V, meningkat 15 kali lipat yakni senilai US\$ 5.7 miliar. Pelipatgandaan ini berlangsung di kedua sektor, pemerintah dan swasta. Kenaikan di sektor pemerintah disebabkan oleh utang luar negeri yang kian membengkak. Hal tersebut disimpulkan pemerintah sebagai kenaikan kredibilitas di mata negara atau lembaga kreditor. Sedang kenaikan sektor swasta dipacu dua faktor yaitu, membengkaknya utang kalangan swasta Indonesia pada pihak luar negeri (off-shore loan) dan meningkatnya investasi langsung swasta asing (foreign direct investment).<sup>14</sup>

Mengacu dari data tersebut, sampai dengan Pelita IV, surplus sektor pemerintah pada umumnya lebih besar daripada surplus sektor swasta. Akan tetapi perkembangannya berbalik setelah memasuki Pelita V, surplus neraca modal sektor swasta yang justru lebih besar. Penyebab utama hal ini bukanlah peningkatan investasi asing, melainkan kenaikan pinjaman pihak swasta. Kondisi yang demikian berlangsung sampai dengan Pelita VI. Kecuali pada tahun keempat kondisi berbalik lagi seperti semula.

---

<sup>14</sup> Dumairy, op. cit. hal. 104.



Meskipun lalu lintas modal bersih mengalami surplus, hal itu semata-mata berasal dari arus modal masuk pemerintah yang meningkat tajam sehubungan dengan penerimaan dana bantuan pemulihan perekonomian dalam negeri dari bantuan IMF dan bantuan program bantuan lembaga internasional lainnya. Sebaliknya sektor swasta menunjukkan defisit sehubungan dengan tingginya pembayaran luar negeri dan masih rendahnya arus masuk modal swasta dalam rangka PMA. Tingginya utang luar negeri swasta disebabkan oleh belum berhasilnya upaya restrukturisasi utang luar negeri swasta khususnya di luar perbankan yang masih lambat terutama sebagai akibat sulitnya pencapaian kesepakatan antara debitur dan kreditur. Adapun rendahnya arus modal dalam rangka PMA disebabkan oleh belum pulihnya kepercayaan asing.<sup>15</sup>

Sedangkan seberapa besar utang luar negeri Indonesia baik sektor pemerintah maupun swasta, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Utang Luar Negeri Indonesia 1994-1998 (Desember)

Tahun	Hutang pemerintah (US\$)	Hutang swasta (US\$)	Total hutang (US\$)	Rasio terhadap GDP (%)	Debt Service Ratio (%)
1994	63,9	37,8	101,7	57,4	46
1995	64,4	43,4	107,8	33,6	43
1996	59,0	55,4	114,4	50,3	41
1997	63,5	74,0	137,5	63,9	46
1998	60,5	83,6	144,6	147,6	52

Sumber: Bank Indonesia

Bila dilihat dari berbagai indikator tentang swasta inability hutang luar negeri suatu negara seperti rasio total hutang (pemerintah dan swasta) terhadap GDP, rasio total hutang terhadap nilai ekspor dan besarnya bunga terhadap hasil ekspor tersebut (DSR), maka keseluruhan sudah memasuki ambang yang membahayakan. Indonesia sebenarnya sudah masuk dalam perangkap hutang luar negeri. Hutang kita setiap tahunnya meningkat, baik stok maupun cicilannya. Artinya, kita meminjam untuk membayar kembali kewajiban atas hutang yang sudah ada sebelumnya. Hal itu jelas merupakan beban yang semakin tahun akan semakin

<sup>15</sup> Bank Indonesia Laporan tahunan 1998/1999, op. cit, hal. 44.



berat bagi perekonomian nasional, khususnya pada anggaran negara dan pada neraca pembayaran.

Jumlah hutang luar negeri negara kita sampai akhir tahun 1998 sudah mencapai US\$ 144 miliar. Dengan total penduduk 202 juta jiwa, maka beban hutang perkapita kita adalah US\$ 703 per tahun. Dengan demikian pendapatan "bersih" perkapita (pendapatan-beban hutang) sebenarnya adalah minus US\$ 303 per tahun alias tekor. Artinya setiap bayi Indonesia yang lahir sudah memikul hutang sebesar US\$ 303 per tahun.<sup>16</sup>

Yang jelas negara dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia harus selalu memberikan perhatian lebih pada arus modal masuk dan sentimen pasar. Ketergantungan yang berasal dari luar negeri akan membuat ekonomi makro rentan terhadap guncangan eksternal. Modal yang masuk memberikan dampak keuntungan terutama arus modal jangka panjang khususnya foreign direct investment. Namun dalam jangka pendek akan menimbulkan kesulitan pada kebijakan moneter, terutama pada devisa transaksi berjalan yang besar.

Tidaklah mudah jika memperoleh jalan keluar dari problem arus modal tapi lebih mudah jika kebijakan fiskal diterapkan secara ketat. Ekonomi makro yang mantap memang harus terus diperhatikan. Bagaimanapun juga, kesenjangan dalam bentuk visualisasi kinerja ekonomi yang kontradiktif akan bertumpu pada kecakapan kita memadukan kemajuan dan kesanggupan mengelola tantangan yang muncul, baik dari segi ekonomi maupun sosial politik.<sup>17</sup>

### 3.2 Kemampuan Sumber Daya Manusia

Laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja Indonesia masih dipandang tinggi. Dalam periode 1961-1971, penduduk telah bertambah dengan 2,1% per tahun dan selama periode 1971-1980 bertambah 2,3% setahun. Dalam periode 1980-1990, pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi sekitar 2% setahun.

<sup>16</sup> Topatimasang Rocm (ed), op. cit, hal. 56.

<sup>17</sup> Peningkatan Daya Saing dan Efektifitas Birokrasi, BISNIS INDONESIA, 7 Juni 1996.



Sedangkan periode 1990-1995 turun menjadi 1,7% setahun dan dalam periode 1995-2000 pertumbuhan penduduk diperkirakan 1,5% setahun.

Dengan laju pertumbuhan seperti itu penduduk Indonesia bertambah dari 179,3 juta orang pada tahun 1990, menjadi sekitar 210 juta orang pada tahun 2000. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk tersebut angkatan kerja juga bertambah dari 76,6 juta orang pada tahun 1990, menjadi sekitar 97 juta orang pada tahun 2000. Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia pada umumnya rendah. Dalam tahun 1998, dari 92,7 juta angkatan kerja (berumur 15 tahun ke atas), masih terdapat 24,8 juta orang atau 26,8% yang tidak tamat SD. 36,4% tamat SD, 14,2% tamat SLTP, 18,4% tamat SLTA, 2% lulusan diploma dan baru 2,2% sarjana.

Tabel 3. 6 Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 1990-1998

Tahun pendidikan	1990		1995		1998	
	(ribu)	%	(ribu)	%	(ribu)	%
Tidak tamat SD	31 914,4	44,5	29 126,6	34,6	24 846,8	26,8
SD	22 243,1	31,0	27 339,7	32,4	33 772,6	36,4
SLTP	6 760,8	9,4	10 015,0	11,9	13 182,4	14,2
SLTA	9 006,2	12,6	14 476,1	17,2	17 023,8	18,4
Diploma	886,2	1,3	1 485,8	1,8	1 827,7	2,0
Sarjana	886,1	1,2	1 786,9	2,1	2 081,6	2,2
Jumlah	71 676,8	100,0	84 230,1	100,0	92 734,9	100,0

Sumber: Depnaker<sup>18</sup>

Tingkat pengangguran tenaga kerja Indonesia relatif masih rendah. Dalam tahun 1998, jumlah penduduk diperkirakan 200 juta orang. Diantaranya sekitar 138,5 juta orang tenaga kerja yaitu penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja yaitu mereka yang memasuki pasar kerja baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan berjumlah hanya 92,7 juta orang. Yang mencari pekerjaan berjumlah 5 juta orang atau 5,5% dari angkatan kerja, dinamakan juga penganggur terbuka. Ini berarti bahwa hanya 87,7 juta orang penduduk yang tergolong bekerja menghidupi 200 juta orang penduduk, atau 2 orang pekerja menghidupi 5 orang penduduk.

<sup>18</sup> Pemerintah Tidak Sigap Atasi Pengangguran, KOMPAS, 26 Februari 2000.



diantara pekerja tersebut, terdapat 30,2 juta orang atau 32,4% digolongkan sebagai setengah penganggur karena bekerja kurang dari 35 jam seminggu, baik karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia maupun karena kemauan sendiri. Tingkat setengah penganggur kebanyakan berada di desa dari pada kota, antara lain karena keterbatasan lahan tanah di desa dan faktor musim kerja.

Rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja tercermin pada kecilnya proporsi penduduk yang bekerja, tingginya tingkat penganggur, dan setengah penganggur, serta rendahnya tingkat produktivitas dan penghasilan keluarga. Dalam kurun waktu 1985-1998 pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi yaitu 3,1% per tahun sementara pertumbuhan kesempatan kerja sangat rendah yaitu hanya 2,3 % per tahun.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan akan berpengaruh terhadap rata-rata upah yang diterima. Hasil survai terhadap angkatan kerja yang dilakukan BPS tahun 1998 menunjukkan rata-rata upah untuk yang berpendidikan universitas empat kali lebih besar dibanding dengan yang berpendidikan dibawah SD. Sedangkan dari jenis lapangan pekerjaan, sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja paling besar ternyata rata-rata upahnya adalah paling rendah kemudian diikuti sektor industri. Upah tertinggi diperoleh mereka yang bekerja di sektor keuangan. Secara keseluruhan sektor, upah tenaga kerja wanita lebih rendah dari pada pria.

Tabel 3. 7 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan pekerjaan dan Jenis Kelamin, 1998 (ribu)

Lapangan pekerjaan	Pria	%	Wanita	%	Total	%
Pertanian	23 871, 3	44, 3	15 543, 5	46, 0	39 414, 8	45, 0
Pertambangan	573, 9	1, 1	100, 7	0, 3	674, 6	0, 8
Industri	5 482, 4	10, 2	4 451, 2	13, 2	9 933, 6	11, 3
Lisrtik, gas, air	131, 1	0, 2	16, 8	0, 0	147, 8	0, 2
Bangunan	3 385, 9	6, 3	135, 8	0, 4	3 521, 7	4, 0
Perdagangan	8 244, 1	15, 3	8 570, 2	25, 4	16 814, 2	19, 2
Angkutan	4 023, 6	7, 5	130, 2	0, 4	4 153, 7	4, 7
Keuangan	411, 9	0, 8	205, 8	0, 6	617, 7	0, 7
Jasa-jasa	7 775, 3	14, 4	4 619, 0	13, 7	12 394, 3	14, 1
Lainnya	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Total	53 899, 4	100, 0	33 773, 0	100, 0	87 672, 4	100, 0

Sumber: BPS, Ulasan ringkas survei angkatan kerja nasional 1998



Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu tiap sektor sampai tahun 1998 sektor pertanian masih dinilai dominan dalam menyerap tenaga kerja yakni sebesar lebih dari sepertiga dari total tenaga kerja yang ada. Dikuti sektor perdagangan kemudian jasa. Sektor industri menempati urutan keempat dengan jumlah tenaga kerja wanita lebih besar dari pada pria. Demikian pula yang terjadi di sektor pertanian dan perdagangan.

Selama PJP I, share sektor industri memang mengalami pertumbuhan tetapi hal itu tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja secara proporsional. Proporsi angkatan kerja yang diserap sektor industri pengolahan hanya tumbuh dari 9% menjadi 12%.<sup>19</sup> Situasi kian menyedihkan ketika terjadi fakta ironis, pertumbuhan sektor industri manufaktur yang tinggi tersebut justru lebih memberikan kesempatan kepada pekerja asing untuk mendapat upah yang baik.

Seiring dengan meningkatnya jumlah proyek dan volume nasional investasi asing (PMA) di Indonesia, TKA (tenaga kerja asing) yang berdatangan ke Indonesia. Pada tahun 1995 tercatat resmi lebih dari 57.000 TKA yang bekerja di Indonesia. Angka tersebut, merupakan peningkatan sebesar 37% dari tahun sebelumnya.<sup>20</sup> Booming TKA tersebut merupakan bukti bahwa perusahaan industri dan jasa gagal mendapatkan pekerja sesuai spesifikasi yang mereka inginkan dari pasar faktor produksi tenaga kerja domestik.

Pergeseran sektor ekonomi yang terjadi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sektor industri yang memiliki efek multiplier terhadap sektor-sektor lain, sehingga sektor industri tidak hanya membuka lapangan kerja bagi sektornya sendiri, akhirnya tidak terwujud. Sektor industri manufaktur gagal dalam menyerap angkatan kerja minimal setara dengan tingkat pertumbuhannya.

Juga dalam melaksanakan pembangunan semaksimal mungkin menghindari upaya pengusuran masyarakat. Sebisa mungkin mereka ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek. Untuk bisa mengikutsertakan mereka diperlukan adanya bimbingan dan peningkatan kompetensi sampai mereka benar-benar

<sup>19</sup> Tenaga Kerja dalam Transformasi, BISNIS INDONESIA, 9 Juli 1996.

<sup>20</sup> Tenaga Kerja dalam Transformasi, loc. cit.



memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Industrialisasi harus lebih arif dalam melihat kenyataan yang berkembang di masyarakat apabila dalam iklim liberalisasi ekonomi yang menekankan pentingnya efisiensi dan daya saing.

Struktur industri yang terkonsentrasi dan tidak efisien sering menimbulkan kerawanan dalam ketahanan ekonomi dalam menghadapi persaingan maupun guncangan yang bersifat eksternal. Struktur tersebut juga menimbulkan kecemburuan sosial dan ketimpangan yang sangat besar antara kelompok kecil pengusaha dengan mayoritas pelaku industri lainnya. Peran perusahaan kecil dalam penyerapan tenaga kerja yang begitu besar merupakan hal yang membanggakan. Namun perusahaan besar (padat modal dan berteknologi tinggi) sangat terbatas dalam penyerapan tenaga kerja.

Situasi tersebut menguatkan pendapat mengenai pentingnya investasi sumber daya manusia yang tidak kalah dengan investasi sarana dan prasarana fisik lainnya. Sedangkan Indonesia yang dikenal dengan negara yang berpenduduk paling besar di ASEAN, sumber daya manusia-nya bukan yang tertinggi diantara negara-negara tersebut. Hal itu dikarenakan masih adanya kondisi yang menjadi faktor penghambat dalam masyarakat kita yakni,

1. Jumlah penduduk yang besar seharusnya menjadi modal dasar berharga tetapi hal itu belum efektif
2. Struktur masyarakat yang berpola agraris, hanya didaerah perkotaan yang sudah mulai berkembang budaya industri
3. Banyak masyarakat yang masih berfikir tradisional, belum terpenggil untuk bekerja keras, tidak disiplin, lebih emosional dari pada rasional dan tidak terdorong untuk berprestasi tinggi. Masalah etos kerja belum menjadi budaya Indonesia. Masyarakat masih memandang kerja hanya sebagai usaha "mencari nafkah" bukan untuk "berprestasi". Cara seperti itu sudah tentu tidak efisien karena usaha dirasa cukup kalau nafkah terpenuhi dan tidak ada lagi usaha untuk meningkatkan kualitas kerja.



4. Tingkat pendidikan yang masih rendah dan sistem pendidikan kita belum menyiapkan manusia yang bernaluri teknologi.<sup>21</sup>

Selama ini masyarakat kita juga dikenal mempunyai sifat-sifat baik seperti kegotong royongan yang tinggi, toleransi dan lain-lain. Namun disamping itu kita juga dikenal sebagai orang-orang yang masih lekat budaya priyayinya, kurang mandiri, demonstration effect, mudah panik, kurang responsif terhadap perubahan, kurang berani menanggung resiko, etos kerja rendah dan kurang menghargai waktu.<sup>22</sup> Sifat-sifat tersebut sangat melekat pada masyarakat agraris dan sudah tentu kurang menguntungkan dalam mendukung timbulnya kewirausahaan di Indonesia.

Secara umum masalah yang dihadapi adalah tantangan budaya karena yang harus kita rombak adalah budaya. Untuk mengimbangi revolusi teknologi yang diperlukan adalah revolusi budaya. Sehingga dapat diwujudkan manusia Indonesia masa depan yaitu, yang memiliki idealisme kuat, manusia profesional yang mampu memberi sumbangan berarti bagi masyarakatnya.

Menurut hasil Laporan Pembangunan Indonesia (Human Development Report) 1997 yang disusun oleh PBB (UNDP), menunjukkan Indonesia beradapada posisi ke 23 dari 78 negara berkembang. Indikatornya adalah masih ada 20. 8% penduduk dewasa yang buta aksara, tidak memiliki akses pelayanan kesehatan dan air bersih serta berat badan anak balita yang rendah. Bahkan Indonesia di tahun 1996 berada di urutan 102, di tahun 1997 baru bergeser ke posisi 99.<sup>23</sup>

Dari situ tampak pentingnya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Hanya dengan tenaga kerja yang sehat, produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Dengan demikian usaha-usaha untuk memperbanyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tenaga medis dan penyediaan peralatan kesehatan perlu terus dilaksanakan. Sejalan dengan hal

<sup>21</sup> Ginanjar Kartasmita, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Martabat dan Kualitas Manusia di dalam Persaingan Global, Analisis CSIS, th. XX no. 1, Januari-Februari 1991, hal. 17.

<sup>22</sup> Miyasto, Krisis Ekonomi dan Implikasinya Bagi Perkoomian Indonesia dalam Profil Indonesia, Journal tahunan CIDES no. 4/ 1998-1999, Jakarta, 1999, hal. 58.

<sup>23</sup> KOMPAS, Juni 1997.



tersebut pengembangan asuransi kesehatan perlu mendapat perhatian dengan mengikutsertakan pihak swasta.

Selain masalah budaya dan kesehatan, dibalik problem ketenagakerjaan, faktor pendidikan yang paling sering dipersoalkan. Dunia usaha (sektor industri manufaktur) cenderung menyalahkan dunia pendidikan (formal maupun informal) yang kurang antisipatif terhadap kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain dunia pendidikan selain masih merasakan idealisme sebagai "belenggu" yang menghambat langkah menuju pragmatisme juga kurang begitu responsif terhadap perubahan eksternal yang mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi tenaga kerja.<sup>24</sup>

Tingkat pendidikan yang relatif rendah tentu saja kurang memadai untuk mendukung industrialisasi, sebuah proses pembangunan ekonomi yang justru menuntut tenaga-tenaga terdidik dan terampil. Di samping itu bila diingat bahwa industrialisasi dicirikan antara lain dengan spesialisasi kerja yang dalam, maka bukan hanya tenaga-tenaga terdidik dan terampil tetapi juga dibutuhkan tenaga spesialisasi dengan berbagai macam bidang kejuruan. Disamping itu penguasaan bahasa asing juga masih merupakan kendala, sehingga pemindahan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lambat.

Kemudian selain pengembangan kualitas, tenaga kerja juga perlu diorganisir dengan baik. Bila dibandingkan dengan organisasi tenaga kerja di negara-negara maju, kebanyakan di negara Dunia III relatif lemah sehingga perolehan produktivitas hanya dinikmati oleh manajemen berupa keuntungan atau dinikmati konsumen berupa harga yang lebih murah.

Semakin maju negara-negara, sumbangan sumber daya alam akan semakin kecil, secara total sumbangan finansial relatif tetap dan peranan sumber daya manusia meningkat. Dengan begitu semakin disadari betapa dan strategisnya penguatan sumber daya manusia di tengah era globalisasi. Karena pada akhirnya manusialah yang menggerakkan seluruh dinamika dengan intelegensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Peranan sumber daya alam sebagai faktor

<sup>24</sup> Tenaga Kerja dalam Transformasi, loc. cit.



keunggulan untuk persaingan, digantikan oleh teknologi, dan teknologi adalah hasil akal budi manusia. Jelaslah bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci bagi perbaikan jangka panjang dalam kemampuan bersaing dan pemerataan yang lebih baik.<sup>25</sup>

### 3.3 Alih Teknologi di Indonesia

Perkembangan teknologi, menjadikan sumber daya alam menjadi tidak lagi dominan dalam kehidupan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang menggunakan sumber daya alam sebagai modal utamanya, sekarang tidak dapat lagi mengandalkan diri hanya sebagai produsen sumber daya alam semata-mata. Kemakmuran dan kesejahteraan bisa terwujud lewat persaingan, dan untuk bisa bersaing harus mempunyai kekhususan atau keunikan yang bisa diandalkan. Dengan begitu maka muncul spesialisasi. Dengan spesialisasi kegiatan riset dan pengembangan akan semakin terpacu. Sehingga memungkinkan terjadinya proses pembaharuan teknologi dan inovasi yang berkesinambungan, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu.<sup>26</sup>

Di negara kita sebagai wilayah kepulauan, dilema dualisme teknologis cukup menonjol, karena adanya ketidakserasian antara lokasi penduduk dengan lokasi sumber daya alam. Sebagian besar penduduk berpusat di Jawa. Kenyataan ini menimbulkan kecenderungan di Jawa berkembang industri yang didasarkan atas peranan tenaga kerja. Sedangkan di luar Jawa, berkembang industri yang bersifat padat modal dengan penggunaan teknologi maju. Pentingnya pengembangan industri pengolahan di luar Jawa bagi bahan pertanian dalam arti luas (perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hortikultura) yaitu agro based industries yang akan berperan strategis dalam menjembatani dualisme teknologis yang ada. Sebab agro based industries memenuhi persyaratan yang

<sup>25</sup> Meningkatkan Efisiensi dan Pemerataan, BISNIS INDONESIA, 8 Juli 1996.

<sup>26</sup> Faisal H. Basri, *Indonesia di Tengah Derap Globalisasi dan Perubahan Lingkungan Internasional dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 165.



penting dalam perekonomian Indonesia seperti, penggunaan bahan setempat, lapangan kerja produktif, nilai tambah, sumber pertumbuhan devisa.<sup>27</sup>

Beberapa barang konsumsi seharusnya dapat diproduksi sendiri dengan biaya yang jauh lebih murah, tidak perlu diimpor. Kita akan terhenyak begitu melihat barang konsumsi yang menyangkut produk pertanian ternyata juga harus diimpor. Padahal, kalau lahan di Indonesia dikembangkan untuk produk tersebut dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, bukan saja dapat menekan arus impor, melainkan juga meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.

Pada dasarnya, teknologi yang digunakan akan tergantung pada jenis produksi yang dihasilkan. Industri hulu, misalnya akan menggunakan teknologi yang padat modal. Sementara itu, industri perakitan akan selalu lebih bersifat padat karya. Ini terjadi di semua industri, termasuk tekstil yang selama ini dikenal sebagai industri yang paling padat karya.

Sedangkan industri pengolahan di sektor hilir di Indonesia terdapat kecenderungan yang umum, yakni akan mengarah kepada penggunaan teknologi yang bersifat lebih padat modal. Penyebabnya adalah:

1. Kurangnya research and development sehingga hampir tidak ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan masih mengandalkan mesin impor yang mengandung teknologi padat modal
2. Sejalan dengan liberalisasi perdagangan dan kenaikan pendapatan per kapita penduduk, pasar akan semakin menuntut kualitas. Implikasinya, industri dituntut lebih banyak menggunakan sumber daya manusia berkualitas tinggi
3. Alat bantu perangkat elektronik yang semakin maju, kian banyak digunakan oleh sektor industri. Otomatis hal itu mengurangi penggunaan tenaga kerja.<sup>28</sup>

Teknologi memudahkan terjadinya proses perubahan dalam setiap manusia. Persoalannya bukan lagi menyediakan peralatan produksi yang lebih efisien bagi manusia tetapi mengantikan secara progresif pekerjaan manusia dalam industri dengan mesin-mesin yang mampu memberi informasi, yang kemudian

---

<sup>27</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 189.

<sup>28</sup> Arah Reformasi Sektor Industri Manufaktur, *BISNIS INDONESIA*, 6 September 1996.





akan mampu memproduksi dengan lebih cepat dan lebih murah dan yang juga mampu membuat pekerjaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh manusia. Perubahan ini membawa penyesuaian kepada bentuk pekerjaan manusia. Walaupun keterlibatan manusia dalam memproduksi menjadi kecil, revolusi teknologi melahirkan berbagai lapangan kerja baru yang mendukung teknologi yang dilandasi informasi.<sup>29</sup>

Pengembangan teknologi tergantung dari ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Dapat dikatakan bahwa dua hal tersebut merupakan landasan dasar bagi teknologi yang dapat membawa manfaat untuk pembangunan masyarakat secara luas. Ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi merupakan tiga mata rantai kegiatan yang di dalamnya saling berinteraksi secara terus menerus dalam proses perkembangannya. Agar interaksi tersebut bisa berlangsung secara mamadai, faktor pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan. Untuk tahap berikutnya, hasil teknologi memerlukan sistem dokumentasi dan informasi sebagai wahana penyebarannya, sehingga dapat membawa dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam proses industri, teknologi adalah faktor kunci. Teknologi merupakan hasil penelitian dan pengembangan, sehingga kemajuannya sangat erat dengan tersedianya dana untuk penelitian dan pengembangan. Tidak mungkin dalam mengejar ketinggalan kita dibidang teknologi dilakukan dengan cara mengembangkan sendiri teknologi di bidang tertentu. Karena itu, amat penting untuk meningkatkan alih teknologi dari negara maju. Akan tetapi aspek teknologi adalah aspek yang paling kompleks dalam proses industrialisasi sehingga merupakan hal yang wajar jika negara-negara maju lebih berminat untuk menjual hasil produknya ke negara kita dari pada menerima royalties dari proses pembuatan hasil produksi di Indonesia.

Teknologi hasil penemuan yang bersumber pada penelitian yang dikembangkan negara-negara maju, dalam banyak hal masih harus dikaji dan

<sup>29</sup> Ginanjar K, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Martabat dan Kualitas Manusia dalam Persaingan Global*, Analisis CSIS th XX no. 1 Januari-Februari 1991, hal. 13.

<sup>30</sup> Arah Reformasi Industri Manufaktur, op. cit, hal. 234.



diolah lebih lanjut, disesuaikan dan diserasikan dengan perimbangan keadaan masyarakat. Proses adaptasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan pokok:

1. Nilai tambah yang diperoleh
2. Penggunaan bahan atau materi setempat
3. Kesempatan kerja produktif
4. Dampak pengaruhnya terhadap naraca pembayaran luar negeri dengan adanya penambahan penerimaan devisa dan
5. Penghematan dalam penggunaan.<sup>31</sup>

Cara penyerapan teknologi sendiri sangat penting diperhatikan kondisi teknologi serta kondisi masyarakat penyerap sering sangat menentukan keserasian keduanya perlu tertata secara tepat dan terpadu supaya lompatan-lompatan teknologi menjadi lebih dimungkinkan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa dapat diterapkan menimbulkan kekecewaan dan kemajuan teknologi tanpa diikuti kemajuan ilmu pengetahuan akan kehilangan kelanggengan atau tidak mampu bersaing dalam jangka panjang.<sup>32</sup>

Proses perolehan teknologi melibatkan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan antara lain meliputi: identifikasi kebutuhan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi. Perolehan informasi dan adanya sumber teknologi alternatif, termasuk sumber-sumber teknologi di dalam negeri, proses pengembangan informasi tentang teknologi kepada pemakai-pemakai potensial, evaluasi dan pemilihan dari berbagai teknologi yang sesuai, analisis dari paket-paket teknologi supaya dapat diadakan penilaian atas biaya dan komponen dalam paket tersebut, negosiasi dengan syarat dan kondisi yang paling baik, adaptasi dan penyerapan teknologi impor, eksploitasi dari teknologi tersebut dan pembangunan hasil-hasil eksploitasi tersebut secara maksimal dalam berbagai sektor ekonomi.

---

<sup>31</sup> *ibid*, hal. 237.

<sup>32</sup> Sabana Kartasasmita, *Kecenderungan dan Globalisasi Ekonomi, Analisis CSIS th. XX no. 3, Mei-Juni 1991*, hal. 225.



Pihak penerima teknologi potensial di negara berkembang seringkali mengalami hambatan yang cukup serius di dalam transaksi alih teknologi dengan pemilik atau pemegang teknologi dari negara maju. Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari,

1. Hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi
2. Hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan ketrampilan pihak negara penerima teknologi tersebut
3. Hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif di negara maju dan atau di negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi dan perolehannya bagi pihak penerima teknologi di negara berkembang
4. Berupa hambatan sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang, terutama dalam menemukan faktor-faktor yang menentukan harga yang layak.<sup>33</sup>

Kecmpat hambatan tersebut sifatnya masih umum, sebab secara rinci dapat diungkapkan problem-problem mendasar yang berkaitan dengan proses alih teknologi itu seperti: ketergantungan teknologi pada negara maju, kurangnya informasi dan alih teknologi di negara berkembang, lemahnya kemampuan negosiasi alih teknologi dan belum mantapnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi teknologi termasuk peranan pemerintah dalam kegiatan alih teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan implikasinya dalam alih teknologi bagi Indonesia ada dua hal yang perlu diperhatikan: teknologi yang berkembang yang makin menjauhkan negara berkembang dengan negara maju dalam memperoleh teknologi karena menuntut biaya, keahlian dan kapabilitas nasional yang makin mantap, juga dalam proses alih teknologi sendiri yang semakin canggih yang harus diikuti. Seberapa jauh perpacuan perkembangan iptek dan upaya alih teknologinya bagi negara berkembang akan selalu menjadi permasalahan.

---

<sup>33</sup> Sumantoro, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hal. 26.



Orientasi umum yang perlu dipegang negara sedang berkembang adalah bahwa teknologi dibuat oleh manusia sebagai alat meningkatkan kemampuan manusia secara fisik dan mental dengan ciri-ciri:

1. Merubah sumber alam menjadi barang yang berguna
2. Alat untuk merubah lingkungan menjadi berguna
3. Sumber untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan
4. Sarana perubahan sosial
5. Unsur penting dalam memperlancar pembangunan
6. Komoditi yang dapat diperjualbelikan di pasar (nasional atau internasional).

Sehingga teknologi di sini mengandung pengertian sebagai kombinasi piranti lunak dan piranti luas.<sup>34</sup>

Permasalahan substansi dalam alih teknologi dialami di hampir semua negara. Secara hakikat ada empat pihak yang terlibat permasalahan alih teknologi yaitu pada:

1. Pihak penerima
2. Pihak pemberi
3. Aspek teknologi sendiri
4. Peranan pemerintah.

Masing-masing masalah dihadapi dalam proses alih teknologi oleh semua negara. Secara menyeluruh masalah tersebut terkait dengan segi-segi pengaturan keuangan atau finansial, negosiasi dan negosiasi kembali, aspek-aspek teknis, bentuk-bentuk organisasi dan mekanisme dari alih teknologi itu. Karena teknologi diperlukan untuk pengembangan industrialisasi khususnya bagi negara berkembang maka dalam proses pengaturan alih teknologi tersebut perlu melihat cakupannya, yaitu:

1. Penciptaan iklim yang menarik dan menguntungkan untuk kegiatan alih teknologi
2. Memberikan keuntungan yang timbal balik bagi pihak penerima dan pemberi
3. Mendorong dan memberi kemudahan dalam alih teknologi

---

<sup>34</sup> *ibid*, hal. 29.



4. Menggunakan prinsip syarat dan kondisi yang adil dan objektif yang disepakati secara timbal balik
5. memperhatikan prinsip dan tujuan dari norma internasional
6. Memperhatikan kondisi lokal yang bersangkutan, sifat teknologi serta lingkup kegiatannya
7. secara konsisten pemerintah mengikuti proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan hukum internasional.

Sudah barang tentu, untuk aplikasinya masing-masing negara perlu menyesuaikan, termasuk dalam penetapan kelembagaannya, prosedurnya, dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip dan tujuan dari norma alih teknologi yang umum diterima.

Bagi negara berkembang kepentingan untuk memperoleh teknologi dari luar timbul sebagai proses hukum ekonomi yang bukan saja prinsip-prinsip umum dari hukum atau peraturan hak milik industri dan bukan juga masalah peraturan anti trust yang dapat memberi pemecahan yang mantap bagi negara berkembang. Negara berkembang umumnya menggunakan kategori konsep hukum secara tradisional. Di negara industri pada umumnya, alih teknologi diatur dalam hak milik industri dan anti trust. Dua perangkat hukum tersebut didasarkan pada ketentuan fundamental yaitu:

1. Hukum hak milik perindustrian dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap temuan dan hak-hak yang terkait
2. Hukum anti trust disusun untuk melaksanakan dan melindungi persaingan di pasar.

Pengaturan alih teknologi di negara berkembang dengan taupa mempertentangkan dengan tujuan-tujuan tersebut di atas, pada umumnya disusun untuk mendorong aliran teknologi dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kapasitas nasional sebagai pihak penerima teknologi dengan syarat dan kondisi yang paling baik dengan tujuan akhirnya yaitu meningkatkan kapabilitas teknologi nasional di negaranya.



Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan alih teknologi yang khusus, sementara UU Paten baru diterbitkan namun belum tuntas dilaksanakan. Hal ini bukan berarti alih teknologi tidak berlangsung. Selama ini alih teknologi disalurkan melalui sarana hukum UU PMA, UU PMDN, hukum kontrak atau perjanjian antar pihak (lisensi atau bentuk lainnya). Dalam UU PMA teknologi masuk dalam kategori modal yang dibawa pihak penanam modal asing. Dalam pengertian itu dalam lingkup UU PMDN, unsur asing yang dibawa dalam kegiatan itu dapat melalui pengertian lainnya seperti pada UU PMA atau melalui sarana hukum yang lainnya. Pendekatan perpajakan, pengendalian devisa atas teknologi dan imbalannya serta pengaturan proses alih teknologi dalam hal ini keahlian, training dan sebagainya merupakan paket yang senantiasa di pertimbangkan.

Teknologi dapat diperoleh melalui saluran yaitu:

1. Penanaman modal asing baik langsung melalui perusahaan cabang ataupun dengan mengadakan usaha patungan/ joint venture
2. Perolehan lisensi teknologi, baik yang dipatenkan ataupun yang tidak, kepada perusahaan asing cabang atau perusahaan yang tidak ada kaitan dengan induknya.

Penanaman modal langsung biasanya lebih disenangi terutama jika teknologinya dapat langsung disertakan sebagai sehingga dapat mencegah ditiru oleh pesaing yang potensial. Dalam pada itu telah diamati bahwa di negara berkembang perlindungan yang efektif justru merupakan iklim yang dikehendaki oleh perusahaan asing, dalam mentransfer produksi ke negara berkembang sebagai sarana perlindungan pasar dimana produk mereka telah ada di dalamnya.

Kendati penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu sumber terpenting penguasaan teknologi, terdapat dua pola dalam penguasaan teknologi di Asia Pasifik dalam kaitannya dengan PMA yakni,

1. Dengan menjaga jarak atau membatasi kegiatan PMA di suatu negara (Jepang, Korea, Taiwan) dengan tujuan untuk meningkatkan posisi tawar menawar perusahaan lokal terhadap perusahaan asing



2. Menarik dan merangkul PMA untuk memanfaatkan teknologi yang mereka miliki (Singapura).

Indonesia yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan menghadapi angkatan kerja yang besar tentu menghadapi kendala untuk menerapkan strategi pertama. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menarik manfaat sebesar-besarnya dari kehadiran PMA ataupun jenis keterkaitan asing lainnya seperti lisensi teknologi, hubungan subkontrak, hubungan pemasok dan seterusnya di Indonesia.<sup>35</sup>

Tujuan dasar pengembangan teknologi haruslah pada pembangunan kemandirian teknologi atau dengan kata lain melepaskan diri dari ketergantungan teknologi. Oleh sebab itu sangat penting untuk melaksanakan atau mengembangkan R & D nasional, bersamaan dengan menyelenggarakan teknologi impor. Sebab tidak akan mampu melepaskan diri dari ketergantungan apabila belum mampu menemukan dan mengembangkan sendiri teknologi-teknologi impor tersebut.

Pembangunan bidang industri merupakan salah satu faktor pendukung kemantapan pertumbuhan ekonomi nasional. Program pembangunan industri atau industrialisasi dapat menciptakan perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan. Pengembangan industri senantiasa ditingkatkan untuk dapat mengolah bahan baku menjadi barang jadi di sektor pertanian maupun pertambangan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari potensi SDA dan energi nasional yang ada. Percepatan pertumbuhan industri dapat dilakukan dengan mengimpor teknologi dari luar yang memungkinkan dalam kondisi ekonomi nasional yang semakin baik. Dalam rangka ini perlu disadari akan timbulnya masalah dan tanggapan dalam proses industrialisasi itu sendiri yaitu usaha pemantapan pertumbuhan teknologi nasional dapat menimbulkan kesenjangan yang dapat semakin lebar antara potensi iptek yang ada dengan tujuan kebutuhan iptek yang diperlukan dalam proses industrialisasi tersebut. Untuk itu

---

<sup>35</sup> Mari Pangestu, Raymond A dan Julius M (ed), Transformasi industri Indonesia di Era Perdagangan Bebas, CSIS, Jakarta, 1996, hal. 302.



kita perlu melihat potensi bidang-bidang industri yang diperkirakan akan berkembang terus dalam jangka panjang seperti industri pengolah hasil pertanian, transportasi, konstruksi, pengolahan SDA dan energi, peralatan dan mesin produksi beserta industri untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Sementara itu kemampuan teknologi suatu bangsa dapat dilihat pada dua tingkat, kemampuan teknologi pada tingkat perusahaan dan kemampuan teknologi pada tingkat nasional.<sup>36</sup> Dalam suatu kajian mengenai kemampuan teknologi manufaktur di Thailand yang dilakukan Thailand Development Research Institute (TDRI), kemampuan teknologi industrial suatu perusahaan manufaktur dibedakan menurut empat tingkat yaitu:

1. Kemampuan akuisitif, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk mencari, menilai, mengadakan negoisasi dengan pemasok teknologi, dan memperoleh teknologi yang relevan serta membangun dan menilai fasilitas produksinya
2. Kemampuan operasional, meliputi kemampuan akuisitif ditambah dengan kemampuan untuk menjalankan proses produksinya, termasuk perlengkapan mesin, secara efisien
3. Kemampuan adaptif, adalah kemampuan penambahan kemampuan penambahan pengetahuan dan pencerahan teknologi yang telah digunakan dan pula kemampuan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian yang kecil pada teknologi proses produksi maupun teknologi produk yang lebih cocok dengan kondisi setempat atau khas masyarakat setempat
4. Kemampuan inovasi, adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan perubahan atau terobosan yang fundamental dalam teknologi proses produksi yang digunakan dalam produk yang dihasilkan.<sup>37</sup>

Penguasaan teknologi bukan saja mengacu pada teknologi proses produksi tetapi pada teknologi produk. Teknologi proses produksi pada teknologi yang digunakan sebagai masukan oleh suatu perusahaan dan meliputi sarana perangkat

---

<sup>36</sup> *ibid*, hal. 198.

<sup>37</sup> *ibid*, hal. 199.



keras maupun sistem dan pengetahuan mengenai pengoperasian dan pengelolaan proses produksi suatu perusahaan. Dengan demikian maka *penguasaan teknologi proses produksi* adalah kemampuan untuk membuat suatu barang tertentu pada suatu tingkat biaya, mutu, dan jadwal penyerahan tertentu. Di lain pihak, kemampuan teknologi produk mengacu pada teknologi yang tertuang dalam keluaran suatu perusahaan, dan meliputi barang-barang atau produk intelektual, seperti perangkat lunak. Dengan demikian *kemampuan teknologi* adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, merinci, merancang, dan mengembangkan suatu barang yang berharga bagi para pembelinya.<sup>38</sup>

Agaknya penting untuk membedakan antara kemampuan teknologi proses produksi dan kemampuan teknologi produk, karena kemampuan dan tugas manajemen yang diperlukan untuk kedua kategori kemampuan teknologi ini sangat berlainan. Misalnya kemampuan teknologi proses produksi meliputi kemampuan untuk memantau, menilai, dan memilih teknologi proses produksi yang akan digunakan perusahaan manufaktur, pengelolaan proses untuk memperoleh dan mengalihkan teknologi yang telah dipilih dan kemampuan menyesuaikan teknologi tersebut dengan keadaan setempat dan melatih para pekerja dalam penggunaan teknologi tersebut. Di lain pihak, kemampuan teknologi produksi memerlukan kualitas dan kemampuan untuk mengalihkan kebutuhan pembeli produksi akhir atau pemakai barang antara atau barang modal ke dalam pembuatan barang yang memang memerlukan pembeli atau pemakai barang tersebut.

Suatu kajian untuk UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pasific) mengungkapkan, kebanyakan perusahaan manufaktur Indonesia umumnya mempunyai kemampuan operasional yang cukup tinggi artinya mampu menjalankan proses produksi di pabrik secara lancar. Di lain pihak, kemampuan akuisitif dan adaptif perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia umumnya masih rendah. Meskipun demikian perusahaan nasional Indonesia dibandingkan perusahaan patungan, memiliki kemampuan akuisitif dan adaptif lebih besar. Pada perusahaan patungan beberapa kegiatan yang

---

<sup>38</sup> loc. cit.



memerlukan kemampuan akuisitif dan adaptif umumnya dilakukan oleh mitra asing dan tenaga ahli asing, sedang mitra dan tenaga ahli Indonesia umumnya kurang berperan. Oleh karena itu alih teknologi juga tidak berjalan lancar atau terbatas saja pada kemampuan operasional.<sup>39</sup>

Kemampuan inovatif perusahaan manufaktur Indonesia juga masih rendah, karena kegiatan laboratorium kecil yang dimiliki banyak perusahaan ini pada umumnya terbatas pada kegiatan uji coba bahan baku yang dipakai atau pengendalian mutu. Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan dalam arti yang sebenarnya tidak atau sangat sedikit dilakukakan. Pada perusahaan patungan, kegiatan litbang dilakukan di markas besar perusahaan transnasional karena mengulangi kegiatan litbang di anak perusahaannya di Indonesia tidak masuk akal dan kurang menguntungkan, baik ditinjau dari segi skala ekonomi maupun dari tenaga peneliti dan staf penunjang yang tersedia.

Kemampuan inovatif suatu perusahaan dipengaruhi oleh rangsangan baik yang berasal dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Masukan di dalam perusahaan dapat berasal dari bagian litbang, produksi, pemasaran atau bagian lainnya. sedang rangsangan di luar, bersumber dari pihak pembeli, pemasok, konsultan, maupun pihak lainnya (pemerintah maupun masyarakat).

Oleh karena itu inovatif dan penyempurnaan produk maupun proses produksi di negara maju sangat jarang dilakukan, mengingat perubahan sisi permintaan terus terjadi sejalan dengan meningkatnya pendapatan seseorang yang biasanya diikuti dengan perubahan selera dan gaya hidup.

Klasifikasi-klasifikasi lain mengenai kemampuan teknologi pada tingkat perusahaan digunakan suatu proyek penelitian yang sedang diselenggarakan oleh konferensi PBB untuk perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) dan bidang bantuan luar negeri Swedia (SAREC). Klasifikasi ini agak mirip dengan klasifikasi pertama, akan tetapi sedikit lebih luas. Klasifikasi kemampuan teknologi menurut proyek UNCTAD atau SAREC (1992) adalah:

---

<sup>39</sup> *ibid*, hal. 200.



1. Kemampuan investasi yang terdiri dari kemampuan pada tahap pra-investasi dan kemampuan dalam melaksanakan proyek
2. Kemampuan produksi
3. Kemampuan mengadakan pembangunan kecil dalam proses produksi atau produk yang dihasilkan
4. Kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan perusahaan manufaktur untuk memperoleh pengetahuan mengenai pola permintaan, arah perkembangan pasar, serta selera dan kebutuhan para calon pembeli di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kemampuan pemasaran ini sangat tergantung dari kemampuan perusahaan tersebut untuk menjalin hubungan baik dengan para pembelinya sehingga dapat mengetahui dengan segera kebutuhan mereka dan perubahan dalam permintaan mereka.
5. Kemampuan menciptakan kaitan, meliputi:
  - a) antar bagian dalam satu perusahaan tertentu
  - b) antar dua perusahaan yang berbeda
  - c) antar perusahaan dan institusi iptek
6. Kemampuan mengadakan perubahan besar dan mendasar dalam proses produksi atau produk yang dihasilkan.<sup>40</sup>

Temuan sementara di perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia memang mengungkapkan bahwa kemampuan teknologi kebanyakan perusahaan manufaktur Indonesia baru terbatas pada kemampuan satu sampai tiga sedang nomor empat lemah atau hampir tidak ada. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa industrialisasi di Indonesia hingga kini masih berada dalam tahap awal industrialisasi dibanding dengan negara-negara industri baru Asia Timur termasuk Korea dan Taiwan. Dalam ketiga kategori kemampuan teknologi tersebut, kemampuan berbagai perusahaan manufaktur Indonesia juga belum begitu memadai terutama perusahaan-perusahaan manufaktur masih berorientasi pada pasaran dalam negeri dimana tekanan-tekanan yang ada tidak begitu besar seperti di pasaran ekspor. Lebih lanjut, diberbagai usaha patungan, kemampuan investasi

---

<sup>40</sup> *ibid*, hal. 202.



untuk melakukan perubahan kecil dalam proses produksi atau produk agar lebih cocok dengan kondisi atau selera lokal pada umumnya belum atau tidak cukup dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia, karena keterbatasan kemampuan teknologi dari pekerja Indonesia. Dengan demikian kemampuan teknologi tersebut sering masih dilakukan oleh tenaga kerja asing.<sup>41</sup>

Menurut Lall (1992) dan Wong (1993), kemampuan teknologi nasional suatu negara berkembang ditentukan oleh tiga faktor:

1. Struktur insentif, khususnya insentif yang mendorong atau menghambat usaha perusahaan untuk menguasai teknologi, insentif ini umumnya ditentukan oleh struktur pasar produk dari faktor produksi
2. Kemampuan, yang meliputi negara tersebut termasuk tenaga, iptek serta kemampuan teknis dan organisatoris untuk menggunakan model di atas.
3. Lembaga-lembaga yang menetapkan permainan dalam bisnis atau melakukan campur tangan secara langsung dalam kehidupan ekonomi untuk mendorong usaha perusahaan manufaktur dalam menguasai teknologi seperti asosiasi-asosiasi industri, pusat latihan dan lain-lain.

Struktur insentif sangat ditentukan oleh kebijakan makro dan mikro ekonomi yang ditempuh pemerintah negara-negara berkembang secara garis besar dapat dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan makro yang cukup baik terutama pada periode pasca bonanza minyak bumi kedua, yaitu pada awal dasawarsa 1980-an. Kebijakan makro tersebut berhasil menciptakan stabilitas makro yang sangat penting bagi usaha-usaha produktif termasuk investasi jangka panjang.

Pemerintah Indonesia juga telah mengubah kebijakan perdagangan yang sebelumnya sangat proteksionistik ke arah yang lebih mendukung industri-industri berorientasi ekspor. Pembangunan tersebut didukung oleh serangkaian kebijakan deregulasi. Sehingga mengurangi hambatan-hambatan birokratis yang sebelumnya lebih banyak mendorong kegiatan "perburuan rente" yang sangat tidak produktif oleh sektor swasta.

---

<sup>41</sup> *ibid*, hal. 203.



Di sisi mikro, pemerintah Indonesia masih kurang melaksanakan kebijakan yang menunjang efisiensi seperti pemberian monopoli kepada suatu perusahaan tanpa alasan yang kuat. Kebijakan yang mendorong persaingan lebih sempurna di berbagai pasar produk dan pasar faktor produksi di Indonesia penting sekali mengingat bahwa berbagai kegiatan produktif di dalam negeri masih menghadapi berbagai kendala deregulatif. Dalam perdagangan internasional, berbagai pembatasan kuantitatif yang menyebabkan konsentrasi industrial yang tinggi dan penetapan harga tinggi oleh pemegang monopoli juga perlu dikoreksi.

Kemampuan nasional suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana, dan kualitas SDM yang tersedia, serta ketrampilan teknis organisatoris untuk menggunakan unsur di atas secara efektif dan efisien.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaan proses alih teknologi diperlukan kerjasama pemerintah dengan swasta. Pihak swasta berperan dalam meningkatkan ketrampilan untuk mengalihkan teknologi tersebut. Kemudian pemerintah berperan dalam pengaturan Undang-Undang manufakturing yang memungkinkan proses tersebut berlangsung secara konsisten dan lancar.

Adanya perubahan era globalisasi dan industri saat ini menuntut perusahaan mengadakan perubahan terhadap terknologi dan tetap berwawasan lingkungan serta memperhatikan sumber daya manusia yang ada dan kecepatan memperoleh informasi. Namun sayang, peralatan modern belum semuanya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala adalah kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan kebutuhan yang ada. Hal ini dapat digambarkan bahwa lulusan perguruan tinggi di negara kita ternyata sebagian besar belum mampu untuk menjadi tenaga kerja profesional yang mampu menciptakan nilai tambah di satu pihak dan di lain pihak, perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan bisnis, harus memiliki tenaga ahli yang profesional terampil, terdidik dan memiliki banyak pengalaman. Untuk itu pimpinan

---

<sup>42</sup> *ibid*, hal. 205.



perusahaan hendaknya selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya.

Globalisasi yang diiringi dominasi menjadikan negara-negara industri maju sebagai leader in technology, posisi ini sekaligus digunakan untuk mendapatkan faktor pertumbuhan yang diinginkan. Inovasi-inovasi sangat intensif sejalan dengan keunggulan teknologi sebagai andalan, menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi semakin padat teknologi dan dengan product life cycle yang semakin pendek. Industri sedang berkembang menjadi semakin jauh tertinggal. Maka semakin rendah tingkat teknologi semakin besarlah dampak pengaruh negatifnya yang sekaligus mempengaruhi neraca perdagangan.<sup>43</sup>

Tingkat industrialisasi yang dapat dicapai sangat tergantung pada kemampuan menyerap teknologi serta intensitas perlindungan yang diberikan kepada industri-industri tersebut dan dukungan lainnya. Bimbingan manajerial juga diperlukan karena industrialisasi memerlukan penyesuaian struktur dan penyesuaian sosial budaya.

Dalam pembangunan nasional jangka panjang tantangan pembangunan dan pembinaan potensi iptek merupakan persoalan tersendiri. Usaha kearah ini merupakan investasi jangka panjang yang tidak tampak tetapi memerlukan pengarahan yang tepat sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang sudah ada pada saat ini dan mengembangkannya untuk memenuhi tuntutan pembangunan di masa datang. Penetapan kebijakan beserta instrumen kebijakan yang memenuhi tuntutan pembangunan di masa datang. Penetapan kebijakan beserta instrumen kebijakkan yang mantap sangat diperlukan untuk suatu pertumbuhan yang optimal dan berdaya guna. Dalam kaitan ini maka pertumbuhan nasional sangat dipengaruhi oleh berhasilnya pembangunan nasional di satu pihak dan di pihak lain perkembangan pembangunan nasional juga membutuhkan kontribusi iptek tersebut. Maka ungkapan yang tepat dikemukakan adalah iptek merupakan sarana dan sekaligus menjadi sarana pembangunan nasional.

---

<sup>43</sup> Sabana Kartasmita, *op. cit.*, hal. 223.



### 3.4 Manajemen Dalam Sektor Industri

Seperti ditunjukkan oleh statistik bahwa dewasa ini komposisi industri di Indonesia berbentuk piramid, yaitu jumlah industri besar sangat sedikit dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Sedangkan jumlah industri kecil dan rumah tangga sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh wilayah terutama di pedesaan. Namun dengan jumlah sedikit atau sekitar 1% dari jumlah industri pengolahan yang ada, industri besar sangat dominan dalam mempengaruhi kondisi pertumbuhan dan statistik ekonomi. Hal ini terjadi karena mereka menguasai lebih dari 80% total nilai tambah yang dihasilkan sektor manufaktur, menguasai industri hulu (bahan baku) atau komoditas strategis dan menduduki posisi monopoli dan oligopoli.

Dengan menduduki posisi monopoli, pengusaha besar dapat dengan mudah menentukan tingkat harga serta besarnya pasokan yang akan dilempar ke pasar domestik. Mereka juga mudah mengadakan kesepakatan untuk menentukan harga bersama, sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya laju inflasi. Kasus semacam ini misalnya seperti yang terjadi pada harga semen, kertas, minyak goreng, dan kebutuhan lain. Seperti juga yang terjadi pada industri kimia di Indonesia yang mulai tumbuh dekade 1980-an, melalui pembangunan industri petrokimia, industri ini mempunyai hubungan kuat dengan hilirnya. Sekarang ini investasi di industri kimia begitu maraknya, namun kendala yang dihadapi adalah besarnya impor yang dilaksanakan, yaitu hampir 90% dan ini terjadi, karena sedikit yang bergerak di industri hulu sektor industri kimia, maka kepemilikannya cenderung bersifat monopoli. Kondisi demikian tentunya akan memperburuk struktur industri nasional dan jauh dari sifat ekonomi nasional yang efisien dan sehat. Dengan adanya praktek monopoli dan kartel, pasarpun terdistorsi.<sup>44</sup>

Banyak kalangan menyatakan bahwa posisi monopoli dan oligopoli diperoleh melalui kebijaksanaan proteksi dan subsidi dari pemerintah. Mereka dilindungi antara lain melalui ketentuan negative list of investment regulation. Yaitu tidak diperkenankan adanya investasi baru yang masuk pada sektor yang

---

<sup>44</sup> Kendala Ekspor Unggulan di Indonesia, loc. cit.



dikuasai oleh perusahaan besar dengan alasan keterbatasan pasar. Yang paling populer adanya pembatasan impor barang kebutuhan yang telah diproduksi mereka. Di samping itu mereka juga sangat diuntungkan oleh adanya:

1. Kebijakan tata niaga berupa komoditas strategis yang bertujuan untuk menstabilkan harga di dalam negeri
2. Hak penguasaan mengeksploitasi sumber daya alam
3. Kemudahan mendapatkan modal dalam jumlah besar dari bank pemerintah terutama pada masa boom minyak 1970-an.<sup>45</sup>

Sehingga kendala terbesar untuk melaksanakan program kemitraan antara pengusaha menengah atau kecil dengan pengusaha besar, sejauh ini terletak pada kemampuan pengusaha besar untuk mengorbankan sebagian keuntungan dan peluang yang dimiliki kepada pengusaha di bawah stratanya. Kebijakan kemitraan tersebut akan sulit diimplementasikan kalau ternyata sejumlah pengusaha besar memiliki lobi yang kuat dengan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya di negara ini. Tidak adanya keterkaitan dan kemitraan, sehingga menimbulkan pengusaha secara membabi buta jaringan usaha mulai dari hulu sampai hilir seringkali menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat di sektor industri menjadi risau.<sup>46</sup>

Para pengusaha besar, daripada bekerja sama dengan pengusaha di bawah stratanya, mereka lebih suka melaksanakan usaha patungan dengan perusahaan multinasional. Bagi pengusaha lokal, usaha patungan tersebut banyak memberi keuntungan. Terutama dalam hal jaminan penggunaan teknologi yang mutakhir dan jaringan pemasaran produk ke berbagai negara maju. Sumber modal, teknologi serta jaringan pemasaran telah dikuasai oleh perusahaan multinasional yang banyak menanam modal, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Di negara berkembang, mereka umumnya patungan dengan investor lokal karena berbagai pertimbangan salah satunya yang terpenting adalah jaminan keamanan investasi.

---

<sup>45</sup> Arah Reformasi Sektor Industri Manufaktur, loc. cit.

<sup>46</sup> Ekonomi Berbasis Industri Siapa yang Memetik Manfaat, Bisnis Indonesia, Juni 1996.



Jika dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, usaha patungan banyak memberi kontribusi kepada penciptaan nilai tambah dan menaikkan produktivitas sektor industri. Pada tahun 1990-an saja dari statistik yang diterbitkan BPS menunjukkan perusahaan patungan tersebut dapat memberikan nilai tambah per tenaga kerja empat kali lebih tinggi dibanding perusahaan domestik.<sup>47</sup>

Pengembangan usaha kecil dan menengah belum berjalan baik. Hal itu antara lain karena anggaran untuk program tersebut sangat kecil. Hingga sekarang bisa dikatakan pengusaha kategori itu masih belum tersentuh. Kecilnya anggaran untuk pengembangan usaha kecil dan menengah terlihat antara lain dari kredit untuk sektor itu. Kredit yang disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani, dana permulaannya hanya sekitar 300 miliar rupiah. Padahal jumlah pengusaha kecil dan menengah saat ini sekitar 88 juta, atau sekitar 99% dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia.<sup>48</sup>

Dalam peta industri nasional posisi BUMN akan tetap sampai tahun 2005. Berdasarkan hasil survei Business Intelligence Report (Biro), BUMN hingga kini masih mendominasi 53% dari total produk atau bidang usaha, dengan kisaran pangsa pasar antara 51% sampai 100%. Berdasarkan hasil survei tersebut, pangsa pasar yang terutama dikuasai BUMN adalah industri hulu atau produk dengan sumber daya alam yang besar, seperti Pertamina atau Krakatau Steel. Di sektor ini BUMN menguasai pangsa pasar hingga 100%. Oleh karena itu disimpulkan meskipun sudah banyak lepas dari unsur monopoli dan tata niaga, diprediksi peranan dan posisi BUMN sebagai pelaku ekonomi tetap dominan. Kondisi ini didukung oleh kenyataan banyaknya kekuatan swasta riil yang masih sakit dan belum bisa bangkit mengejar ketertinggalan. Memasuki era persaingan bebas dan anti monopoli di industri pabrikan sampai ke pabrik utilitas, BUMN harus lebih meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kinerja perusahaan.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Arif Reformasi Industri Manufaktur, loc. cit.

<sup>48</sup> Usaha Kecil Menengah Belum Juga Terjangkau, KOMPAS, 9 Februari 2000.

<sup>49</sup> BUMN Masih Tetap Dominan, KOMPAS, 25 Juli 2000.



Kelemahan struktural beberapa sektor produk barang dan jasa memang tidak berdaya saing tinggi. Orang tidak mungkin dipaksa untuk membeli barang yang tidak berdaya saing, baik dari segi kualitas dan pelayanan untuk kepuasan pelanggan maupun harga dan teknologi mutakhir yang digunakan. Faktor tradisional, biaya birokrasi, dan efisiensi negara merupakan penentu yang boleh jadi sangat besar dampaknya terhadap keberhasilan kita pada daya saing.

Belakangan ini dimana kondisi politik yang tidak stabil membuat manajemen perusahaan melakukan proteksi terhadap industri akibat adanya ketidaksiapan. Kalau bicara AFTA, nantinya akan mengalir tenaga kerja asing secara bebas, sehingga yang perlu diantisipasi adalah kesiapan sumber daya manusia, karena itu akan menjadi ancaman serius bagi profesional lokal. Bagi perusahaan kondisi tersebut justru menguntungkan karena ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah banyak sehingga menjadi kompetitif. Artinya perusahaan bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal lain yang harus diantisipasi adalah mengalirnya produk-produk makanan dari berbagai negara, bukan saja kualitas, tapi juga harga yang kompetitif, kemasan, servis dan sebagainya. Sehingga industri manapun harus dikelola seperti layaknya industri jasa yakni concern terhadap kualitas jasa.

Solusi terpenting untuk meningkatkan kompetisi produk Indonesia di pasar global dan sekaligus ujian terhadap kemampuan bersaingnya adalah dengan mengefisiensikan birokrasi. Sedangkan industri diharapkan dapat melecut pertumbuhan ekonomi saja, kenyataan empirisnya tidak mampu menampung bagian terbesar surplus tenaga kerja dari sektor pertanian. Artinya sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDB dan tingkat pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan industri manufaktur tetap menjadi pangkal solusi sosial-ekonomi sampai batas waktu yang belum dapat diprediksikan secara pasti. Dimanapun di dunia ini jika birokrasi pemerintah sudah terlalu jauh campur tangan dalam urusan bisnis, perekonomian tidak akan berkembang. Birokrasi hanya memperlambat dan menghambat urusan bisnis yang sektornya cepat. Birokrasi juga melahirkan proteksi berlebihan yang membuat produk suatu negara



tidak akan bersaing di pasar global. Contoh aktual tentang birokrasi di Indonesia berakibat pada mahalnya harga mobil dan obat (konon termahal di dunia). Kalau alasannya hanya untuk melindungi industri yang masih infant, jelas tidak dapat dibenarkan karena industri itu sudah beroperasi demikian lama dan memang harus membayarnya lebih mahal.

Jepang sangat terkenal dengan birokrasinya. Sudah lama menyadari bahwa campur tangan dalam urusan bisnis hanya membuat ekonomi negara itu lemah. Pada masa lalu memang dikuasai birokrasi dalam bentuk proteksi tetapi setelah industri itu mampu bersaing, proteksi dilepaskan. Maka sejak 20 tahun yang lalu, birokrasi tidak ikut campur tangan dalam perekonomian di Jepang.

Diperlukan pengkajian ulang terhadap kebijaksanaan ekonomi yang sejauh ini berpengaruh terhadap turunya peringkat daya saing, naiknya defisit transaksi berjalan dan efektifitas birokrasi harus ada tindak lanjut untuk kompetisi kita di pasar global.<sup>50</sup>

Faktor lain yang menunjukkan kelemahan manajerial di Indonesia adalah kebanyakan perusahaan di sektor industri merupakan perusahaan keluarga. Didirikan oleh seorang yang bertindak sebagai entrepreneur (wiraswastawan). Pemula ini begitu berani bertualang dan menghadapi resiko sehingga sering kita lihat usaha yang jatuh bangun dalam menghadapi persaingan. Rata-rata mereka berkembang dalam arti bisa menghasilkan profit yang lumayan ketika usia 50-60 tahun-an. Pada usia tersebut entrepreneur cenderung bersifat konservatif dengan segala tindakan-tindakan seperti:

1. Mewariskan usaha kepada anaknya
2. Menyerahkan kepada orang lain dalam perusahaan yang masih mempunyai pertalian darah
3. Memperkecil omset
4. Menjual perusahaan
5. Go public.

---

<sup>50</sup> Peningkatan Daya Saing dan Efektifitas Birokrasi, loc. cit.



Empat hal pertama yang sering terjadi dengan alasan agar perusahaan tersebut bisa menghidupi keluarganya. Strategi tersebut dilihat dari segi keamanannya memang tepat karena tidak banyak pengusaha kita yang mempunyai latar belakang pengetahuan tentang manajemen, akibatnya terlalu puas dengan prestasi yang diraih dan berusaha mengamankan apa yang telah didapat. Sehingga tidak mempunyai gambaran yang cerah terhadap prospek perusahaan di masa datang. Kelemahannya, sistem mewariskan perusahaan berhasil untuk satu-dua alih generasi dan setelahnya biasanya sudah sulit untuk mendukung perkembangan perusahaan, sering terjadi konflik bahkan tidak jarang yang menjadi bangkrut.<sup>51</sup>

Proses alih generasi akhirnya menjadi salah satu penghalang berkembangnya sebuah perusahaan. Pemecahannya bisa ditempuh dengan jalan menjual saham pada masyarakat umum (go public). Dengan go public juga bisa menutup kekurangan dana dalam perusahaan baik dari masyarakat maupun dari investor asing. Sumber dana masyarakat memang diharapkan dapat tertanam dalam perusahaan dalam negeri. Hal ini untuk mencegah larinya dana ke luar negeri. Sedangkan sumber dana dari investor asing ditunjukkan untuk menarik dana dari luar, sesuai dengan kebijakan PMA. Keuntungan promosi juga diperoleh bila perusahaan telah go public dengan adanya keinginan para pemegang sahamnya untuk mendapat untung, bisa mendorong perusahaan tersebut untuk menaikkan omsetnya. Dan lebih mempromosikan hasil produksinya.<sup>52</sup>

Keuntungan diatas sifatnya alamiah, artinya tanpa campur tangan pemerintah tetap bisa diperoleh. Kemudian keuntungan yang disebabkan oleh pemerintah antara lain bagi perusahaan Indonesia yang bersedia go public melalui pasar modal akan mendapatkan keinginan pajak perseroan yang besarnya tergantung dari jumlah prosentase saham yang dijual melalui pasar modal terhadap total jumlah saham perusahaan. Dengan beberapa keuntungan diatas jelas bahwa

---

<sup>51</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Ekonomi Indonesia Pasca Boom Minyak, Analisis Kebijakan Ekonomi Tanpa Dominasi Migas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal. 110.

<sup>52</sup> *ibid*, hal. 111.



melalui go public perusahaan bisa bertahan dan dana masyarakat tidak akan mengalir ke luar.<sup>53</sup>

Jika dilihat dari kemampuan pada manajer, yang terlihat adalah belum adanya kesiapan dalam bersaing. Yang ditunjukkan dalam dua kondisi. *Pertama*, dari hasil penelitian yang dilakukan LP3ES terhadap para manajer akhir tahun 1995 tentang era perdagangan bebas di berbagai kota besar di Indonesia. Hasilnya menunjukkan 19% responden menyatakan belum siap bersaing di tingkat internasional, 16% menyatakan kondisi saat ini belum memungkinkan tumbuhnya profesionalisme dan 10% menyatakan saat ini jumlah manajer profesional sangat sedikit. Yang lebih parah lagi 45% manajer tidak tahu menahu masalah tersebut. *Kedua*, saat ini banyak manajer asing yang bekerja di Indonesia. Mereka bekerja bukan semata-mata karena tempat dia bekerja adalah perusahaan patungan yang terikat perjanjian penggunaan tenaga asing, tapi mereka memang ditarik perusahaan nasional yang berpendapat bahwa mereka lebih profesional.<sup>54</sup>

Kedua situasi tersebut akan lebih memprihatinkan lagi pada tahun 2003, dimana akan terjadi kebebasan yang luar biasa, bukan saja di bidang perdagangan, tapi juga aliran tenaga kerja, tata pergaulan dan segi kehidupannya.

Tabel 3. 8 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 1998

Jenis pekerjaan	Sektor industri	Total
Tenaga profesional, teknisi dan sejenis	19 528	3 229 224
Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	54 019	410 858
Tenaga tata usaha dan sejenis	331 943	4 115 824
Tenaga usaha penjualan	83 242	16 120 180
Tenaga usaha jasa	219 350	4 441 309
Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	27 391	39 225 329
Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar	9 198 149	19 822 499
Lainnya	-	307 229
Total	9 933 622	87 672 449

Sumber: BPS Keadaan angkatan kerja Indonesia 1998.

<sup>53</sup> ibid, hal. 112.

<sup>54</sup> Manajer Kita Tidak Siap Bersaing, SURABAYA POST, 21 Juni 1996.



Dari tenaga kerja yang discrap tahun 1998 sebagian besar mereka menjadi tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sedang tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan menempati jumlah yang paling kecil diikuti tenaga profesional, teknisi dan sejenis. Jenis pekerjaan utama pada sektor industri, tenaga profesional juga menyerap dalam jumlah yang paling kecil, sedangkan jumlah yang paling besar merupakan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerjaan kasar.

Salah satu perbedaan dari posisi manajer dan posisi buruh yakni adanya tingkat spesialisasi dalam peran mereka. Di sini tidak boleh disamakan antara profesionalisme dengan spesialisasi. Peran manajer pada tingkat tertentu bersifat profesional yakni peran tersebut menuntun pengetahuan luas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kode etik tertentu. Sebaliknya peran buiruh dalam industri biasanya bersifat spesialis. Tugasnya dapat dibatasi pada suatu atau dua operasi pada proses produksi. Kebanyakan pekerjaan buruh semi terampil atau tidak terampil. Kita tidak dapat mengatakan bahwa seorang buruh diikat pada pekerjaannya oleh suatu kode pelaksanaan atau bahkan dalam banyak kasus oleh rasa loyal kepada perusahaan. Mungkin ia mempunyai motif yang kuat untuk bekerja dengan baik tetapi motif tersebut jarang sekali merupakan motif profesional.<sup>55</sup>

Peran manajer tidak diragukan lagi, dalam industri merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Sarana untuk mengukur sejauh mana seorang manajer telah memainkan peran dengan sukses adalah grafik keuntungan. Jika menurun berarti gagal, bahkan yang mendatarpun kadang belum memadai jika industri lain meningkat. Jadi manajer yang paling sukses adalah manajer yang melampaui semua saingannya dalam menghasilkan keuntungan.

Baik manajer maupun manajemen perusahaan nasional sudah seharusnya menyadari situasi tersebut. Manajer harus meningkatkan kemampuan dan kemauan kinerjanya minimal setara dengan manajer asing. Di pihak lain, manajemen perusahaan harus memberi kesempatan dan membiayai manajer dan

---

<sup>55</sup> Eugege V. Schneider, *Sosiologi Industri*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Juni 1993, hal. 116.



hanya untuk mengembangkan kemampuan agar perusahaan mempunyai SDM yang tangguh dan loyal. Sebab, bukan karena perusahaan maju maka karyawan menjadi maju, tapi karena karyawan yang maju maka perusahaan menjadi maju.

Perlunya ditumbuhkan wirausahawan yang profesional yang memiliki karakter: inisiatif, tanggung jawab atas sukses maupun gagal, konsistensi dan tekun. Ia visioner, tidak mudah menyalahkan orang lain atas kegagalan diri, ia justru menggali inteligensi bisnis untuk meningkatkan kapasitas.<sup>56</sup> Menghadapi tahun 2003 manajer harus memiliki sejumlah kemampuan dasar untuk menjadi profesional yakni,

1. Kemampuan melakukan analisis situasi, sehingga bisa menentukan skala prioritas dan mengambil keputusan yang tepat
2. Menyelesaikan masalah
3. Mampu berfikir kreatif
4. Di bidang tugasnya masing-masing
5. Menjalin hubungan baik dengan orang lain
6. Mampu mempresentasikan ide
7. Keahlian lain yang menunjang, seperti bahasa asing dan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat.<sup>57</sup>

Ini membutuhkan investasi dana dan waktu. Dalam kenyataannya, kejayaan suatu bisnis adalah hasil suatu keberanian beresiko dan berinovasi masa lalunya. Kini, dunia bisnis skala besar dan menengah makin dihadapkan pada tantangan untuk mereview kembali strategi yang mereka anut.

Beberapa langkah strategi yang perlu dikerjakan mencakup perumusan kembali misi dan visi bisnis, peninjauan kembali struktur dan sistem untuk mampu menerobos pangsa pasar baru sambil memperbesar pasar yang sudah ada. Seleksi pasar yang memberi prospek dan akhirnya peningkatan efisiensi aset dan profitabilitas. Kesemuanya itu sesuai dengan wawasan bahwa tujuan berbisnis sebagai bentuk kegiatan sosial yang dikerjakan oleh sekelompok manusia yang

---

<sup>56</sup> Meningkatkan Efisiensi dan Pemerataan, loc. cit.

<sup>57</sup> Manajer Kita Tak Siap Bersaing, op. cit.



committed adalah, memastikan perolehan laba, mengusahakan pertumbuhan, memberi kontribusi positif pada masyarakat, memelihara mutu kehidupan.<sup>58</sup>

Pengembangan nyata bisnis baru tidak hanya karena "ikut-ikutan" (too strategy). Pengembangan bisnis baru sebagai upaya untuk pertumbuhannya dapat merupakan jawaban atas tantangan persaingan pada taraf regional maupun global. Menurut Ikujiro Nonaka, profesor Institute of Business Research, Hitotsubashi, University Tokyo, Jepang, mengemukakan bahwa esensi manajemen strategis adalah dalam penciptaan pengetahuan organisasi daripada individual serta bagaimana mengelola dan mengerahkan efisiensi penciptaan pengetahuan, yang ia lebih sukai dengan istilah managerial productivity of knowledge.<sup>59</sup>

Peningkatan mutu adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut ketekunan dan kesabaran sebagai harganya. Untuk itu perlu dalam tiap organisasi bisnis manufaktur maupun jasa terpancar visi manajemen yang cocok dengan tradisi kultur, dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa kita. Penyempurnaan berkesimbangan berarti "hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih cerah dari hari ini" dalam memberi nilai tambah pada pelanggan dengan tetap memperoleh laba atau manfaat.<sup>60</sup>

### 3.5 Konsentrasi Pasar

Kita menyadari bahwa globalisasi ekonomi akan menjadikan bisnis berkembang tanpa mengenal tapal batas. Namun perlu digarisbawahi bahwa "memenangkan persaingan bukan berarti mematikan saingan".

Kapasitas berbisnis yang mengglobal membutuhkan kesadaran global tentang peluang pasar yang dinamis, pesaing yang makin bermutu dan keanekaragaman kultur berbisnis. Sikap pelaku bisnis harus mampu mengembangkan diri untuk mengidentifikasi kapasitas global bisnisnya baik dalam produk, jasa, pengolahan merk, ketrampilan manajemen dan teknologi dalam landasan global.

---

<sup>58</sup> Meningkatkan Efisiensi dan Pemerataan, loc. cit.

<sup>59</sup> loc.cit.

<sup>60</sup> SURABAYA POST, 14 Juni 1996.



Bisnis tanpa fokus atau visi akan kehilangan peranan atau pangsa pasarnya dalam upaya untuk bertahan apalagi untuk memperluas pangsa. Yang tidak dianggap masalah yang masih jauh, seperti harga pokok tinggi dan tidak efisien berubah menjadi masalah kritis dan peluang atau pangsa berubah mengecil atau hilang.

Kenyataan juga telah menunjukkan kepada kita bahwa umumnya daur hidup suatu produk makin lama makin pendek. Ini berarti bahwa dalam pasar konsumen, persaingan akan semakin tajam dan prosesnya menuntut sistem pemasaran yang tepat atau yang dapat mempengaruhi serta mengejawantahkan selera dan keinginan konsumen dengan cepat.<sup>61</sup> Tanpa menerapkan sistem pemasaran yang berorientasi pada konsumen, perusahaan akan sulit atau malah tidak lagi dapat mempertahankan eksistensinya.

Pemasaran mencakup empat aspek, price, place, product, dan promotion. Kalau saja terjadi devaluasi, harga memang jauh lebih murah tetapi di sisi lain kita masih memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak bisa ditutup dengan keunggulan harga semata, karena kita belum menjadi pemain global yang sudah siap. Apalagi krisis ekonomi juga diikuti krisis politik. Dari kondisi seperti itu pihak asing akan menilai apakah kita mampu menjaga kelangsungan pasokan. Karena kepastian pasokan merupakan hal yang penting buat mereka.<sup>62</sup> Penetrasi pasar dapat pula dilakukan melalui kebijakan harga, dengan cara menekan harga serendah mungkin pada tahap awal memasuki pasar. Disamping itu kebijakan dan strategi pemasaran yang lebih agresif perlu pula dilakukan untuk dapat meningkatkan daya saing.

Mengenai aspek kedua yaitu place, yang dihadapi Indonesia adalah komposisi negara tujuan ekspor. Pasar yang menjadi tujuan ekspor kita terkonsentrasi di beberapa negara tertentu. Akibatnya ketergantungan pada negara-negara tersebut sangat besar. Setiap gejolak atau perkembangan yang terjadi dengan sendirinya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Mengingat

---

<sup>61</sup> Pande Radja Silalahi, *Pasang Surut Proteksi dan Monopoli di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pemasaran, Analisis CSIS, Maret 1996, hal. 258.*

<sup>62</sup> Sudhamek AWS, *Jangan Menjadi Kodok Rebus, majalah USAHAWAN, no. 11 th. XXVIII, November 1999, hal. 52.*



ekspor merupakan transaksi antar negara maka gangguan terhadap ekspor tidak terbatas, bukan saja karena gejolak ekonomi yang berlangsung di negara tujuan ekspor, akan tetapi juga akibat gejolak-gejolak non-ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Beberapa negara mitra dagang utama dsebagai tujuan ekspor Indonesia beserta pangsanya ada pada lampiran 7.

Disamping ekspor yang terkonsentrasi di negara tertentu, ekspor non-migas juga masih didominasi oleh beberapa produk dari hasil industri. Barang-barang tersebut umumnya juga di ekspor kembali ke negara lain seperti yang terjadi pada barang yang di ekspor ke Singapura, akan di ekspor lagi ke Amerika dan Jepang sebagai konsumen akhir setelah melalui beberapa perlakuan tambahan. Dari situ tampak bahwa konsentrasi negara tujuan ekspor non-migas yang telah berlangsung, sangat menentukan perkembangan ekspor yang terjadi.

Ketidakterdayaan industri Indonesia menghadapi pasar, terjadi karena di tangani secara tradisional. Misalnya saja pada industri pengolahan makanan dan minuman yang lemah dalam bersaing dengan produk impor, karena masih belum ditangani secara profesional; kurang memperhatikan kualitas, baik itu dalam proses produksi maupun pasca produksi seperti pengemasan dan lain-lain. Padahal Indonesia sampai sekarang masih merupakan negara agraris yang berarti masih punya potensi yang besar di bidang agrobisnis. Namun kenyataannya dominasi produk impor jauh lebih ampuh untuk mengisi pasar domestik dari pada industri tradisional.

Nilai ekspor industri mebel kayu Indonesia hanya menguasai sekitar 2, 5% dari total pasar mebel dunia yang nilainya mencapai 53, 1 miliar US\$. Penyebabnya antara lain kurangnya bahan baku akibat maraknya penyeludupan serta belum dimilikinya akses pasar yang luas. Dengan sumber daya yang ada paling sedikit seharusnya Indonesia mampu mencapai 10-15% kebutuhan kayu olahan dunia. Data dari Depperindag menyebutkan, potensi pasar produk mebel dunia sangat besar, seiring dengan gaya hidup masyarakat yang modern dan perkembangan properti, perkantoran, hotel, restoran dan lain-lain. Pertumbuhannya mencapai 8, 14% per tahun.



Ekspor mebel kayu Indonesia sebenarnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 ekspor produk tersebut naik 17% dibandingkan tahun 1998, yakni dari 1, 097 miliar US\$ menjadi 1, 287 miliar US\$. Dengan demikian potensi industri mebel kayu sangat besar untuk meningkatkan kinerja dan investasinya guna memperbesar produksi dan membuka pasar yang lebih luas lagi. Pasar produk Indonesia adalah AS, Belanda, Inggris, dan Jepang.<sup>63</sup>

Karena banyak bergantung pada investasi asing serta kondisi pasar internasional maka sektor industri akan dengan sendirinya banyak dipergunakan oleh strategi pengembangan PMA serta dinamisme permintaan pasar internasional. Sebagai contoh, perkembangan industri elektronika di Indonesia merupakan bagian dari pola strategi penguasaan industri dan pasar elektronika dunia oleh perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang menganut pola flying geese untuk tahap estafet pengembangan produksi di negara lain. Kemudian mereka mengembangkan division of labor untuk proses integrasi produksi. Sedangkan untuk investasi mereka menggunakan pola billiard ball.

Ketiganya memberi gambaran bahwa negara yang masih menjagokan tenaga kerja murah sebagai andalannya akan menjadi tuan rumah bagi industri perakitan, baik untuk produksi jadi maupun komponen. Sedangkan untuk proses disain dan pembuatan yang lebih canggih akan dialokasikan di negara yang kualitas sumber daya manusia-nya lebih baik. Pasar produknya tidak lagi tergantung pada pasar domestik tapi berorientasi ekspor ke negara maju atau negara berkembang lainnya. Dengan demikian perlu dicatat bahwa pola investasi Jepang adalah mengeksploitasi sumber daya alam serta menerobos pasar domestik yang diproteksi. Sehingga setiap kebijakan inndustri yang mengabaikan pola pengembangan PMA akan kesulitan dalam implementasinya. Karena tidak konsisten dengan trend perkembangan eksternal.<sup>64</sup>

Di samping itu kenyataan menunjukkan bahwa di masa datang, peran pemerintah akan semakin kecil dan peran swasta meningkat dalam menentukan

<sup>63</sup> Porsi Pasar Mebel Indonesia 2,5%, KOMPAS, 29 Juli 2000.

<sup>64</sup> Arah Reformasi Sektor Industri Manufaktur, loc. cit.



kegiatan investasi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi bisa bertahan sebagai pelaksana investasi utama, tetapi akan bergeser sebagai fasilitas semata.

Selain munculnya negara pesaing baru, kelemahan ekspor non-migas khususnya sektor industri, oleh berbagai kalangan dinilai sebagai akibat belum dimilikinya jaringan distribusi dan pemasaran yang kuat di negara tujuan ekspor. Lebih jauh lagi promosi perdagangan oleh pengusaha nasional untuk membuka pasar baru, masih belum menampilkan usaha yang optimal. Sehingga promosi merupakan suatu cara yang efektif untuk memberitahukan kepada calon pembeli mengenai suatu merk. Promosi sangat dibutuhkan dalam pemasaran suatu produk, terutama produk baru yang diluncurkan dengan harapan produk tersebut mampu bersaing dengan produk yang sudah ada di pasaran.

Periklanan merupakan elemen yang tidak kalah penting dalam pemasaran. Sarana ini dirasa cukup efektif untuk menarik konsumen dalam menarik pasar bagi suatu produk untuk memenangkan persaingan bisnis. Sarana periklanan memegang peranan sangat vital, di mana iklan merupakan bagian promosi perusahaan. Dalam perkembangannya promosi dan periklanan semakin lama semakin kreatif dengan berbagai media yang ada. Di saat era informasi dan globalisasi untuk memenangkan bisnis diperlukan alternatif yang paling menguntungkan dalam memilih sarana promosi yang efektif dan efisien

Dalam uraian-uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa ekonomi Indonesia semakin lama semakin terjalin erat dengan perekonomian dunia. Persaingan menjadi semakin tajam, tidak hanya antar produsen dalam negeri tetapi mencakup persaingan dengan produsen luar negeri baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Di era globalisasi sekarang ini, selera konsumenpun semakin cepat berubah, karena beberapa faktor seperti, akibat kemajuan teknologi informasi yang dengan sendirinya berpengaruh terhadap keputusan untuk membeli suatu produk.



### 3.6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Bila diingat bahwa investasi dan produksi antar sektor berkaitan, maka perekonomian harus dilihat sebagai kesatuan jalinan yang saling melengkapi. Tidak mungkin membangun industri di suatu daerah tanpa menyediakan infra struktur transportasi, listrik, komunikasi atau tenaga kerja. Produktifitas industri tergantung pada kemampuan finansial yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infra struktur baik fisik maupun sosial.

Sektor industri berkaitan erat dengan adanya perdagangan baik domestik maupun internasional. Sedang perdagangan mempunyai fungsi ekonomis yaitu:

1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen
2. Memecahkan masalah perbedaan tempat
3. Memecahkan masalah perbedaan waktu
4. Seleksi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya.

Maka, agar fungsi tersebut bisa berjalan, penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya menjadi hal yang sangat penting.<sup>65</sup>

Perindustrian juga berkaitan dengan keuangan. Ketiganya menjadi saling terkait, di mana perdagangan yang bertindak sebagai jembatan menuju perekonomian eksternal. Perindustrian mengandalkan perdagangan untuk dapat bertahan secara komersial, dan tanpa perindustrian, perdagangan hanya terbatas pada perdagangan komoditi yang sangat tidak menentu. Hal yang sama pentingnya tetapi tidak secara langsung, adalah hubungan antara keuangan dan perdagangan. Tersediannya valuta asing melalui sistem perbankan dan manajemen kurs valuta asing merupakan dua dari faktor yang terpenting dalam menentukan kemampuan sebuah negara untuk beroperasi di pasar internasional. Oleh karena itu perdagangan terutama mengandalkan tiga hal:

1. Memiliki barang atau jasa yang dapat dijual (bidang kekuasaan Departemen Perindustrian)
2. Sebuah rezim perdagangan yang menunjang perdagangan (bidang kekuasaan Departemen Perdagangan)

<sup>65</sup> T. Gilarso, *PIE Bagian Makro*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 169.



3. Cadangan devisa yang tersedia sebagai instrumen pertukaran dan kurs pertukaran valuta yang tidak terlalu menambah distorsi pada proses perdagangan.<sup>66</sup>

Dewasa ini tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak setiap negara mempunyai sumber daya alam yang diperlukan untuk industrinya. Kondisi tersebut yang menimbulkan perdagangan antar negara yang sudah pasti lebih kompleks dari pada perdagangan dalam negeri. Perdagangan luar negeri tidak hanya mencakup ekspor impor barang tetapi juga penyeleenggaraan jasa lainnya. Lembaga-lembaga pembantu pelaksanaan ekspor impor antara lain:

1. Bank, yang menyediakan kredit
2. Asuransi, menjamin barang aman dalam perjalanan terhadap resiko rusak atau hilang
3. Perusahaan angkutan
4. Pengemasan termasuk penyortiran, pembungkusan dan pelabelan
5. Pergudangan
6. Lembaga periklanan
7. Konsultan (bidang hukum, akuntansi, pemasaran dll)
8. Bidang yang membantu pemerintah membina dunia perdagangan dan industri seperti KADIN.<sup>67</sup>

Di Indonesia fasilitas angkutan masih menjadi kendala dalam proses pemasaran produk buatan Indonesia di pasar internasional. Seperti terlihat pada sistem ekspor yang masih dilakukan dalam bentuk free on board (FOB) dimana ongkos angkut masih ditanggung oleh pembeli dari luar negeri. Persoalan tersebut menjadi lebih sulit mengingat komoditi ekspor kita sebagian besar adalah komoditi primer dan hasil industri pertanian umumnya merupakan barang berat dan memerlukan biaya angkut yang cukup besar. Karena itu usaha-usaha untuk mengembangkan sistem angkutan barang terutama angkutan laut akan sangat

---

<sup>66</sup> RADIUS Prawiro & Frans M. Parera (ed), *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi*, PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 224.

<sup>67</sup> *ibid*, hal. 172.



penting artinya untuk memperlancar proses pemasaran dan sekaligus memperluas daya saing komoditi ekspor kita.<sup>68</sup>

Selain masalah pengangkutan produk ekspor Indonesia juga mengalami kendala di bidang penampungan. Setelah barang tersebut sampai di negara tujuan terminal khusus penampungan yang dimiliki Indonesia di negara tujuan ekspor masih terbatas. Sehingga hal tersebut menyebabkan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh eksportir Indonesia.

Barang-barang ekspor Indonesia di muat di dan diberangkatkan dari banyak sekali pelabuhan, baik pelabuhan besar dan sudah memiliki fasilitas modern maupun pelabuhan kecil dengan fasilitas terbatas. Ekspor yang berangkat dari pelabuhan kecil biasanya menuju negara tetangga dekat, pada umumnya memuat barang-barang yang relatif "ringan" serta dengan volume terbatas. Barang-barang yang diekspor melalui sebuah pelabuhan tidak semuanya mencerminkan hasil produksi dari daerah atau provinsi dimana pelabuhan itu berada. Karena masih terbatasnya fasilitas pelabuhan di kebanyakan wilayah di tanah air, acapkali ekspor barang dari suatu daerah, terpaksa harus dikapalkan melalui pelabuhan di daerah lain.

Pengapalan barang ekspor secara lintas provinsi bukannya saja menghilangkan peluang pendapatan bagi daerah asal barang tersebut (di lain pihak menambah pendapatan bagi daerah yang dilintasi), tetapi juga memperpanjang jalur penyampaian ke tempat tujuan akhir. Hal itu berdampak terhadap waktu dan biaya. Waktu penyampaian menjadi lebih lama, bahkan bisa dan sering kali terlambat sehingga melanggar kontrak yang disepakati antara eksportir dan pembeli di luar negeri. Belum lagi jika kedatangan kapal terlambat sementara barang yang hendak dimuat sudah terlanjur menunggu di gudang sewaan. Ongkos kirim menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga barang menjadi tinggi, kemampuan bersaingnya di luar negeri berkurang. Kendala struktural semacam ini tentu saja menghambat kelancaran ekspor. Itulah sebabnya pihak penjual atau eksportir kita sering tidak berdaya menghadapi tekanan pihak luar negeri agar menggunakan kapal mereka

---

<sup>68</sup> Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, analisis CSIS, April 1993, hal. 345.



untuk mengangkut barang-barang ekspor yang dikirimnya.<sup>69</sup> Perkembangan sistem informasi saat ini seiring dengan perkembangan persaingan dunia baik lokal maupun internasional. Untuk memenangkan persaingan banyak perusahaan yang mengembangkan sistem informasi dalam organisasinya. Informasi dalam kaitan ini merupakan harta yang berharga bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Melalui informasi yang akurat dan tepat waktu akan berpengaruh terhadap kekuatan dalam menghasilkan keputusan bisnis baik di banding operasi, produksi maupun administrasi perusahaan.

Selain faktor-faktor di atas, variabel country risk merupakan persoalan paling mendasar sebagai sarana untuk menarik penanaman modal asing. Investor asing bakal tertarik untuk datang kalau infrastruktur tersedia cukup memadai. Di samping itu mereka mempertimbangkan pula kondisi kestabilan politik maupun sosial serta kepastian hukum di suatu negara. Faktor ini pula yang menyebabkan beberapa negara tetangga kita menjadi jauh lebih unggul. Indonesia menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah universitas di Bangkok Thailand, berada di urutan ke lima negara tujuan investasi terfavorit di Asia setelah Thailand, Singapura, China, dan Vietnam. Sejumlah 31, 3% atau 1 162 investor dan pengusaha asing yang diwawancarai antara 7 April sampai 11 Mei memilih Thailand karena kelebihan yang dimiliki seperti buruh berkualitas serta situasi ekonomi dan politik yang relatif stabil.<sup>70</sup> Dalam posisi keuangan akhir-akhir ini jelas pemerintah mengalami kesulitan untuk menyediakan infrastruktur fisik yang mampu menarik minat investor asing. Satu-satunya aset yang masih tersisa adalah infrastruktur non fisik atau faktor kelembagaan atau dengan cara perbaikan regulasi.

---

<sup>69</sup> Dumairy, op. cit, hal. 191.

<sup>70</sup> Indonesia Urutan Kelima Tujuan Favorir Investasi, KOMPAS, 15 Mei 2000.



## BAB V

### KESIMPULAN

Selama PJP I, peranan ekspor non-migas melonjak pesat terutama dari sektor industri manufaktur. Karena itu pemerintah menetapkan bahwa ekspor non-migas menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri, selain dijadikan sebagai andalan untuk membayar hutang luar negeri. Sehingga berbagai kebijakan deregulasi, debirokratisasi, fasilitas dan insentif yang berorientasi pada peningkatan daya saing, efisiensi, dan produktifitas pun terus digulirkan untuk memacu penerimaan ekspor.

Ternyata kebijakan di atas mengandung kelemahan, untuk mendorong industri, ekspor terus dipacu, mengakibatkan impor yang terus meningkat karena sebagian besar komponen industri kita masih perlu diimpor. Sampai pertengahan tahun 1997, krisis yang terjadi telah membuka mata kita terhadap sejumlah kelemahan yang terdapat pada perekonomian kita yang menuntut untuk segera dibenahi. Seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus merosot, hal tersebut cukup memberatkan berbagai pihak dalam membayar hutang luar negerinya serta memberatkan pembelian barang-barang impor untuk keperluan proses produksi. Banyak perusahaan yang bangkrut akibat krisis yang disebabkan adanya ketergantungan yang amat tinggi dari sektor industri kita terhadap barang-barang impor sampai suatu tahap yang kritis di mana kelangsungan proses produksi mereka tampak sangat rentan terhadap kelangsungan supply barang-barang impor.

Stabilitas ekonomi merupakan syarat yang sangat penting. Tanpa itu ekonomi di khawatirkan akan mudah goyah. Prasarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan stabilitas politik-keamanan, kepercayaan ekonomi dan pemerintahan yang efektif. Dan pada akhirnya harus disadari bahwa pertalian antara berbagai kebijakan dan persoalan di depan sangat erat, misalnya antara ekonomi makro (pajak, suku bunga, kurs, inflasi, perbankan, dan lain-lain) dengan dunia usaha. Antara ekonomi makro dan desentralisasi pembangunan, antara



hukum, politik-keamanan dan ekonomi, juga sangat kuat. Sehingga pemerintahan yang efektif, koordinasi antarkebijakan, sektor, menteri-menteri ekonomi serta pusat dan daerah, menjadi kunci utama pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintahan yang efektif dan terkoordinir akan menentukan prioritas dan target yang ingin dicapai.

Ini semuanya bukan murni kesalahan yang ditimpakan kepada kompleksnya kebijakan ekonomi saja, tetapi juga kepada kentalnya intervensi politik dan faktor dinamika eksternal. Meskipun demikian tidak ada jalan lain, jika ekonomi akan pulih maka faktor teknokrasi (penegakan prinsip-prinsip dasar) harus disesuaikan secara konsisten dan membebaskan faktor tersebut dari intervensi pihak lain.

Maka yang paling urgensi adalah melanjutkan proses tersebut dan memberikan perhatian agar masalah keberlanjutan proses pemulihan ekonomi menjadi prioritas. Arahnya adalah (kepada pemerintah khususnya) untuk melihat ke depan pada persoalan yang mendesak, yakni menggerakkan sektor usaha dan membuka lapangan kerja kembali. Disamping itu juga perlu diperhatikan beberapa faktor: *pertama*, secara umum keadaan ekonomi telah mencapai awal stabilisasi. *Kedua*, sudah banyak unit usaha yang mulai bergerak dan bahkan terkena krisis. *Ketiga*, tidak semua sektor usaha menengah dan kecil tergantung kepada bank.

Masih banyak cara untuk menjalankan usaha mereka. Usaha pembiayaan alternatif tersebar di mana-mana, jaringan distribusi dan pemasaran ke luar negeri bisa digerakkan, informasi, bantuan manajemen dan akses bisa diberikan kepada berbagai unit usaha yang punya prospek.

Sementara penyelesaian persoalan yang besar harus terus dijalankan secara konsisten untuk menjamin proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, baik melalui proses penyelesaian di dalam maupun di luar pengadilan, meskipun masih panjang dan dipenuhi dengan berbagai macam intervensi. Ada baiknya juga perhatian yang sama juga diberikan untuk menggerakkan unit usaha yang punya prospek dan siap bersaing.



Krisis ekonomi serta berbagai persoalan yang mengikutinya telah memberikan pelajaran yang sangat penting bagi pemerintah dan kalangan pelaku ekonomi. Dalam merestrukturisasi berbagai perusahaan, misalnya, banyak langkah dan upaya yang sudah dilakukan memberikan pengalaman yang menjadi pelajaran penting, khususnya dalam merumuskan kebijakan industri nasional di masa yang akan datang.

Dari berbagai upaya dan restrukturisasi usaha dan reorientasi kebijakan industri dapat diambil dua prioritas pokok, *pertama*, memilih sektor industri unggulan, *kedua*, kebijakan yang sifatnya menyeluruh yang terdiri dari kebijakan umum di bidang perdagangan, institusional (deregulasi), investasi, industrial (mikro) dan makro penunjang. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kebijakan pertama memberikan prioritas pasar pengembangan industri-industri tertentu yang merupakan industri unggulan dengan menggunakan dimensi tertentu, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, ekspor, saintek, pertumbuhan. Industri unggulan akan menjadi pegangan bagi pengusaha, investor dan secara nasional sebagai pilar bagi pengembangan industri nasional di masa mendatang. Hanya saja yang menjadi persoalan ialah bila realisasi industri unggulan tersebut di masa mendatang tidak menjadi kenyataan, akan terjadi penghamburan keuangan dan ekonomi besar-besaran.

Di masa lalu, sebenarnya pemerintah telah membangun industri-industri manufaktur berskala berat seperti pesawat dan mobil nasional. Akan tetapi karena tidak didukung kebijakan dan kriteria yang jelas, bahkan ada yang menduga cenderung ada muatan politiknya, sebagian besar industri-industri berat boleh dibilang gagal total. Lagi pula dengan orientasi industri berat seperti itu tidak gampang dan butuh waktu yang sangat lama untuk bersaing dengan produk industri berat dari negara-negara yang secara tradisional sudah lama dan kokoh menguasai industri tersebut.

Hal itu mungkin tidak akan terjadi jika pemerintah sejak awal menyadari bahwa potensi alam yang dimiliki Indonesia lebih membuka peluang terwujudnya



industri agroindustri dan industri pendukungnya. Sebab, secara alamiah Indonesia memang kaya sumber daya alam, baik di laut, darat dan perhutanan.

Kebijakan umum di bidang industri dan perdagangan akan bisa meminimumkan resiko dan kemungkinan kesalahan arah keijakan industri nasional, namun tanpa industri unggulan arah kebijakan industri nasional menjadi tidak menentu. Padahal potensi ekonomi Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam memungkinkan adanya kepeemihakan pemerintah kepada industri yang berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian dan kelautan. Meskipun demikian kebijakan ini bukannya tidak mendukung tumbuhnya industri unggulan. Pemerintah pada hakekatnya tidak mencampuri urusan pemilihan industri unggulan dan memberikan keleluasaan pada pasar untuk mengaturnya. Masalahnya mekanisme pasar belum sepenuhnya bisa berjalan dan ada kekhawatiran pasar lebih banyak mengutamakan tujuan yang bersifat jangka pendek.

Persoalan yang tak kalah serius adalah masalah pengembangan industri atau usaha kecil dan menengah. Pengembangan industri semacam ini sangat diperlukan untuk banyak hal, misalnya, sebagai sumber kehidupan bagi jutaan rumah tangga, membuka lapangan pekerjaan, bahkan karena sifatnya yang relatif kecil, padat karya, impornya kecil dan beban utangnya juga minimal, dia relatif tahan terhadap goncangan.

Secara umum mereka bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok. *Pertama*, adalah kelompok pengusaha "gurem", rumah tangga dan yang sangat kecil skala unit usahanya. Mereka tidak memiliki modal dan pengetahuan apapun kecuali tenaga kerja dan semangat usaha yang tinggi. *Kedua*, pengusaha kecil yang punya sedikit modal dan inti aktifitas dan tenaga kerja yang cukup.

Maka, kebijakan industri nasional harusnya mampu mengadopsi secara tepat ketiga strategi tersebut yakni, keunggulan, perdagangan, dan kecil-menengah secara simultan dan tanpa mempertentangkan satu sama lain. Kebijakan industri unggulan harus dilakukan agar arahnya benar dan memiliki visi dan rentang jangka panjang. Dan ini membutuhkan kemauan politik pemerintah, ada dalam



GBHN agar menjadi program nasional dan bisa menjadi pedoman bagi para pelaku.

Kebijakan deregulasi perdagangan dan investasi harus dilakukan untuk mendukungnya dengan prioritas, bertahap dan memperhatikan kesiapan, baik pelaku, institusi infrastruktur pendukungnya. Industri nasional juga secara simultan harus memberikan perhatian khusus kepada industri dan unit usaha kecil dan menengah, tetapi sifatnya harus transparan dan tepat sasaran dan target. Industri nasional mempunyai peran ganda, yakni *bersaing di forum internasional dan berkiprah di pasar domestik* dan keduanya harus secara bersama-sama dan dilakukan dengan mengurangi distorsi.

Meskipun terdapat dualisme pada diri industri nasional namun masing-masing memainkan peranan yang berbeda, sekalipun tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Khususnya pemerintah, peranannya dalam hubungan ini adalah harus mampu secara sekaligus dapat berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator bagi tumbuh kembangnya industri nasional.

Bersamaan dengan semakin terintegrasinya Indonesia dengan ekonomi dunia terjadi pula akselerasi proses globalisasi. Globalisasi yang didorong oleh proses liberalisasi universal yang manujunkan suatu era perdagangan bebas, pembangunan teknologi dan internasionalisasi produksi atau distribusi ini disatu pihak membuka peluang pasar global yang semakin besar bagi Indonesia namun dilain pihak Indonesia juga menghadapi pesaing-pesaing baru, tuntutan baru di luar harga dan semakin pendeknya daur hidup teknologi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah semakin terkaitnya perdagangan internasional dengan berbagai isu sosial seperti HAM, perburuhan, dan lingkungan hidup. Semakin eratnya kaitan tersebut terlihat misalnya dengan munculnya usulan untuk memasukkan aspek lingkungan hidup ke dalam ketentuan-ketentuan dagang. Tekanan yang semakin meningkat dari negara maju yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia karena politik dalam negeri mereka, serta adanya unsur-unsur proteksi terselubung, membuat Indonesia dan eksportir Indonesia perlu memperhatikan perkembangan-perkembangan tersebut termasuk beberapa konensi



multi lateral atau kesepakatan internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup maupun mutu produk.

Struktur ekspor manufaktur Indonesia masih didominasi oleh produk-produk padat karya dan padat sumber daya seperti, tekstil, pakaian jadi dan kayu lapis. Tetapi sektor ini pun ada tanda-tanda penurunan daya saing yang antara lain bisa dilihat dari menurunnya pertumbuhan ekspor produk tersebut. Apapun penyebab gejala tersebut di atas, Indonesia tetap perlu meningkatkan daya saing baik di sektor tersebut maupun sektor lainnya yang diharapkan kelak akan menjadi inti dari industri manufaktur.

Untuk mewujudkannya Indonesia perlu meningkatkan kemampuan teknologi serta sumber daya manusia pada umumnya dan sektor-sektor bersangkutan pada khususnya. Langkah kongkret ke arah itu perlu dipikirkan mengingat bahwa di kedua bidang tersebut Indonesia cukup tertinggal.

Dapat disimpulkan sektor industri pengolahan kita mengalami penurunan sebagai akibat kelemahan internal maupun eksternal. Di sisi *internal*, terdapat kelemahan struktural berupa ketergantungan produksi pada bahan baku impor dan ketergantungan tersebut meliputi teknologi, bahan baku, maupun modal yang kebanyakan di peroleh dari pinjaman. Sementara itu, tekanan sisi *eksternal* berasal dari melemahnya nilai tukar rupiah dan dan lemahnya permintaan pasar. Hal tersebut diperburuk dengan terbatasnya pasar yang telah kita kuasai dan variasi produk yang miliki.

Strategi ekspor oriented ternyata cukup efektif pada kondisi normal, namun tidak berdaya ketika krisis melanda. Sehingga pemberdayaan industrialisasi substitusi impor perlu di terapkan secara proporsional bersama dengan strategi orientasi ekspor untuk membangun kembali kemandirian perekonomian kita.

Untuk dapat memahami potret keadaan sekarang baik secara umum maupun menurut sub sektor adalah penting untuk mengerti kondisi awal yang mengantar Indonesia memasuki era perdagangan bebas dan akselerasi globalisasi. Tantangan yang dihadapi di era tersebut adalah persaingan, cepatnya pembangunan dan daur produk, dan sumber keunggulan tidak saja produk yang paling murah



tetapi aspek mutu standar (termasuk ramah lingkungan) dan ketepatan sampai ke pasar adalah mutlak. Indonesia sudah harus beralih dari keunggulan komparatif berdasarkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah. Berbagai kebijaksanaan perlu dikaji ulang. Agenda yang mendesak untuk dibenahi adalah menciptakan pemerintahan yang baik. Termasuk mewujudkan pemerintah yang ramah terhadap pasar, desentralisasi dan deregulasi. Agenda berikutnya adalah membenahan manajemen yang baik dan kompeten dan tidak saja "jago kandang".

Di samping itu, perlu pengembangan faktor-faktor keunggulan kompetitif yang dimiliki untuk dapat unggul dalam persaingan di pasar dunia, terutama penguasaan teknologi, sumber daya manusia yang memiliki etos kerja, kreatifitas dan motivasi yang tinggi, tingkat efisiensi dan produktifitas dalam proses produksi, kualitas serta mutu produk, perluasan promosi, sistem manajemen dan struktur organisasi, modal sarana dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap inovatif, kreatif dan memiliki visi yang luas mengenai produk, pasar dan bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi persaingan yang ketat di pasar global.



DAFTAR PUSTAKA

**Buku Literatur**

- A. Tony Prasetyantono. 1997. *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember
- Benyamin A. Suriadjaya. 1982. *Sektor Swasta Dan Industrialisasi dalam Industrialisasi Dalam Ikatan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS
- Didik J. Rahcbini. 1995. *Resiko Pembangunan Yang Dibimbing Utang*. Jakarta: PT Grasindo
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Faisal H. Basri. 1996. *Indonesia Di Tengah Derap globalisasi Dan Perubahan Lingkungan Internasional dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional Dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- H. G. Suseno Triyanto Widodo. 1997. *Ekonomi Indonesia Fakta Dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi*. Yogyakarta: Kanisius
- H. M. T. Ompusunggu. 1998. *Sumber Krisis Moneter Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Isaak Robert A. 1995. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Jones Walter S. 1992. *Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mari Pangestu, Raymond A. dan Julius M. (ed). 1996. *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: CSIS
- Masaki Akira. 1995. *Good Luck 3*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Mohtar Mas'oe'd. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES



- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muljanto Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Radius Prawiro, Frans M. Parera (ed). 1998. *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi*. Jakarta: PT Elex Komputindo, Kelompok Gramedia
- Samidji Widoatmodjo. 1992. *Ekonomi Indonesia Pasca Boom Minyak Analisis Kebijakan Ekonomi Tanpa Dominasi Migas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Schneider Eugene V. 1993. *Sosiologi Industri*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- S. Nasution dan M. Thomas. 1995. *Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Desertasi Makalah*. Jakarta: Burni Aksara
- Sumantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sumitro Djojohadikusumo. 1994. *Perkembangan Pemikiran Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Sutrisno Hadi. 1995. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- T. Gilarso. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Thee Kian Wie. 1996. *Industrialisasi Di Indonesia Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES
- Topatimasang Roem (ed). 1999. *Hutang Itu Hutang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Tulus Tambunan. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Winarno Surakhmat. 1994. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Tarsito
- Zulkarnain Djamin. 1996. *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-Negara Berkembang Bagaimana Indonesia Mengatasinya*. Jakarta: LP FE UI



**Laporan**

- BAPEPAM. 1998. *Laporan Tahunan 1997*. Jakarta: BAPEPAM
- BI. 1999. *Laporan Tahunan 1998/1999*. Jakarta: Bank Indonesia
- BPS. 1999. *Indikator Ekonomi Maret 1999*. Jakarta: BPS
- BPS. 1999. *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1998*. Jakarta: BPS
- BPS. 1999. *Pendapatan Nasional 1995-1998*. Jakarta: BPS
- BPS. 1998. *Publikasi Statistik Impor 1997*. Jakarta: BPS
- BPS. 1998. *Statistik Impor 1997*. Jakarta: BPS
- BPS. 1996. *Statistik Industri Besar Dan Sedang Volume 1, 1996*. Jakarta: BPS
- BPS. 1999. *Ulasan Ringkas Survei Angkatan Kerja Nasional 1998*. Jakarta: BPS
- LIPI. 1994. *Indonesia Dan AFTA Pandangan Pemerintah Dan Swasta*. Jakarta: LIPI
- Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan. 1999. *Tinjauan Perdagangan Indonesia Semester I, 1999*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan
- The World Bank. 1998 *Indonesia In Crisis Macro Economic Up Date, July 16 1998*. Washington DC: The World Bank

**Jurnal Dan Artikel**

- Ahamad H. A. dan Makhaer P. 1999. Reorganisasi Platform Pembangunan Ekonomomi Berecermin Dari Krisis Menatap Masa Depan dalam Profil Indonesia *Jurnal Tahunan CIDES No. 4/ 1998-1999*. Jakarta: CIDES
- A. Irawan J. H. 1998. Indonesia Menyongsong Liberalisasi Ekonomi Global ? dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "Potensia" Th. VIII No. 22 Juni 1998*. Bandung: UNIKA Parahiyangan
- Arif Ramelan Karseno. 1997. Industri Globalisasi Dan Permasalahan Indonesia dalam *Jurnal Kebangsaan Volume 1 No. 2*
- Miriam Budiardjo. 1996. Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik dalam *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: AIPI



Miyasto. 1999. Krisis Ekonomi Dan Aplikasinya Bagi Perekonomian Indonesia dalam Profil Indonesia *Jurnal Tahunan CIDES No. 4/ 1998-1999*. Jakarta: CIDES

M. Baiquni. 1998. Membangun Pusat Di Pinggiran Pengembangan Wilayah Melalui Kerjasama Ekonomi Negara ASEAN dalam *Jurnal Kebangsaan Dan Administrasi Publik Volume. 2 No. 2 November 1998*. Yogyakarta. Program Pasca Sarjana UGM Magister Administrasi Publik

Ginanjar Kartasasmita. 1991. Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Martabat Dan Kualitas Manusia Di Dalam Persaingan Global dalam *Analisis CSIS Th. XX No. 1 Januari-Februari 1991*. Jakarta: CSIS

LIPI. 1994. Indonesia Dan AFTA Pandangan Pemerintah Swasta dalam *Laporan Penelitian*. Jakarta: LIPI

Supranto. 1992. Perkembangan Ekspor Indonesia Menuju Pasar Global dalam *Analisis CSIS-5 1992*. Jakarta: CSIS

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dalam *Analisis CSIS-4 April 1993*. Jakarta: CSIS

Pande Radja Silalahi. 1996. Pasang Surut Proteksi Dan Monopoli Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pemasaran dalam *Analisis CSIS Maret 1996*. Jakarta: CSIS

Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia dalam *Analisis CSIS No. 1 Th. 1996*. Jakarta CSIS

Sabana Kartasasmita. 1991. Kecenderungan Dan Globalisasi Ekonomi dalam *Analisis CSIS Th. XX No. 3 Mei-Juni 1991*. Jakarta: CSIS

Sjafrizal. 1993. Indonesia Menghadapi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. *Analisis CSIS 1993-1994*. Jakarta: CSIS

Sunardi Purwaatmoko. 1998. *Dampak Krisis Moneter Terhadap Liberalisasi Perdagangan Sebuah Tinjauan Teoritis* dari artikel yang disampaikan dalam Diskusi Panel HIMAHI Friendship Universitas Jember

#### **Koran**

Bisnis Indonesia Juni 1996. Ekonomi Berbasis Industri Siapa Yang Memetik Manfaat

Bisnis Indonesia 7 Juni 1996. Peningkatan Daya Saing Dan Efektifitas Birokrasi



- Bisnis Indonesia 8 Juli 1996. Meningkatkan Efisiensi Dan Pemerataan
- Bisnis Indonesia 9 Juli 1996. Tenaga Kerja Dalam Transformasi
- Bisnis Indonesia 6 September 1996. Arah Reformasi Sektor Industri Manufaktur
- Jaya Karta 19 Juni 1996. Strategi Dan Daya Saing Indonesia Menghadapi Globalisasi Ekonomi
- Kompas Desember 1995. Kwik Kian Gie Ekonomi Penyusutan Dan Daya Saing
- Kompas Juni 1997
- Kompas Juni 1997. Sektor-Sektor Yang Lapar Bantuan
- Kompas 2 Oktober 1997. Sidang MU PBB Bahas Krisis Keuangan
- Kompas 2 Desember 1998. Krisis Ekonomi Tragedi Tak Terlupakan
- Kompas 9 Februari 2000. Usaha Kecil Menengah Belum Juga Tersentuh
- Kompas 26 Februari 2000. Pemerintah Tidak Sigap Atasi Pengangguran
- Kompas 26 Februari 2000. Terbentuk Hubungan Industrial Indonesia
- Kompas 28 Februari 2000. Indonesia Incar Pasar Eropa Timur
- Kompas 20 April 2000. Peningkatan Daya Saing Indonesia Meningkat
- Kompas 4 Mei 2000. Pemerintah Beri Keringanan Bea Masuk Sarana Industrialisasi
- Kompas 12 Juni 2000. Sistem Perekonomian Indonesia Masih Tetap Terburuk Di Asia
- Kompas 7 Juli 2000. Pemerintah Harus Susun Konsep Penghapusan Hutang
- Kompas 21 Juli 2000. Disempurnakan UU Pasar Modal UU PT Dan UU Kepailitan
- Kompas 25 Juli 2000. BUMN Masih Tetap Dominan
- Kompas 27 Juli 2000. Prakarsa Jakarta Merestrukturisasi Utang 5 Miliar Dollar AS
- Kompas 29 Juli 2000. Porsi Pasar Mebel Indonesia 2,5%



Kompas 2 Agustus 2000. Pelanggaran HAKI Patut Disayangkan

Merdeka Juni 1996. Kendala Ekspor Unggulan Di Indonesia

Republika 14 Juni 1996. Kompetensi Peningkatan Daya Saing Nasional

Suara Pembaharuan 4 Juni 1996. Dampak Mikro Dari Proses Industrialisasi

Surabaya Post 14 Juni 1996

Surabaya Post 21 Juni 1996. Manajer kita Tak Siap Bersaing

Warta Ekonomi No. 09/ Th. IX 21 Juli 1997. Deregulasi Juli 1997

### Majalah

Adji Nusuantoro. 1998. INDRA: Harapan Kesekian dalam *Majalah Bank Dan Manajemen No. 45*

Iskandar Andi Nuhung. 1997. Tinjauan Perekonomian Indonesia dalam *Majalah Mimbar Alamiyah Th. VI No. 27 Desember 1997*. Jakarta. Universitas Islam Jakarta

J. B. Kristiadi. 1997. Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Abad 21 dalam *Majalah Manajemen Pembangunan No. 21/ V-1997*

Muskoer. 1997. Pengusaha Klien Kewirausahaan Dan Globalisasi Ekonomi dalam *Majalah Prima edisi XVIII Th. 1996*

Priyono Tjiptohetiyanto. Keadaan Tantangan Strategi Pengembangan SDM Menghadapi Era Globalisasi dalam *Majalah Manajemen Pembangunan No. 21/ V-1997*

Sudhamek AWS. 1999. Jangan Menjadi Kodok Rebus dalam *Majalah Usahawan No. II Th. XXVIII November 1999*

Wiwik Lestari. 1999. Kualitas Sebagai Bahasa Bisnis Dunia dalam *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia No. II Th. XXVIII November 1999*



**KODE KLASIFIKASI INDUSTRI**

**I. Sub Sektor**

No	Kode	Jenis Industri
1.	31	Industri makanan, minuman dan tembakau
2.	32	Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
3.	33	Industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk alat rumah tangga
4.	34	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
5.	35	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi dan batu bara
6.	36	Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara
7.	37	Industri logam dasar
8.	38	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya
9.	39	Industri pengolahan lainnya

Sumber: BPS, Statistik Industri Besar dan Sedang, Vol. I, 1996



**II. Golongan Pokok**

No	Kode	Jenis Industri
1.	311 312	Industri makanan
2.	311 313	Industri minuman
3.	311 314	Industri pengolahan tembakau dan bumbu rokok
4.	311 321	Industri tekstil
5.	311 322	Industri pakaian jadi, kecuali alas kaki
6.	311 323	Industri kulit dan barang dari kulit kecuali untuk alas kaki
7.	311 324	Industri alas kaki
8.	311 331	Industri kayu, rotan, runput dan sejenisnya
9.	311 332	Industri perabotan dan kelengkapan rumah tangga serta alat dapur dari bahan kayu, bambu dan rotan
10.	311 341	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya
11.	311 342	Industri percetakan dan penerbitan
12.	311 351	Industri bahan kimia industri
13.	311 352	Industri kimia lain
14.	311 353	Industri pertanian dan pengilangan minyak bumi serta gas bumi
15.	311 354	Industri barang-barang dasar dari hasil kilang minyak bumi dan batu bara
16.	311 355	Industri karet dan barang dari karet
17.	311 356	Industri barang dari plastik
18.	311 361	Industri porselin
19.	311 362	Industri gelas dan barang dari gelas
20.	311 363	Industri semen, kapur dan barang semen dan kapur
21.	311 364	Industri tanah liat
22.	311 369	Industri barang galian lain bukan logam
23.	311 371	Industri logam dasar besi dan baja
24.	311 372	Industri logam dasar bukan besi
25.	311 381	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya
26.	311 382	Industri mesin dan peralatannya kecuali mesin listrik
27.	311 383	Industri mesin, peralatan dan peralatan listrik serta keperluan listrik
28.	311 384	Industri alat angkutan
29.	311 385	Industri peralatan potensial, ilmu pengetahuan, pengukuran dan pengaturan
30.	311 390	Industri pengolahan lain

Sumber: BPS, Statistik Industri Besar dan Sedang, Vol. I, 1996



## III. Sub Golongan

No	Kode	Jenis Industri
1.	31111	Industri pemotongan hewan
2.	31112	Industri pengolahan dan pengawetan daging
3.	31121	Industri susu
4.	31122	Industri makanan dari susu
5.	31123	Industri es krim
6.	31131	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran
7.	31132	Industri pemotongan buah-buahan dan sayuran
8.	31133	Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran
9.	31134	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
10.	31135	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
11.	31139	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran
12.	31141	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya
13.	31142	Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya
14.	31143	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya
15.	31144	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya
16.	31145	Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya
17.	31149	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya
18.	31151	Industri minyak kasar/ minyak makan dari nabati dan hewani
19.	31152	Industri margarin
20.	31153	Industri minyak goreng dari minyak kelapa
21.	31154	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit
22.	31155	Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani
23.	31159	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani
24.	31161	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
25.	31162	Industri penggilingan padi dan pembersihan padi-padian lainnya
26.	31163	Industri pengupasan dan pembersihan kopi
27.	31164	Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi
28.	31165	Industri pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang terpisah dari usaha pertanian lainnya
29.	31166	Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian
30.	31167	Industri kopra
31.	31168	Industri tepung terigu
32.	31169	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian dan biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya
33.	31171	Industri makroni, mie, spaghetti, bihun, so'undan sejenisnya
34.	31179	Industri roti, kue kering dan sejenisnya



35.	31181	Industri gula pasir
36.	31182	Industri gula merah
37.	31183	Industri gula lainnya
38.	31184	Industri sirop
39.	31189	Industri pengolahan gula lainnya selain sirop
40.	31191	Industri bubuk coklat
41.	31192	Industri makanan dari coklat dan kembang gula
42.	31211	Industri pati ubi kayu
43.	31212	Industri berbagai macam pati palma
44.	31219	Industri pati lainnya
45.	31221	Industri pengolahan teh
46.	31222	Industri pengolahan kopi
47.	31231	Industri es batu
48.	31232	Industri macam-macam es
49.	31241	Industri kecap
50.	31242	Industri tauco
51.	31243	Industri tempe
52.	31244	Industri oncom
53.	31245	Industri tahu
54.	31246	Industri keripik/ peyek dari kacang kedele/ kacang lainnya
55.	31249	Industri makanan lainnya dari kedele/ kacang lainnya
56.	31251	Industri berbagai macam kerupuk
57.	31252	Industri makanan sejenis kerupuk
58.	31261	Industri bumbu masak
59.	31262	Industri penyedap masakan
60.	31271	Industri petis dan terasi
61.	31272	Industri kue-kue basah
62.	31279	Industri makanan lainnya
63.	31281	Industri ransum makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya
64.	31282	Industri konsentrat makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya
65.	31310	Industri minuman keras
66.	31320	Industri anggur dan sejenisnya
67.	31330	Industri malt dan minuman yang mengandung malt
68.	31340	Industri minuman ringan/ soft drink
69.	31410	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau dan bumbu rokok
70.	31420	Industri rokok kretek
71.	31430	Industri rokok putih
72.	31440	Industri rokok lainnya
73.	31490	Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot
74.	32111	Industri pemintalan benang



75.	32112	Industri benang jahit
76.	32113	Industri penyempurnaan benang
77.	32114	Industri pertenunan
78.	32115	Industri penyempurnaan kain
79.	32116	Industri percetakan kain
80.	32117	Industri batik
81.	32121	Industri barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian
82.	32122	Industri barang tekstil jadi untuk keperluan kesehatan
83.	32123	Industri karung goni
84.	32129	Industri bagor dan karung lainnya
85.	32130	Industri perajutan
86.	32140	Industri permadani
87.	32151	Industri tali
88.	32152	Industri barang-barang dari tali
89.	32160	Industri kapuk
90.	32190	Industri tekstil lainnya
91.	32210	Industri pakaian jadi dari tekstil
92.	32220	Industri pakaian jadi dari kulit dan sejenisnya
93.	32290	Industri pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit
94.	32311	Industri pengawetan kulit
95.	32312	Industri penyamakan kulit
96.	32331	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi
97.	32332	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/ industri
98.	32333	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan
99.	32339	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya
100.	32411	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
101.	32412	Industri sepatu olah raga
102.	32413	Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan industri
103.	32419	Industri alas kaki lainnya
104.	32420	Industri alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastik, karet dan kayu
105.	33111	Industri penggergajian kayu
106.	33112	Industri molding dan komponen bahan bangunan
107.	33113	Industri kayu lapis
108.	33114	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
109.	33115	Industri kayu lapis aneka inti
110.	33116	Industri verner
111.	33120	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati
112.	33131	Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu
113.	33132	Industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu



114.	33140	Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel
115.	33151	Industri pengawetan kayu
116.	33152	Industri pengawetan rotan dan sejenisnya
117.	33190	Industri barang lain dari kayu, gabus, sortasi rotan dan peti mati
118.	33211	Industri perabot dan kelengkapan rumah tangga dari kayu
119.	33212	Industri perabot dan kelengkapan rumah tangga dari bambu dan atau rotan
120.	33220	Industri alat-alat dapur dari kayu, bambu dan rotan
121.	33230	Industri perabot dan kelengkapan rumah tangga selain dalam 3321 dan 3322
122.	34111	Industri bubur kertas (pulp)
123.	34112	Industri kertas budaya
124.	34113	Industri kertas industri
125.	34114	Industri kertas tissue
126.	34119	Industri kertas lainnya
127.	34120	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton
128.	34190	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak termasuk dalam golongan manapun
129.	34200	Industri percetakan dan penerbitan
130.	35111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
131.	35112	Industri kimia dasar anorganik gas industri
132.	35113	Industri kimia dasar anorganik pigment
133.	35114	Industri kimia dasar anorganik tidak termasuk golongan manapun
134.	35115	Industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)
135.	35116	Industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen
136.	35117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara
137.	35118	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus
138.	35119	Industri kimia dasar organik yang tidak termasuk golongan manapun
139.	35121	Industri pupuk alam/ non sintetis
140.	35122	Industri pupuk buatan tunggal
141.	35123	Industri pupuk buatan majemuk dan campuran
142.	35129	Industri pupuk buatan lainnya
143.	35131	Industri damar buatan dan bahan plastik
144.	35132	Industri karet buatan
145.	35133	Industri serat buatan
146.	35141	Industri bahan baku pemberantas hama
147.	33142	Industri bahan baku pemberantas hama (industri formulasi)



- |      |       |   |
|------|-------|---|
| 148. | 33143 | Ind ustri zat pengantar tumbuh  |
| 149. | 33210 | Industri cat, permis dan lak  |
| 150. | 33221 | Industri bahan farmasi  |
| 151. | 33222 | Industri farmasi  |
| 152. | 33223 | Industri simplisia(bahan jamu)  |
| 153. | 33224 | Industri jamu   |
| 154. | 33231 | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi |
| 155. | 33232 | Industri kosmetik   |
| 156. | 33291 | Industri perekat  |
| 157. | 33292 | Industri barang peledak   |
| 158. | 33293 | Industri tinta  |
| 159. | 33294 | Industri minyak atsiri  |
| 160. | 33295 | Industri korek api  |
| 161. | 33299 | Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya                                 |
| 162. | 33310 | Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi                                |
| 163. | 33320 | Industri pemurnian dan pengilangan gas bumi                                   |
| 164. | 33410 | Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi                          |
| 165. | 33420 | Industri minyak pelumas   |
| 166. | 33430 | Industri pembersihan minyak pelumas bekas                                     |
| 167. | 33440 | Industri barang-barang dari batu bara   |
| 168. | 33511 | Industri ban luar dan ban dalam   |
| 169. | 33512 | Industri vulkanisir ban   |
| 170. | 33521 | Industri pengasapan karet   |
| 171. | 33522 | Industri remiling karet   |
| 172. | 33523 | Industri crumb karet (karet remah)  |
| 173. | 33591 | Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga                |
| 174. | 33592 | Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri                    |
| 175. | 33593 | Industri barang-barang dari karet belum termasuk 33591 dan 33592              |
| 176. | 33601 | Industri pipa dan slang dari plastik  |
| 177. | 33602 | Industri barang plastik untuk alas kaki                                       |
| 178. | 33603 | Industri barang plastik untuk lembaran  |
| 179. | 33604 | Industri media rekam dari plastik   |
| 180. | 33605 | Industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga                     |
| 181. | 33606 | Industri kemasan dari plastik   |
| 182. | 33607 | Industri barang-barang dan peralatan teknik/ industri dari plastik            |
| 183. | 33609 | Industri plastik lainnya  |
| 184. | 36111 | Industri perabot rumah tangga dari porselin                                   |
| 185. | 36112 | Industri bahan bangunan dari porselin   |
| 186. | 36113 | Industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari porselin             |
| 187. | 36119 | Industri barang-barang lainnya dari porselin                                  |



188.	36211	Industri perabot rumah tangga dari gelas
189.	36212	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas
190.	36213	Industri barang dari gelas untuk keperluan sampul
191.	36214	Industri kemasan dari gelas
192.	36219	Industri barang-barang lainnya dari gelas
193.	36221	Industri kaca lembaran
194.	36222	Industri kaca pengaman
195.	36310	Industri semen
196.	36321	Industri barang dari semen untuk konstruksi
197.	36329	Industri barang lainnya dari semen
198.	36331	Industri kapur
199.	36332	Industri barang dari kapur
200.	36410	Industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga
201.	36421	Industri batu bata dari tanah liat
202.	36422	Industri genteng dari tanah liat
203.	36423	Industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat
204.	36429	Industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya
205.	36490	Industri barang lainnya dari tanah liat
206.	36911	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
207.	36919	Industri barang dari batu untuk keperluan lainnya
208.	36921	Industri barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
209.	36922	Industri dari marmer untuk keperluan bahan bangunan
210.	36929	Industri dari marmer untuk keperluan lainnya
211.	36931	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan
212.	36932	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
213.	36939	Industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya
214.	36990	Industri barang galian bukan logam ytdl
215.	37101	Industri besi dan baja dasar
216.	37102	Industri pengecoran besi dan baja
217.	37103	Industri penggilingan baja
218.	37104	Industri penempaan baja
219.	37201	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
220.	37202	Industri pengecoran logam dasar bukan besi
221.	37203	Industri penggilingan logam dasar bukan besi
222.	37204	Industri ekstrusi bukan besi
223.	37205	Industri penempaan logam bukan besi
224.	38111	Industri alat pertanian dari logam
225.	38112	Industri alat pertukangan dan alat pemotong dari logam
226.	38113	Industri alat-alat dapur dari aluminium
227.	38114	Industri alat-alat dapur dari logam bukan aluminium



228.	38119	Industri alat pertanian, alat pertukangan, alat pemotong dan alat dapur ytdl
229.	38120	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam
230.	38131	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
231.	38132	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
232.	38133	Industri konstruksi baja siap pasang untuk bangunan
233.	38134	Industri pengerjaan pelat, bejana tekan dan tangki dari baja untuk industri
234.	38139	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
235.	38191	Industri paku, mur, baut
236.	38192	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam
237.	38193	Industri macam-macam wadah dari logam
238.	38194	Industri kawat logam
239.	38195	Industri pipa dan sambungan pipa dari wire
230.	38196	Industri pembuatan profil dengan las
231.	38197	Industri lampu dari logam
232.	38199	Industri barang logam lainnya
233.	38211	Industri mesin uap, turbin dan kincir
234.	38212	Industri motor pembakaran dalam
235.	38213	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula
236.	38214	Industri pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula
237.	38221	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya
238.	38222	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian
239.	38231	Industri mesin pengolahan/ pengerjaan logam dan perlengkapannya
240.	38232	Industri mesin pengolahan/ pengerjaan kayu dan perlengkapannya
241.	38233	Industri pemeliharaan dan perbaikan dari mesin untuk pengolahan logam dan kayu
242.	38241	Industri mesin tekstil
242.	38242	Industri mesin percetakan
243.	38243	Industri bangunan lepas pantai
244.	38244	Industri perbaikan bangunan lepas pantai
245.	38245	Industri mesin pengolahan lainnya
246.	38246	Industri komponen dan suku cadang mesin industri khusus
247.	38247	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus
248.	38251	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
249.	38252	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
250.	38253	Industri mesin kantor, komputer dan akuntansi elektronik
251.	38291	Industri mesin jahit
252.	38292	Industri alat berat dan alat pengangkat
253.	38293	Industri mesin fluida



254.	38294	Industri mesin pendingin
255.	38295	Industri dan perlengkapan ytdl
256.	38296	Industri komponen/ suku cadang mesin lainnya dan perlengkapan ytdl
257.	38297	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin lainnya dan perlengkapan ytdl
258.	38111	Industri mesin pembangkit listrik
259.	38312	Industri motor listrik
260.	38313	Industri pengubah tegangan, pengubah arus dan pengontrol tegangan
261.	38314	Industri panel listrik dan switch gear
262.	38315	Industri mesin las listrik
263.	38316	Industri mesin listrik lainnya
264.	38317	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik
265.	38321	Industri radio, televisi dan alat elektronik sejenis untuk hiburan
266.	38322	Industri alat komunikasi
267.	38323	Industri peralatan dan perlengkapan sinar X dan sejenisnya
268.	38324	Industri sub assembly dan komponen elektronika
269.	38325	Industri piranti lunak komputer
270.	38326	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi lainnya
271.	38330	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga
272.	38391	Industri akumulator listrik
273.	38392	Industri batu baterai kering
274.	38393	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan ultra violet
275.	38394	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)
276.	38395	Industri komponen lampu listrik
277.	38396	Industri kabel listrik dan telepon
278.	38399	Industri alat listrik dan komponen lainnya
279.	38411	Industri kapal/ perahu
280.	38412	Industri motor pembakaran dalam untuk kapal
281.	38413	Industri peralatan dan perlengkapan kapal
282.	38414	Industri perbaikan kapal
283.	38415	Industri pemotongan kapal
284.	38421	Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya
285.	38422	Industri perbaikan dan perawatan kereta api
287.	38431	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
288.	38432	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
289.	38433	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan roda empat atau lebih
290.	38441	Industri kendaran bermotor roda dua dan tiga
291.	38442	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor



		roda dua dan tiga
292.	38443	Industri sepeda dan becak
293.	38444	Industri perlengkapan sepeda dan becak
294.	38451	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
295.	38452	Industri perbaikan dan perawatan pesawat terbang
296.	38490	Industri pembuatan alat pengangkut lainnya
297.	38511	Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual
298.	38512	Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektrik
299.	38513	Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektronik
300.	38514	Industri aparat untuk peragaan
301.	38521	Industri kaca mata
302.	38522	Industri teropong dan optik untuk ilmu pengetahuan
303.	38523	Industri kamera photography
304.	38524	Industri kamera cinematografi, proyektor dan perlengkapannya
305.	38530	Industri jam dan sejenisnya
306.	39011	Industri permata
307.	39012	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia
308.	39013	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia
309.	39014	Industri barang perhiasan untuk keperluan pribadi bukan dari logam mulia
310.	39015	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi bukan dari logam mulia
311.	39021	Industri alat musik tradisional
312.	39022	Industri alat musik non-tradisional
313.	39030	Industri alat-alat olah raga
314.	39040	Industri mainan anak-anak
315.	39051	Industri alat-alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
316.	39052	Industri pipa mesin tulis/ gambar
317.	39059	Industri barang tulis menulis lainnya yang belum termasuk golongan manapun
318.	39060	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun
319.	39090	Industri pengolahan lain yang belum tergolong dimanapun

Sumber: BPS, Statistik Besar dan Sedang, Vol. I, 1996



Lampiran 2

Tabel Perkembangan industri (jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserap)  
berdasar skala usaha tiap sub sektor

Kode industri	Tahun	Banyaknya perusahaan			Tenaga kerja		
		Besar/ sedang	Kecil	Rumah tangga	Besar/ sedang	Kecil	Rumah tangga
31	1991	4 459	38 271	833 228	643 021	309 603	1 483 593
	1992	4 692	-	-	671 213	-	-
	1993	4 823	35 067	823 309	723 686	253 612	1 519 619
	1994	4 826	57 080	840 590	739 133	435 817	1 563 468
	1995	5 336	66 318	856 476	895 762	517 545	1 595 907
	1996	5 452	79 073	881 579	937 744	617 085	1642 282
	1997	5 713	91 922	963 213	784 667	780 136	1 794 794
32	1991	3 935	19 778	298 761	907 161	174 734	1 348 648
	1992	4 232	-	-	1 079 565	-	-
	1993	4 258	27 455	355 521	1 188 759	230 520	469 995
	1994	4 423	29 295	309 690	1 255 536	272 770	399 607



	1995	4 958	33 779	317 378	1 312	331 353	403
					768		052
	1996	5 130	38 932	357 026	1 523	381 901	453
					610		403
	1997	5 261	38 258	359 240	1 399	375 294	456
					827		214
33	1991	1 948	27 277	1 009	445 209	216 185	1 460
				670			646
	1992	2 127	-	-	374 746	-	-
	1993	2 256	25 778	943 210	503 045	189 740	1 403
							865
	1994	2 487	32 414	918 910	527 098	272 936	1 340
							114
	1995	2 913	34 982	906 234	538 935	286 935	1 262
							810
	1996	3 175	41 054	886 335	587 375	336 740	1 235
							081
	1997	3 240	39 740	900 339	581 763	325 964	1 254
							595
34	1991	703	1 272	6 178	102 429	11 415	12 224
	1992	758	-	-	118 896	-	-
	1993	779	1 091	8 792	123 228	9 147	16 532
	1994	833	2 953	10 686	132 461	25 514	21 892
	1995	905	4 101	12 260	149 016	39 634	26 445
	1996	946	5 831	16 459	167 442	56 354	35 502
	1997	1 004	6 293	17 749	174 399	60 823	38 285
35	1991	1 993	1 409	1 329	377 775	11 647	2 542
	1992	2 098	-	-	392 207	-	-
	1993	2 154	1 152	10 702	403 156	13 484	25 622
	1994	2 236	2 694	12 698	444 040	25 631	19 388



	1995	2 412	3 310	14 692	472 334	30 483	29 682
	1996	2 491	4 310	21 034	567 948	39 692	42 495
	1997	2 590	4 529	22 151	473 306	41 708	44 751
36	1991	1 393	24 411	153 252	129 919	171 789	300
							353
	1992	1 461	-	-	136 755	-	-
	1993	1 498	27 825	160 764	150 006	197 148	320
							387
	1994	1 603	30 545	176 394	156 904	271 423	370
							867
	1995	2 027	33 787	190 072	179 847	275 105	390
							623
	1996	2 174	41 901	214 339	226 096	341 172	440
							495
	1997	2 382	43 753	220 533	232 084	356 252	453
							225
37	1991	116	-	-	37 520	-	-
	1992	127	-	-	40 043	-	-
	1993	139	-	-	43 546	-	-
	1994	151	275	344	46 774	1 729	650
	1995	169	317	1 057	47 644	2 670	1 998
	1996	184	771	3093	48 760	6 494	5 847
	1997	190	623	1 521	54 508	6 494	5 847
38	1991	1 658	7 824	29 395	305 179	63 128	62 327
	1992	1 821	-	-	343 666	-	-
	1993	1 912	4 521	36 086	368 581	37 853	82 141
	1994	2 074	8 739	46 886	437 178	63 440	98 543
	1995	2 389	8 993	51 129	499 719	68 362	105
							386



Tabel  
Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri  
yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor  
(miliar rupiah)

Sektor	1994	1995r	1996r	1997	1998	Jumlah <sup>1)</sup> 1968 s.d. 1998	
						Nilai	Proyek
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	7.401,0	10.097	16.072,1	14.807,7	5.315,1	84.113,8	1.709
Pertanian	4.544,8	7.190,9	15.284,4	13.737,5	4.757,9	67.379,1	1.094
Kehutanan	261,5	1.476,4	45,6	165,5	542,9	7.006,4	299
Perikanan	2.594,7	1.429,7	742,1	904,7	14,3	9.728,3	316
Pertambangan	112,4	205,1	460,1	126,3	116,3	5.747,6	174
Industri	31.921,7	43.341,8	59.217,7	79.334,3	44.908,0	432.320,3	6.464
Makanan	4.044,8	5.106,1	13.748,3	13.048,6	6.711,8	54.589,9	983
Tekstil	5.518,3	7.176,6	3.365,8	6.831,3	1.137,6	54.922,1	1.338
Kayu	1.171,2	2.009,8	1.128,9	762,2	1.971,9	18.288,6	814
Kertas	3.749,3	6.032,6	12.763,9	11.841,9	12.754,1	67.338,5	410
Kimia dan farmasi	5.377,8	9.021,6	13.392,7	22.497,2	15.583,2	117.810,5	1.328
Mineral bukan logam	8.546,9	9.088,9	7.964,8	11.638,7	3.469,0	62.738,0	437
Logam dasar	1.663,9	2.380,5	4.460,7	8.021,5	1.786,3	28.495,1	211
Barang-barang logam	1.783,5	2.338,5	2.375,9	4.683,9	960,9	27.017,7	841
Lain-lain	66,0	133,3	16,7	9,0	533,2	1.119,9	102
Konstruksi	731,1	847,7	1.550,0	877,0	1.992,0	7.881,0	158
Perhotelan	4.341,9	3.792,5	5.019,3	2.587,9	1.150,4	31.636,8	715
Pengangkutan	3.119,8	3.965,9	3.065,0	4.649,4	3.260,5	26.131,0	989
Perumahan dan perkantoran	3.803,8	5.337,2	9.425,7	4.300,5	1.547,5	36.811,6	368
Jasa lainnya	1.857,4	2.265,8	5.905,3	13.189,8	2.459,5	26.534,9	352
Jumlah	53.289,1	69.853,0	100.715,2	119.872,9	60.749,3	651.177,0	10.929,0

1) Setelah diperhitungkan proyek-proyek yang dibatalkan dan beralih status  
Penjumlahan dari bulan Juli 1968 s.d. Desember 1998

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tabel  
Rencana Penanaman Modal Asing  
yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor  
(juta \$)

Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	Jumlah <sup>1)</sup> 1967 s.d. 1998	
						Nilai	Proyek
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	729,9	1.384,3	1.521,5	463,7	998,2	7.367,9	318
Pertanian	690,4	1.153,1	1.306,2	436,6	965,2	6.091,6	193
Kehutanan	-	-	135,5	-	-	639,3	26
Perikanan	39,5	231,2	79,8	27,1	33,0	637,0	99
Pertambangan	-	-	1.696,7	1,6	0,3	9.531,8	205
Industri	18.738,8	26.891,9	16.072,2	23.017,3	8.388,2	139.240,2	3.722
Makanan	1.234,8	1.331,8	691,4	572,8	342,0	5.663,4	273
Tekstil	396,4	471,1	514,6	372,6	216,9	7.196,8	625
Kayu	68,1	262,9	101,1	69,7	70,8	1.474,6	290
Kertas	5.120,1	2.540,5	2.907,3	5.353,3	40,8	25.925,1	105
Kimia dan farmasi	7.743,2	19.404,4	7.404,6	12.376,4	6.178,8	65.054,7	823
Mineral bukan logam	631,9	289,3	789,8	1.457,3	237,1	7.116,0	153
Logam dasar	2.081,6	291,7	650,9	357,0	394,4	8.446,7	125
Barang-barang logam	1.423,1	2.258,0	2.938,6	2.331,7	890,5	17.726,8	1.212
Lain-lain	39,6	42,2	73,9	126,5	16,9	636,1	116
Konstruksi	76,5	205,8	296,8	306,8	197,8	1.787,0	331
Perhotelan	343,6	998,8	1.716,5	462,6	451,1	11.199,8	253
Pengangkutan	145,1	5.539,5	694,6	5.900,0	79,0	14.495,0	183
Perumahan dan perkantoran	1.027,8	1.192,0	3.000,3	1.397,6	1.270,9	12.411,2	192
Jasa lainnya	2.622,6	3.702,3	4.932,8	2.282,9	2.177,6	20.461,1	1.336
<b>Jumlah</b>	<b>23.724,3</b>	<b>39.914,7</b>	<b>29.931,4</b>	<b>33.832,5</b>	<b>13.563,1</b>	<b>216.494,0</b>	<b>6.540</b>

1) Setelah diperhitungkan proyek-proyek yang dibatalkan dan beralih status  
Penjumlahan dari bulan Juli 1967 s.d. Desember 1998  
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal



TABEL : NILAI IMPOR DARI NEGARA-NEGARA MITRA DAGANG UTAMA (40 NEGARA)  
(NILAI US\$)

No.	NEGARA	1984	Pangsa (%)	1985	Pangsa (%)	1986	Pangsa (%)	1987	Pangsa (%)	1988	Pangsa (%)	1989	Pangsa (%)
1	JAPAN	7,740,111,091	24.20	9,216,822,169	22.69	8,504,004,902	18.81	8,252,238,368	18.80	4,292,453,844	15.70	415,177,453	11.59
2	UNITED STATES	3,587,849,967	11.22	4,755,906,286	11.71	5,059,811,691	11.79	5,440,904,892	13.05	3,517,325,051	12.87	528,991,908	14.77
3	SINGAPORE	1,877,052,838	5.87	2,387,474,730	5.83	2,875,287,404	6.70	3,410,854,070	8.18	2,542,824,986	9.30	354,735,561	9.91
4	GERMANY/FED. REP. OF	2,472,725,491	7.73	2,819,187,921	6.94	3,001,390,104	6.98	2,628,701,930	6.31	2,395,683,484	8.65	250,461,719	6.99
5	AUSTRALIA	1,541,984,677	4.82	2,015,540,068	4.98	2,535,077,348	5.91	2,428,732,988	5.82	1,760,497,452	6.44	218,233,248	6.04
6	KOREA, REPUBLIC OF	2,165,933,482	6.77	2,451,302,506	6.03	2,411,396,859	5.62	2,321,793,052	5.57	1,527,753,359	5.59	150,398,238	4.20
7	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	1,448,373,252	4.53	1,823,950,152	4.49	1,663,951,937	3.88	1,589,658,989	3.81	994,585,602	3.64	98,697,411	2.76
8	CHINA	1,983,027,587	4.28	1,495,233,386	3.68	1,597,559,982	3.72	1,518,013,792	3.64	906,296,298	3.32	148,638,372	4.15
9	UNITED KINGDOM	710,107,424	2.22	902,498,989	2.22	1,117,900,142	2.60	1,084,423,324	2.50	920,290,890	3.37	61,071,045	1.71
10	FRANCE	788,272,327	2.48	1,063,589,647	2.62	1,005,984,541	2.34	1,018,504,219	2.44	568,105,370	2.08	61,915,503	1.73
11	ITALY	667,823,238	2.09	790,960,086	1.95	1,212,110,719	2.82	917,856,033	2.20	480,387,184	1.78	58,552,225	1.64
12	THAILAND	408,188,177	1.27	737,107,623	1.81	1,095,407,892	2.55	866,675,908	2.08	841,955,895	3.08	139,921,237	3.91
13	MALAYSIA	578,771,651	1.81	768,964,231	1.89	823,738,143	1.92	864,810,588	2.07	626,620,579	2.29	75,389,725	2.11
14	INDIA	318,274,866	1.00	478,847,255	1.18	866,163,289	2.02	697,412,392	1.67	292,300,065	1.07	57,344,585	1.60
15	CANADA	486,776,023	1.55	810,664,172	2.00	785,617,288	1.83	682,384,137	1.64	504,153,096	1.88	68,372,141	1.94
16	SAUDI ARABIA	680,210,253	2.13	943,288,781	2.32	664,593,913	1.55	587,692,227	1.41	515,285,202	1.84	149,024,532	4.18
17	NETHERLANDS	563,735,154	1.78	842,097,991	2.07	482,986,410	1.15	585,905,842	1.38	338,365,432	1.24	33,739,086	0.94
18	SWEDEN	358,111,398	1.11	354,074,834	0.87	718,663,678	1.67	482,019,886	1.18	235,384,506	0.86	21,217,881	0.59
19	IRAN, ISLAMIC REP. OF	248,702,166	0.78	257,027,143	0.63	453,562,068	1.06	444,239,186	1.07	175,029,473	0.64	4,494,653	0.13
20	FINLAND	241,273,855	0.75	252,002,405	0.62	330,822,992	0.77	373,310,909	0.90	248,580,812	0.91	18,160,155	0.51
21	SPAIN	174,081,307	0.54	219,287,824	0.54	345,338,658	0.80	370,368,639	0.89	159,616,728	0.58	23,948,014	0.67
22	BRAZIL	313,457,440	0.98	413,727,051	1.02	412,758,834	0.96	352,348,065	0.85	203,535,805	0.74	46,394,578	1.30
23	BELGIUM	291,966,123	0.91	401,120,122	0.99	393,615,673	0.92	338,148,716	0.81	274,121,632	1.00	29,443,248	0.82
24	SWITZERLAND	266,164,252	0.83	380,625,485	0.94	370,151,763	0.86	335,296,678	0.80	228,054,785	0.83	15,237,468	0.43
25	HONG KONG	240,534,376	0.75	274,595,470	0.68	262,334,256	0.61	325,374,993	0.78	263,881,190	0.96	27,277,777	0.76
26	FRANCE (USSR/FOR REF)	220,302,713	0.69	438,110,622	1.08	378,438,554	0.88	287,304,393	0.69	30,369,077	0.11	9,714,320	0.27
27	AUSTRIA	186,835,328	0.58	315,275,989	0.78	303,798,485	0.71	298,115,397	0.69	176,141,124	0.64	23,027,319	0.64
28	KUWAIT	178,750,307	0.55	195,940,381	0.48	201,959,403	0.47	278,607,448	0.67	188,886,908	0.40	105,811,496	2.95
29	SOUTH AFRICA					153,930,323	0.36	245,298,427	0.59	174,274,183	0.64	13,538,121	0.38
30	ARGENTINA	110,801,719	0.35	224,762,247	0.55	213,906,878	0.50	214,683,824	0.52	91,183,028	0.33	10,788,443	0.30
31	NEW ZEALAND	158,229,779	0.49	295,683,060	0.51	244,527,730	0.57	214,958,860	0.51	142,879,478	0.52	16,594,900	0.48
32	CHILE	197,585,917	0.62	291,280,947	0.72	280,174,543	0.61	188,511,741	0.45	188,443,853	0.40	11,853,575	0.33
33	DENMARK	105,877,648	0.33	105,148,020	0.28	180,963,454	0.44	158,831,615	0.39	50,271,255	0.18	4,870,020	0.14
34	NIGERIA	28,248,516	0.08	172,936,330	0.43	148,302,545	0.35	141,839,749	0.34	54,582,968	0.20	12,467,057	0.35
35	PAKISTAN	32,338,448	0.10	102,630,420	0.25	188,984,024	0.44	128,834,746	0.31	158,857,189	0.57	43,772,144	1.22
36	PHILIPPINES	65,290,415	0.20	61,250,115	0.20	80,593,947	0.21	127,817,802	0.30	65,007,200	0.24	5,967,882	0.17
37	BATAM	42,440,377	0.13	95,973,979	0.14	70,311,258	0.16	117,300,388	0.30	88,047,359	0.32	32,108,328	0.90
38	NETNAM	78,590,411	0.25	158,308,584	0.38	203,548,928	0.47	117,300,388	0.28	420,537,298	1.54	110,327,268	3.08
39	UNITED ARAB EMIRATES	53,435,523	0.17	58,420,804	0.14	40,478,076	0.09	101,560,912	0.24	39,261,882	0.14	10,825,535	0.30
40	NORWAY	73,838,478	0.23	106,330,689	0.27	107,308,417	0.25	67,173,964	0.18	22,161,244	0.08	10,487,543	0.29
SUB TOTAL		31,072,020,930	97.15	39,343,738,484	98.84	41,797,322,574	97.36	40,572,647,083	97.34	28,514,482,384	96.98	3,477,973,881	97.13
NEGARA LAIN-LAIN		911,478,206	2.85	1,284,988,194	3.16	1,131,181,489	2.64	1,107,135,889	2.68	822,378,303	3.01	102,922,710	2.87
TOTAL		31,983,499,136	100.00	40,628,726,678	100.00	42,928,504,043	100.00	41,679,782,972	100.00	27,336,871,687	100.00	3,580,896,591	100.00



Tabel Neraca modal Indonesia tahun 1969/1970-1997/1998 (juta US\$)

PELITA tahun	Sektor pemerintah (neto)	Sektor swasta (neto)	Jumlah (neto)
PELITA I			
1969/1970	340	27	367
1970/1971	322	11	5 473
1971/1972	322	19	0 152
1972/1973	415	48	0 895
1973/1974	562	549	1 111
PELITA II			
1974/1975	571	-131	440
1975/1976	1 918	-1 075	843
1976/1977	1 657	38	1 695
1977/1978	1 345	176	1 521
1978/1979	1576	392	1 968
PELITA III			
1979/1980	1 998	-1 318	680
1980/1981	2 069	-361	1 708
1981/1982	2 712	1 140	3 852
1982/1983	4 085	1 795	5 880
1983/1984	4 783	1 191	5 974
PELITA IV			
1984/1985	2 227	499	2 726
1985/1986	1 788	572	2 360
1986/1987	3 343	1 232	4 575
1987/1988	1 526	1 709	3 235
1988/1989	2 825	-211	2 614
PELITA V			
1989/1990	1 830	575	2 405
1990/1991	924	5 856	6 780
1991/1992	1 418	4 133	5 551
1992/1993	915	4 284	5 199
1993/1994	1 063	4 648	5 711
PELITA VI			
1994/1995	105	4 645	4 750
1995/1996	-209	11 672	11 463
1996/1997	-820	13 488	12 668
1997/1998	4 199	-11 828	-7 629

Sumber: Bank Indonesia



TABEL : NILAI EKSPOR KE NEGARA-NEGARA MITRA DA GANG UTAMA (40 NEGARA) (MILAI US\$)

No.	NEGARA	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Pangsa (%)
1	JAPAN	10,929,040,984	12,288,287,028	12,865,234,013	12,484,872,538	8,116,019,114	1,313,404,423	21.14
2	UNITED STATES	5,828,584,246	6,321,714,051	6,784,658,626	7,148,134,456	7,031,011,585	855,843,282	13.78
3	SINGAPORE	4,149,658,305	3,766,716,347	4,564,805,425	5,467,876,898	5,718,279,143	635,991,471	10.24
4	KOREA, REPUBLIC OF	2,592,971,930	2,916,749,250	3,281,014,412	3,462,333,521	2,567,798,398	488,686,418	7.87
5	CHINA	1,321,675,374	1,741,717,852	2,057,471,588	2,228,238,741	2,832,034,419	222,910,530	3.74
6	NETHERLANDS	1,323,451,872	1,452,380,928	1,666,577,467	1,765,103,014	1,512,286,282	257,055,969	4.14
7	HONG KONG	1,321,484,184	1,657,059,945	1,669,091,842	1,782,285,166	1,864,880,548	161,594,572	2.60
8	TAINAN, PROVINCE OF CHINA	1,635,198,676	1,748,355,862	1,201,525,551	1,517,439,380	1,720,653,500	182,076,028	2.93
9	AUSTRALIA	705,389,477	915,230,575	1,088,977,570	1,485,736,441	1,533,466,985	202,587,680	3.25
10	GERMANY, FED. REP. OF	1,263,444,399	1,381,587,385	1,108,735,241	1,357,235,112	1,401,287,498	161,593,103	2.60
11	MALAYSIA	738,495,589	986,586,571	1,192,938,772	1,238,125,926	1,358,472,111	151,808,192	2.44
12	UNITED KINGDOM	1,038,148,882	1,128,648,820	1,192,938,772	1,238,125,926	1,143,147,848	134,167,172	2.16
13	SPAIN	453,947,486	534,604,462	812,662,896	888,072,849	868,697,820	135,340,772	2.18
14	THAILAND	401,344,009	702,880,385	822,635,646	848,445,454	842,502,532	113,148,996	1.82
15	ITALY	860,671,811	783,729,728	743,573,476	826,066,622	858,776,471	87,977,907	1.37
16	BELGIUM	409,274,595	538,693,785	681,646,277	795,358,116	875,880,925	93,223,390	1.50
17	PHILIPPINES	365,059,718	590,255,614	688,443,253	794,054,287	707,376,621	85,172,173	1.37
18	UNITED ARAB EMIRATES	522,567,417	519,055,614	601,209,711	745,933,621	653,559,857	83,648,698	1.35
19	INDIA	277,747,091	381,023,556	530,974,378	689,502,046	722,894,305	107,124,981	1.72
20	SAUDI ARABIA	413,122,049	448,179,584	515,614,348	579,311,140	595,921,776	47,823,742	0.77
21	FRANCE	426,140,784	519,776,770	564,110,802	489,259,941	547,321,067	73,590,381	1.18
22	CANADA	321,691,416	358,999,062	368,082,697	399,744,318	411,692,504	42,786,113	0.69
23	VIENTIANE	195,808,156	263,629,705	337,445,653	390,328,478	350,606,240	44,687,845	0.72
24	BRAZIL	75,605,437	201,454,977	210,358,792	255,891,523	170,863,076	12,023,301	0.19
25	EGYPT	141,114,437	195,075,153	180,931,890	255,891,523	249,114,259	26,827,905	0.43
26	MEXICO	144,310,033	119,322,026	127,765,531	167,837,935	213,886,101	25,869,877	0.41
27	PAKISTAN	142,396,289	183,751,027	152,250,828	167,051,862	166,610,770	16,445,493	0.26
28	MYANMAR (FORMER BURMA)	140,977,871	80,418,789	78,017,675	156,874,001	137,270,448	10,153,967	0.16
29	DEHRA DUN	35,223,730	111,327,903	125,820,857	148,748,858	167,338,041	8,393,650	0.13
30	BANGLADESH	80,824,816	80,303,293	107,067,023	145,843,195	143,187,086	19,328,408	0.31
31	SRI LANKA	85,657,348	85,862,472	107,067,023	144,398,862	184,337,188	24,778,820	0.40
32	SOUTH AFRICA	23,712,046	102,959,223	107,067,023	137,492,312	182,232,868	23,222,162	0.37
33	TURKEY	64,730,318	85,862,472	107,067,023	130,016,341	157,350,354	20,671,794	0.33
34	FINLAND	30,481,234	42,412,901	113,568,849	128,073,420	145,065,515	10,247,117	0.16
35	IRAN, ISLAMIC REP. OF	30,870,178	132,215,881	81,184,882	98,518,829	108,187,947	24,246,287	0.39
36	GREECE	63,130,738	78,841,740	98,881,211	98,881,211	48,851,825	5,084,517	0.08
37	POLAND	98,733,480	105,439,567	117,138,193	87,184,107	102,184,033	10,881,874	0.17
38	CHILE	47,744,907	104,388,730	68,159,387	65,822,730	88,828,287	8,183,887	0.13
39	FRAN. USSR (FORM. REF)	80,680,917	134,178,748	133,963,739	85,850,367	8,888,186	4,838,649	0.07
40	SUB TOTAL	38,760,851,073	43,808,602,367	48,193,421,980	51,588,388,840	48,824,873,816	5,954,137,303	85.84
	NEGARA LAUMBA	1,352,585,386	1,508,381,785	1,821,332,482	1,875,235,412	2,222,884,878	258,702,864	4.18
	TOTAL	40,113,436,459	45,316,984,152	49,014,754,462	53,463,624,252	48,847,838,585	6,212,840,167	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (dibawah)

TAXX



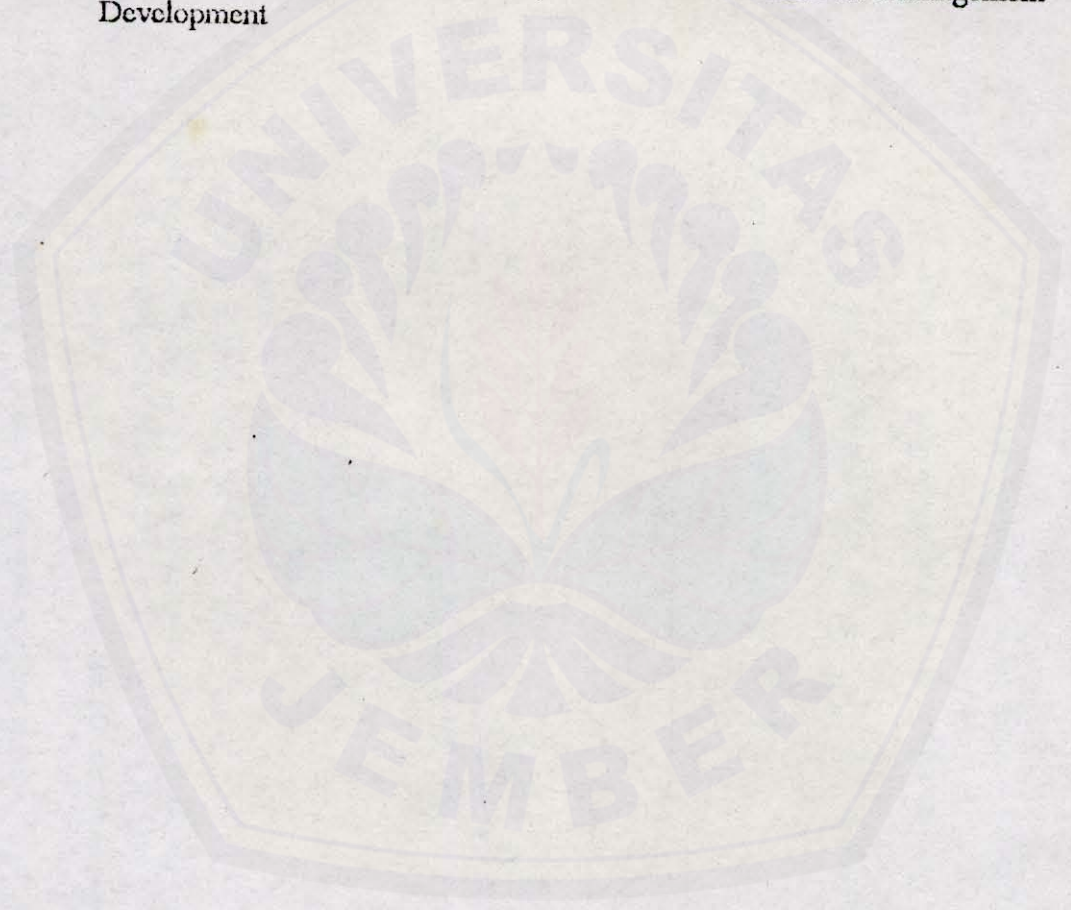
Tabel Daya saing internasional 47 negara

Negara	Peringkat					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. AS	1	1	1	1	1	1
2. Singapura	2	2	2	2	2	2
3. Finlandia	18	15	4	5	3	3
4. Belanda	8	7	6	4	5	4
5. Swiss	5	9	7	7	6	5
6. Luksemburg	-	8	12	9	4	6
7. Irlandia	22	22	15	11	11	7
8. Jerman	6	10	14	14	9	8
9. Swedia	12	14	16	17	14	9
10. Eslandia	25	25	21	19	17	10
11. Kanada	13	12	10	10	10	11
12. Denmark	7	5	8	8	8	12
13. Australia	16	21	18	15	12	13
14. Hongkong	3	3	3	3	7	14
15. Inggris	15	19	11	12	15	15
16. Norwegia	10	6	5	6	13	16
17. Jepang	4	4	9	18	16	17
18. Austria	11	16	20	22	19	18
19. Perancis	19	20	19	21	21	19
20. Belgia	21	17	22	23	22	20
21. Selandia Baru	9	11	13	13	20	21
22. Taiwan	14	18	23	16	18	22
23. Israel	24	24	26	25	24	23
24. Spanyol	28	29	25	27	23	24
25. Malaysia	23	23	17	20	27	25
26. Cile	20	13	24	26	25	26
27. Hongaria	41	39	36	28	26	27
28. Korsel	26	27	30	35	38	28
29. Portugal	32	36	32	29	28	29
30. Italia	29	28	34	30	30	30
31. Cina	31	26	27	24	29	31
32. Yunani	40	40	37	36	31	32
33. Thailand	27	30	29	39	34	33
34. Brasil	38	37	33	37	35	34
35. Slovenia	-	-	-	-	40	35
36. Meksiko	42	42	40	34	36	36
37. Rep. Ceko	39	34	35	38	41	37
38. Afsel	43	44	44	42	42	38
39. Filipina	36	31	31	32	32	39



40. Polandia	45	43	43	45	44	40
41. Argentina	30	32	28	31	33	41
42. Turki	35	35	38	33	37	42
43. India	37	38	41	41	39	43
44. Kolombia	33	33	42	44	43	44
45. Indonesia	34	41	39	40	46	45
46. Venezuela	44	45	45	43	45	46
47. Rusia	46	46	56	46	47	47

Sumber: World Competitiveness Yearbook, Institutional Institute for Management Development





**TABEL :**  
**TABLE**  
**RINGKASAN EKSPOR INDONESIA (NILAI)**  
**SUMMARY OF INDONESIAN EXPORTS (VALUE)**  
**( 1 000 000 US \$ )**

Tahun Year	Tidak termasuk minyak bumi & gas/Excluding petroleum & gas				Minyak bumi & gas/Petroleum & gas				Jumlah Ekspor	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
	Hasil sektor pertanian 2) Products of the agricultural sector 2)	Hasil sektor industri 2) Products of the industrial sector 2)	Hasil sektor lain-lainnya Products of other sector	Sub Jumlah	Hasil minyak mentah Crude Petroleum product	Hasil minyak mentah Crude Petroleum product	G a s i)	Sub Jumlah	Total Exports	
1981	1 570,2	2 666,6	202,8	61,7	4 501,3	16 952,5	1 210,6	2 499,1	20 663,2	25 164,5
1982	1 221,2	2 466,1	179,1	62,8	3 929,2	14 856,0	637,3	2 905,8	18 395,1	22 328,3
1983	1 372,8	3 219,7	170,2	242,6	5 005,3	12 600,0	957,8	2 582,8	16 140,6	21 145,9
1984	1 532,9	3 982,5	184,0	170,3	5 869,7	11 021,4	1 455,6	3 541,1	16 018,1	21 887,8
1985	1 367,7	4 245,9	195,8	39,4	5 868,8	8 251,4	831,9	3 634,6	12 717,9	18 586,7
1986	1 754,1	4 508,4	246,7	19,2	6 528,4	4 593,3	907,7	2 775,6	8 276,6	14 805,0
1987	1 665,9	6 666,6	234,9	12,2	8 579,6	5 040,6	1 116,5	2 399,1	8 556,0	17 135,6
1988	1 909,1	9 262,0	348,7	17,3	11 537,1	4 087,8	954,6	2 639,0	7 681,4	19 218,5
1989	1 943,1	11 028,1	503,0	5,8	13 479,5	5 141,8	919,9	2 598,5	8 680,2	22 160,2
1990	2 083,2	11 878,5	636,0	6,4	14 604,1	6 219,9	1 183,9	3 667,3	11 071,1	25 675,2
1991	2 281,9	15 067,5	889,0	8,8	18 247,2	5 695,6	1 018,7	4 180,5	10 894,8	29 142,0
1992	2 212,0	19 613,1	1 453,0	18,1	23 296,2	5 397,8	1 221,1	4 051,8	10 670,7	33 966,9
1993	2 644,2	22 944,0	1 463,9	25,0	27 077,1	4 778,4	914,7	4 052,8	9 745,9	36 823,0
1994 *	2 818,4	25 702,1	1 800,4	38,6	30 359,7	5 071,6	933,0	3 689,1	9 693,7	40 053,4
1995	2 888,3	29 328,2	2 690,9	46,0	34 953,4	5 145,7	1 296,8	4 022,1	10 464,6	45 418,0
1996	2 912,7	32 124,8	3 019,8	35,6	38 092,9	5 711,9	1 516,2	4 493,9	11 722,0	49 814,9
1997	3 132,6	34 985,2	3 107,1	596,1	41 821,9	5 490,0	1 302,7	4 839,8	11 622,5	53 443,5
1998	3 653,5	34 593,2	2 704,4	24,2	40 975,3	3 348,7	708,1	3 815,5	7 872,3	48 847,6

Note : 1). Gas includes natural gas (LNG) & LPG  
2). Since 1987, excluding rattan

\*) . Sejak tahun 1987 tidak termasuk rotan  
\*) . Klasifikasi Migas dan Jenis Barang menurut International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah diperbaiki sejak Januari 1994



EXPORTS OF INDUSTRIAL PRODUCTS (VALUE)  
( 1000 000 US \$ )

Tahun Year	Kayu olahan Processed wood		Barang dari logam Articles of basic metal		Tekstil lain Other textile	Karet olahan Processed rubber	Makanan ternak Cattle fodder	Minyak atsiri Essential oils	Minyak kela- pa sawit oil			
	Lapis Plywood	Gergajian Sawwood	Timah Tin	Nikel Nickel								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1981	161,4	220,1	35,8	452,1	1,1	151,1	95,3	30,5	811,8	88,4	15,9	106,9
1982	269,9	233,8	40,9	367,4	21,9	118,9	115,3	35,8	570,7	74,2	20,5	96,2
1983	509,4	257,1	34,1	309,4	132,0	135,1	155,5	112,2	804,6	86,4	35,6	111,5
1984	667,9	282,2	43,7	269,1	204,6	126,2	295,9	188,0	909,5	66,4	53,3	63,3
1985	824,7	307,2	52,9	240,5	245,9	116,8	339,6	219,7	683,3	67,8	50,3	166,2
1986	1 002,4	360,1	55,4	148,7	197,1	99,0	518,8	278,7	882,9	73,5	46,7	112,9
1987	1 759,3	442,3	134,6	155,4	245,8	118,5	597,9	417,5	933,6	76,8	38,5	143,6
1988	2 073,7	602,8	207,2	181,6	328,6	352,1	795,8	582,6	1 134,0	147,4	39,2	280,7
1989	2 350,9	667,8	271,1	251,1	380,7	314,7	1 169,2	833,1	1 035,1	129,8	77,8	224,6
1990	2 725,5	110,1	491,1	173,2	262,4	188,4	1 670,1	1 260,2	851,3	163,0	109,3	203,6
1991	2 871,0	177,3	611,6	149,5	225,7	219,6	2 289,9	1 785,1	959,9	166,8	152,7	335,4
1992	3 230,2	312,2	637,9	163,8	265,3	156,7	3 188,6	2 872,1	1 074,7	182,2	105,3	356,6
1993	4 257,0	390,6	858,7	90,8	268,7	150,9	3 510,2	2 671,9	1 063,1	168,3	63,5	472,4
1994	3 716,4	509,8	964,4	118,4	322,3	227,7	3 226,1	2 573,3	1 391,2	156,7	77,2	717,8
1995	3 462,0	453,7	1 074,6	219,4	475,1	284,1	3 388,1	2 815,5	2 190,7	141,5	80,0	747,3
1996	3 595,4	473,4	1 063,9	276,2	421,0	218,7	3 575,8	2 975,0	2 226,7	206,3	78,3	825,5
1997	3 410,6	380,0	1 514,0	274,6	400,1	173,2	2 875,6	3 658,4	1 988,4	140,9	86,5	144,0
1998	2 077,9	163,9	2 181,6	281,1	351,4	108,1	2 567,9	4 739,6	1 548,1	111,6	120,0	745,3

Tahun Year	Asam berlemak Fatty acids	Alat-alat listrik Electrical Apparatus	Makanan olahan Processed food	Semen Cement	Barang anyaman Plained articies	Bahan kimia Chemicals	Pupuk Ferti- lizer	Kulit & barang dari kulit Leather and leather goods	Kertas dan barang lainnya Paper and paper goods	Others	Jumlah Total
1981	11,4	86,1	64,3	19,2	5,5	30,4	4,3	28,7	0,7	245,9	2 666,6
1982	30,4	129,2	54,7	8,4	8,1	14,8	10,1	29,8	2,7	212,4	2 466,1
1983	32,4	144,7	70,1	7,2	8,0	19,2	46,8	28,7	5,9	173,8	3 219,7
1984	61,5	168,9	61,2	12,5	9,3	47,2	37,0	42,1	20,6	351,8	3 982,5
1985	59,3	144,0	56,7	21,5	12,9	56,7	80,0	44,1	20,9	434,9	4 245,9
1986	33,3	97,7	81,5	39,8	19,2	51,9	127,3	49,1	31,7	400,7	4 508,4
1987	52,0	56,7	105,9	56,1	44,6	72,0	85,7	73,0	95,9	960,9	6 666,6
1988	76,5	102,0	139,4	75,6	76,4	73,8	134,1	77,6	138,2	1 643,6	9 262,0
1989	42,6	190,0	234,4	128,3	48,1	116,6	165,4	79,1	167,5	1 999,2	11 028,1
1990	80,2	285,9	292,6	97,0	40,1	112,7	194,0	73,2	155,8	2 338,8	11 878,5
1991	93,6	668,7	390,7	43,2	56,3	147,2	297,6	53,2	267,6	3 104,9	15 067,5
1992	112,8	1 096,9	429,6	107,0	57,4	213,6	185,8	80,5	344,7	4 439,1	19 613,1
1993	142,6	1 637,1	435,7	65,1	52,1	263,0	153,4	73,7	500,5	5 690,7	22 944,0
1994	242,8	717,5	813,1	30,0	52,9	350,5	179,9	70,5	671,2	8 572,4	25 702,1
1995	327,3	922,3	818,6	8,4	66,0	519,3	277,2	65,0	1 011,4	9 960,4	29 328,2
1996	209,9	1 411,4	961,9	18,8	64,4	521,3	271,5	65,5	955,3	11 562,9	32 124,8
1997	189,6	1 370,6	834,0	79,5	79,5	721,2	312,4	104,5	398,5	14 083,5	34 985,2
1998	415,2	1 490,8	753,7	146,5	43,3	605,6	168,9	174,5	425,5	14 036,4	34 693,2

Catatan : 1). Sebelum tahun 1987 termasuk dalam hasil pertanian as agricultural product

Note : 1). Prior to 1987 rattan was considered as agricultural product



TABEL :  
 IMPOR MENURUT GOLONGAN BARANG EKONOMI  
 TABLE  
 IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES  
 ( 1000 000 US \$ )

Tahun Year	(1)	(2) Barang konsumsi Consumer goods	(3) Bahan baku Raw materials	(4) Barang modal Capital goods	(5) Jumlah Total
1981		807,1	10 445,8	2 019,2	13 272,1
1982		1 236,3	12 590,7	3 031,9	16 858,9
1983		1 726,2	11 732,0	2 893,6	16 351,8
1984		825,3	10 482,3	2 574,5	13 882,1
1985		380,5	8 162,7	1 718,7	10 261,9
1986		448,2	8 363,9	1 906,3	10 718,4
1987		460,6	9 474,2	2 435,5	12 370,3
1988		469,4	10 222,9	2 556,2	13 248,5
1989		688,6	11 905,5	3 765,5	16 359,6
1990		876,9	14 893,1	6 067,0	21 837,0
1991		938,4	17 233,8	7 676,6	25 868,8
1992		1 212,8	18 700,0	7 366,8	27 279,6
1993		1 146,1	20 034,8	7 146,9	28 327,8
1994		1 430,2	23 133,6	7 419,7	31 983,5
1995		2 350,4	29 586,6	8 691,7	40 628,7
1996		2 205,9	30 469,7	9 652,9	42 928,5
1997		2 166,3	30 229,5	9 284,0	41 679,8
1998		1 917,7	19 611,8	5 807,4	27 336,9



Tabel  
Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha  
(milliar rupiah)

Lapangan usaha	Hargakonstan 1993					Hargaberikutu				
	1994	1995	1996r	1997r	1998*	1994	1995	1996r	1997r	1998*
<b>Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan</b>	59.291,2	61.885,2	63.827,9	64.289,5	64.433,5	66.071,5	77.896,2	88.791,7	100.150,5	186.482,7
Tanaman bahan makanan	31.407,8	32.951,7	33.647,0	32.752,8	32.410,1	34.941,0	42.199,6	47.622,1	51.561,6	88.546,1
Tanaman perkebunan	9.471,6	9.912,0	10.354,9	10.483,0	11.107,8	10.587,2	12.666,6	14.434,6	16.389,2	36.377,0
Peternakan dan hasil-hasilnya	6.451,4	6.789,5	7.133,4	7.483,1	7.002,8	7.102,3	8.078,7	9.523,7	11.688,1	19.743,3
Kehutanan	6.300,9	6.303,6	6.444,1	6.960,5	7.032,6	6.897,4	7.390,4	8.170,4	9.633,5	19.294,7
Perikanan	5.659,5	5.928,4	6.248,6	6.610,0	6.880,0	6.543,6	7.560,9	9.040,8	10.878,1	22.521,7
<b>Pertambangan dan penggalian</b>	33.261,6	35.502,2	37.739,3	38.385,9	36.787,5	33.507,1	40.194,7	46.068,1	54.509,9	127.216,7
Minyak dan gas bumi	23.719,6	23.719,9	24.062,7	23.919,7	23.412,8	23.070,0	25.409,7	28.118,4	33.280,4	83.061,1
Pertambangan tanpa migas dan penggalian	9.542,0	11.782,3	13.676,6	14.466,2	13.374,9	10.437,1	14.785,0	17.969,6	21.229,5	44.165,5
<b>Industri pengolahan</b>	82.649,0	91.637,1	102.259,7	108.828,5	94.808,3	89.240,7	109.688,7	136.425,8	159.747,7	259.564,0
Industri migas	10.268,8	9.782,4	10.863,8	10.650,2	10.846,7	10.439,1	11.398,6	14.194,3	16.137,0	31.391,4
Pengilangan minyak bumi	5.547,9	5.392,1	6.291,4	5.925,5	6.086,3	5.855,1	6.599,1	8.340,0	8.172,2	11.313,9
Gas alam cair	4.390,3	4.572,4	4.572,4	4.724,7	4.760,3	4.799,5	5.854,2	5.854,1	7.964,8	20.077,7
Industri tanpa migas	72.380,2	81.854,7	91.395,9	98.178,3	83.961,6	78.801,6	98.290,1	122.231,5	143.610,7	228.172,6
Listrik, gas, dan air bersih	3.702,7	4.291,9	4.876,7	5.498,6	5.702,1	4.577,1	5.655,4	6.892,7	7.939,3	11.530,6
<b>Bangunan</b>	25.857,5	29.197,8	32.923,7	35.040,7	21.116,4	28.016,9	34.451,9	42.024,8	46.181,1	83.841,3
<b>Pedagangan, hotel, dan restoran</b>	59.504,1	64.230,8	69.475,0	73.503,6	59.572,2	63.858,7	75.639,8	87.137,4	103.762,8	147.477,6
Perdagangan besar dan eceran	47.619,5	51.396,6	55.513,5	58.822,1	47.287,4	51.133,8	60.378,8	69.375,4	81.724,2	116.039,7
Hotel dan restoran	11.884,6	12.834,2	13.961,5	14.681,5	12.284,8	12.724,9	15.261,0	17.762,0	22.038,6	32.437,9
<b>Pengangkutan dan komunikasi</b>	25.188,6	27.328,6	29.701,1	32.169,4	28.051,3	27.352,6	30.795,1	34.926,4	42.231,8	83.639,8
Pengangkutan	21.400,2	22.931,5	24.444,6	25.995,9	21.580,1	23.191,0	25.476,7	29.246,5	35.198,5	43.539,5
Komunikasi	3.788,4	4.397,1	5.256,5	6.173,5	6.471,3	4.161,6	5.318,4	5.679,9	7.033,3	10.100,0
<b>Keuangan, persewaan, dan jasa perush.</b>	28.047,8	30.901,0	36.384,2	38.730,1	28.372,5	34.505,6	39.510,4	43.981,6	58.691,2	81.469,8
Bank <sup>1)</sup>	14.005,3	15.944,6	18.886,8	20.143,2	13.338,4	17.817,5	20.852,3	21.853,4	29.536,2	45.462,5
Sewa bangunan dan jasa perusahaan	14.042,5	14.956,4	17.497,3	18.587,0	15.034,1	16.688,1	18.658,1	22.128,1	29.155,0	36.007,0
<b>Jasa-jasa</b>	33.361,4	34.285,1	36.610,2	37.649,0	35.874,9	35.089,4	40.681,9	46.299,5	52.291,7	68.351,2
Pemerintahan umum	22.458,0	22.752,0	23.338,4	23.616,5	21.965,3	22.754,9	26.555,2	29.752,9	32.127,9	37.249,9
Swasta	10.903,4	11.533,1	13.271,7	14.032,5	13.909,6	12.334,5	14.126,7	16.546,6	20.163,7	31.101,3
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	329.775,8	354.640,8	413.797,9	434.095,5	374.718,8	382.219,7	454.514,1	532.568,0	625.505,9	989.573,1
Nonmigas	296.861,2	320.652,4	378.871,2	399.525,4	340.459,4	348.710,6	417.705,8	490.255,3	576.088,6	875.130,6
Migas	32.914,6	33.988,4	34.926,7	34.569,9	34.259,3	33.509,1	36.808,3	42.912,7	49.417,4	114.442,5

1) Termasuk lembaga keuangan di luar bank dan jasa penunjang keuangan

Sumber : Badan Pusat Statistik



Keputusan Presiden Republik Indonesia  
 Nomor 95 Tahun 1998  
 tentang

Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia  
 (Indonesian Debt Restructuring Agency)

Presiden Republik Indonesia

Menimbang

- a bahwa gejala moneter di Indonesia dewasa ini perlu diupayakan penyelesaiannya secara tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,
- b bahwa masalah utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan terib untuk memperoleh penyelesaian yang cepal dan akurat,
- c bahwa s hubuhan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) dengan Keputusan Presiden.

Mengingat

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865).
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;

Memutuskan

Menetapkan

Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*).

Pasal 1.

Membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Nasional (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disingkat INDRA, yang bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

Pasal 2.

INDRA mempunyai tugas mengusahakan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia dengan skem yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kreditor luar negeri.

Pasal 3.

Susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas INDRA diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 4.

Personele, anggaran dan staf INDRA ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5.

(1) Setiap biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas INDRA dibebankan kepada Bank Indonesia yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam biaya operasi INDRA.

(2) Apabila dalam pelaksanaan tugas INDRA terdapat kerugian akibat risiko nilai tukar maka kerugian tersebut menjadi beban pemerintah.

Pasal 6.

Apabila pelaksanaan tugas INDRA sebagaimana dimaksud dalam keputusan pemerintah ini telah tercapai, maka INDRA dibubarkan dan segala harta kekayaan menjadi milik negara.

Pasal 7.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 1998

Presiden Republik Indonesia

Ttd

Bacharuddin Jusuf Habibie